

4 Bk 3 Bu



**ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 22 DAN 25 TAHUN 1999
VERSUS UNDANG-UNDANG NO. 32 DAN 33 TAHUN 2004
DALAM MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI
(Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)**

TESIS

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**B. RINI HERYANTI
B4A 099 021**

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft.	4335/7/MIH/CJ
Tgl.	24-7-06

**Dosen Pembimbing
Prof. Dr. Miyasto,
Noor Rahardjo, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

**ANALISIS UNDANG – UNDANG NO. 22 DAN 25 TAHUN 1999
VERSUS UNDANG – UNDANG NO. 32 DAN 33 TAHUN 2004
DALAM MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI
(Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)**

TESIS

Telah Diterima Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Pada tanggal :

1 Agustus 2005

Disusun oleh :

B. RINI HERYANTI

B4A 099 021

Pembimbing I



Prof. Dr. Miyasto

NIP. 130 516 585

Pembimbing II



Noor Rahardjo, S.H., M.Hum

NIP. 130 675 153

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H

NIP. 130 350 519

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

IMAN, HARAPAN dan KASIH, itulah tiga pilar kehidupan seorang manusia. Dengan IMAN, seseorang mampu percaya kepada Tuhan sebagai sumber dan tujuan hidupnya. Dengan KASIH, seseorang mampu melakukan segala sesuatu dengan penuh makna didalam perjalanan hidupnya. Dengan HARAPAN, seseorang mampu mengarahkan pandangannya terhadap sesuatu yang akan datang, sesuatu kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sekarang didunia ini dan kehidupan sesudah hidup ini.

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibundaku tercinta,
2. Suamiku tercinta,
3. Anak – anakku, Tomi dan Tita tersayang,
4. Semua saudara – saudaraku yang sangat berperan dalam penyelesaian tesis ini.

ABSTRAK

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah adalah perangkat undang-undang otonomi daerah yang membawa paradigma desentralistik dalam berpemerintahan. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan dan tanggung jawab daerah untuk menggali sumber-sumber daerah dan dipergunakan untuk kepentingan daerah. Investasi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digali dari pajak dan retribusi dan Jawa Tengah adalah daerah yang cukup kondusif untuk ditingkatkan iklim investasinya, karena mempunyai sumber daya alam dan manusia yang dapat menunjang investasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Analisis Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 versus Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 dalam Menciptakan Iklim Investasi (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah).

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini didukung oleh data primer dan sekunder dengan teknik wawancara. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa UU No. 22 Tahun 1999 membawa implikasi terhadap iklim investasi dalam bentuk penerapan kebijakan *One Stop Service* yang telah diterapkan di Kabupaten Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara, Sragen, Kudus dan akan diterapkan di Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah. UU No. 25 Tahun 1999 juga membawa implikasi terhadap iklim investasi dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah yang berasal dari pajak dan retribusi. Terlebih lagi bagi 5 kabupaten yang sudah menerapkan OSS, mengalami peningkatan PAD yang bersumber dari peningkatan investasi.

UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 sangat menentukan penciptaan iklim investasi, karena undang-undang ini adalah sebagai revisi dari undang-undang yang sebelumnya. Hal baru yang diatur undang-undang UU No. 32 tahun 2004 yang dapat mendukung terciptanya iklim investasi adalah penempatan provinsi sebagai daerah otonom dengan asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sebagai daerah otonom, Jawa Tengah dapat melaksanakan OSS sebagai realisasi dari kebijakan pemerintah provinsi. Ini akan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Apabila telah tercipta iklim investasi yang kondusif, maka pemerintah akan diuntungkan dalam hal penerimaan daerah, karena keberadaan investasi sangat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi dengan catatan ditiadaknya pungutan-pungutan liar dan tumpang tindih pungutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, Investasi.

ABSTRACT

The act no. 22/1999, which has been changed by the act no. 32/2004 about The Local Government; and the act no. 25/1999, which has been changed by the act no. 33/2004 about the Financial Balance Between The Central and Local Government, is a set of the local autonomous law, which brings the decentralistic paradigm in the government administration. The law gives the authority and responsibility for the locality to explore the local resources and is used for the local interest. An investment is one of the original local income resource, which can be explored from taxes and retribution; the Central Java is the conducive province to increase the investment because it has the natural and human resources, which can support the investment. For this reason, this research will analyse the act no. 22 and 25/1999 versus the act no. 32 and 33/2004 in creating the investment (the case study in Central Java).

The research is a descriptive analytical study, with the socio-juridical. This research is supported by primary and secondary data, with an interview technic. The validity of data is done by the triangulation technic and is analysed qualitatively.

According to the outcomes of this research, it's found that the act no. 22/1999 brings the implication for the investment in the form of the application of the policy "*One Stop Service*" (the service system of giving an investment approval and its permission for the realization in one of the governmental institution, which is responsible for the investment area), which has been applied in Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara, Sragen, Kudus and will be applied in the other regencies in Central Java. The act no. 25/1999 also brings the implication of the investment in the form of the increase in the original local income of Central Java, which comes from taxes and retribution. Furthermore, for five regencies, which have applied *One Stop Service*, experience an increase in PAD, which comes from the increase of investment.

The act no. 32 and 33/2004 determine the encouragement of an investment sphere because this law is as a revision from the law before. A new thing that is managed by the act no. 32/2004, which supports encouragement of investment, is the replacement of province as an autonomous territory with the decentralistic and deconsentralistic principle, which carries out the control and establishment as sub-ordinate from the central government as an outonomous province, the Central Java can carry out OSS as a realization of the provincial government's policy. This will create the conducive investment.

If the conducive investment has been created, the government will benefit from the local income because the existance of investment can support the increasing original local income. However, the wild and overlapped taxes between the central and local government must be abolished

Key Words : The local government, the balance between the central and local government, the original local income, the investment.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat kasih dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan naskah tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan proses studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Proses studi dan penyelesaiannya pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP ini tidak terlepas dari perhatian, bantuan dan dorongan semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses studi sampai selesainya.

Terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Miyasto, SE. selaku pembimbing pertama dan Bapak Noor Rahardjo, SH. M.H. selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu beliau yang sangat padat untuk membimbing, mengarahkan penulis menyelesaikan penulisan tesis ini serta kebijaksanaan beliau dan kerendahan hati yang patut penulis puji dan menjadi contoh yang baik dalam kehidupan penulis.

Rasa terima kasih yang dalam dan penghargaan yang tulus juga penulis sampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Alumni UNDIP yang telah memberi kesempatan dan dorongan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.
2. Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang, yang telah memberi kesempatan penulis untuk mengembangkan diri dan memperluas wawasan sebagai akademisi dengan mengizinkan penulis melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.
3. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNDIP beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan kesempatan dan

bantuan selama penulis menempuh studi sehingga selesainya pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.

4. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan bimbingan dalam memperluas wawasan keilmuan sebagai akademisi selama masa perkuliahan.
5. Pimpinan instansi dan perusahaan yang telah memberi ijin dan informasi untuk memperoleh data dalam rangka penulisan yaitu: Bapak Drs. Suharyo (P.T. Batam Tekstile Industry), Bapak Sidharta (P.T. Sandratex), Bapak Drs. Edy Gunawan (DIPENDA. Prop. JATENG), Bapak Didik Sudiantoro, SE. M.M (BPM. Prop. JATENG)
6. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Semarang, yang selalu mendorong dan memberi semangat kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik secara doa maupun perhatian selama penulis mengikuti pendidikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih perlu penyempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam pengembangan ilmu hukum.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Pengasih, membalas segala kebaikan dan amal kasih semua pihak yang telah membantu penulis serta senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua.

Semarang, Juli 2005

Penulis

B. Rini Heryanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	19
D. Kontribusi Penelitian	19
E. Metodologi Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah	33
B. Tinjauan Umum tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah	47
C. Tinjauan Umum tentang Investasi	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Implikasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 terhadap Iklim Investasi di Jawa Tengah	67
B. Implikasi Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 terhadap Iklim Investasi di Jawa Tengah	94
C. Keberadaan Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dalam Mewujudkan	

Iklim Investasi Jawa Tengah yang Kondusif dalam Rangka	
Pembangunan Daerah -----	120
BAB IV PENUTUP -----	133
A. Kesimpulan -----	133
B. Saran -----	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penanaman Modal di Jawa Tengah	14
Tabel 3.1 Perkembangan Rencana dan Realisasi Investasi PMA Di Provinsi Jawa Tengah	68
Tabel 3.2 Perkembangan Rencana dan Realisasi Investasi PMDN Di Provinsi Jawa Tengah	68
Tabel 3.3 Perbandingan Perkembangan Penanaman Modal di Jawa Tengah Periode Tahun 2002 dan 2003	69
Tabel 3.4 Perbandingan Perkembangan Penanaman Modal di Jawa Tengah Periode Januari-Juni 2003 dan Januari-Juni 2004	73
Tabel 3.5 Rencana Strategis Penanaman Modal Jawa Tengah.....	82
Tabel 3.6 Perkembangan PAD dan Kontribusi APBD Provinsi Jawa Tengah Selama Lima Tahun Anggaran	95
Tabel 3.7 Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Tengah Tahun 2003 -----	97
Tabel 3.8 Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Tengah 2003	98
Tabel 3.9 Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Tengah Tahun 2004	109
Tabel 3.10 Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Tengah 2004.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata. Sejalan dengan itu, pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional harus mengedepankan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan yang juga memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, diperlukan instrumen regulasi yang menjadi basis di dalam pelaksanaannya yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini merupakan perwujudan dari penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih nyata dan bertanggung jawab kepada daerah yang secara proporsional diwujudkan dalam bentuk pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah, penyaluran, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dimaksudkan dalam rangka mempertahankan, memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip asas kerakyatan yang berkeeseimbangan dengan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat.

Machfud Sidik menyatakan bahwa : pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata. Pembangunan daerah harus merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang mengedepankan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan proporsional dapat diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta

masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.¹

UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 adalah merupakan jawaban yang dilakukan dalam menggeser dan merubah paradigma pembangunan yang sentralistik menjadi paradigma desentralistik yang menekankan pada pelayanan dan pemberdayaan. Perubahan paradigma ini bukan berarti pemerintah sudah tidak lagi memiliki komitmen terhadap pembangunan, akan tetapi mendudukkan tugas pembangunan di atas nilai-nilai pelayanan dan pemberdayaan, dalam arti tidak ada lagi kebijakan pembangunan yang mengandung nilai ketidakadilan dan bersifat mematikan kreatifitas masyarakat.

Pendekatan sentralistik yang tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1956, seringkali dilandaskan pada argumentasi dan pembenaran bahwa inilah konsekuensi yang harus ditanggung sebagai negara kesatuan. Padahal jika ditelaah lebih dalam lagi, kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikonsepsikan dalam UUD 1945 menghargai hak-hak otonom, selain itu kebhinnekaan budaya masyarakat Indonesia, keanekaragaman kondisi geografis dan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara satu daerah dengan daerah lainnya menjadi landasan yang kokoh untuk menciptakan negara kesatuan yang berbasis penghargaan atas hak-hak otonom. Akibat yang muncul dari adanya pendekatan yang terpusat

¹ Machfud Sidik, "Prospek dan Problematika Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah", *Otonomi dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah*, (Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, 2004), Vol.23, No. 1, hal., 15.

ini adalah semakin kuatnya ketergantungan daerah kepada pusat. Inilah wujud patronasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kreatifitas, inisiatif dan prakarsa dari daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat daerah menjadi terpasung dan terkikis.

Ini berarti, dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1974 terjadi pergeseran dan perubahan paradigma mendasar. Konsep otonomi yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1974 sarat dengan nuansa sentralistik, sehingga dinilai telah menghambat proses demokratisasi pemerintahan. Paradigma yang ditekankan dalam undang-undang tersebut adalah paradigma pembangunan. Paradigma ini menekankan bahwa pembangunan adalah peran pokok dari pemerintahan, sehingga mengorbankan peran hakiki dari pemerintah sebagai pihak yang memberikan pelayanan dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah yang terlalu menonjolkan pembangunan, pada tingkat pertama mengharuskan adanya suatu sistem perencanaan yang bersifat terpusat, di mana kendali pemerintahan dan pembangunan berada di pusat, sehingga terjadi adanya penyeragaman sistem organisasi pemerintah daerah dan manajemen proyek yang dikembangkan di daerah, dengan alasan bahwa agar hasil-hasil pembangunan mudah diukur, dikendalikan, diawasi, dan dievaluasi. Akibat dari paradigam ini adalah terjadinya ketergantungan yang kuat dari daerah kepada pemerintah pusat. Di sinilah akar dari hubungan antara pusat dan daerah yang bersifat patronasi.

Keadaan inilah yang selanjutnya mematikan dan mematahkan daya kreatifitas dan prakarsa dari pemerintah dan masyarakat daerah. Di sisi lain, beban yang dipikul oleh pemerintah semakin besar sehubungan dengan semakin memberat dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi, sehingga menyulitkan pemerintah pusat dalam membuat dan mengambil kebijakan yang tepat dan dapat merespon dinamika masyarakat dan tantangan yang sedang dihadapi.

Langkah berikutnya sebagai kelanjutan dari komitmen pemerintah terhadap otonomi daerah, maka pada tanggal 14 Oktober tahun 2004 telah diundangkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Keberadaan undang-undang ini merupakan revisi dan perbaikan dari undang-undang sebelumnya. Salah satu tujuan dilakukannya revisi terhadap undang-undang yang sebelumnya adalah terletak pada pemberian jaminan bagi rakyat kebanyakan untuk mendapatkan pelayanan langsung yang lebih baik (*better services*) dari pemerintah daerah dan upaya paksaan yang lebih keras akan terciptanya keadilan dan pemerataan (*justice and quality*).²

Letak fokus otonomi kepada kabupaten atau kota sudah tepat namun ada kelemahannya, yaitu pada saat dihadapkan pada situasi kompleks, terjadi kesulitan akses kepada masyarakat dan jauhnya jarak terhadap pemerintah

² M. Mas'ud Said, "UU Otonomi Baru dan Peran Strategis Kecamatan", (Jakarta : Kompas, senin, 30 Desember 2004), hal., 40.

daerah.³ Oleh karena itulah dalam undang-undang yang baru ini, lebih mendekatkan jarak dan akses masyarakat kepada pemerintah daerah dan sebaliknya, demikian juga dengan peran Camat dan lurah diberdayakan tidak hanya sekedar sebagai “wayang” Bupati atau Walikota, akan tetapi sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.

Bhenyamin Hoessein menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya adalah penyelenggaraan pemerintah daerah yang diawasi melalui berbagai saluran. Pengawasan mencakup produk hukum, keuangan di berbagai instansi dan kualitas pelayanan. Pengawasan itu diperlukan untuk mengarahkan otonomi daerah pada tujuan pemberdayaan masyarakat.⁴

Penetapan UU No. 33 Tahun 2004 sebagai revisi dari UU No. 25 tahun 1999 adalah merupakan wujud dari tidak dapat dilaksanakannya mekanisme perimbangan keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 32 tahun 1956. Hal tersebut terjadi antara lain karena adanya beberapa faktor yang belum memungkinkan untuk digunakan dalam menghitung pembagian keuangan kepada daerah. Selain itu, berbagai jenis pajak yang merupakan sumber pelaksanaan perimbangan keuangan tersebut saat ini sudah tidak diberlakukan lagi melalui peraturan perundangan, serta adanya kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang. Di samping itu, dalam rangka

³ *Ibid.*

⁴ “Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tak Lengkap”, (Jakarta : Kompas, Jum’at, 30 Juli 2004)

pelaksanaan otonomi daerah dengan semakin besarnya beban daerah dalam melaksanakan kewajibannya perlu diikuti dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan diskresi untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan sebuah peraturan perundang-undangan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Terkait dengan perubahan pola pembagian kewenangan pada tingkat pemerintahan (pusat, propinsi, dan kabupaten/kota), kewenangan di bidang keuangan yang pada dasarnya melekat pada setiap kewenangan pemerintah turut pula diserahkan untuk menjadi kewenangan daerah. Termasuk dalam kesatuan penyerahan kewenangan ini adalah penyerahan dan pengalihan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang terkait dengan kewenangan tersebut. Adapun penyerahan kewenangan di bidang keuangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 diwujudkan dalam pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerah sendiri (PAD) serta didukung dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan prosesntase yang jelas, yaitu dengan pemberian sumber-sumber keuangan kepada daerah yang diwujudkan dalam Dana Perimbangan.

Sesuai dengan semangat tersebut, paradigma pemerintahan daerah yang dikembangkan menurut kedua undang-undang tersebut adalah bertumpu pada nilai-nilai demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintahan, keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Di samping itu juga dimaksudkan untuk mendorong memberdayakan masyarakat, membutuhkan

prakarasa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD). Dengan paradigma ini, pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang mengarah pada terciptanya *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, partisipatif, transparan dan akuntabel. Dengan demikian, segala bentuk kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah secara langsung mneyangkut kepentingan masyarakat di daerah. Ini disebabkan pemerintah daerah sendirilah yang lebih tahu bagaimana keadaan dan kondisi dari masyarakat di daerah serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itulah, kebutuhan masyarakat lebih terakomodatif dan tersalurkan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Ini berarti, kehadiran kedua undang-undang hasil revisi dari undang-undang sebelumnya tersebut sangat penting dan membawa nuansa baru dalam kehidupan berdemokrasi. Dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut tentu saja akan membawa dampak yang sangat luas terhadap kehidupan tata pemerintahan dan tata keuangan pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pembangunan, UU No. 33 Tahun 2004 tersebut dirasakan lebih aspiratif bagi daerah. Dalam penentuan dana perimbangan, misalnya asas proporsionalitas,

adil, transparan dan bertanggung jawab sangat diperhatikan, baik dalam hal pembagian kekayaan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pembagian Pendapatan atas sumber daya alam maupun pengalokasian Dana Alokasi Umum dalam bentuk dan prosentase pembagian yang jelas antara pusat dan daerah.

Akan tetapi terdapat eksekusi negatif yang seringkali terjadi dengan adanya otonomi daerah adalah dalam hal pengambilan keputusan yang dilakukan oleh daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang memberikan peluang besar bagi daerah untuk mengatur daerahnya, seringkali dinilai sebagai kekuasaan daerah untuk melakukan segala sesuatunya sekehendak daerah, tanpa adanya pematangan-pematangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan, orientasi-orientasi nilai yang seringkali kabur karena adanya dorongan-dorongan untuk menjadi yang terbaik dan mandiri. Keputusan dan kebijakan yang diambil seringkali terburu-buru dan lebih mementingkan hal-hal yang bersifat praktis, tanpa mempertimbangan aspek sosiologis dan filosofis yang dijadikan landasan di dalam pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan *euphoria* dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Kebutuhan masyarakat daerah bukan lagi menjadi prioritas pembangunan dan pemberdayaan, akan tetapi justru mendudukkan masyarakat sebagai obyek untuk mengeruk pendapatan sebesar-besarnya dengan alih pembangunan daerah. Masyarakat tidak didudukkan sebagai subyek yang harus diberdayakan untuk menunjang pembangunan daerah. Wujud *euphoria* yang seringkali terjadi adalah adanya pungutan-pungutan yang memberatkan

masyarakat bahkan pungutan tersebut bersifat pungutan liar, karena adanya *overlapping* dalam hal pengaturannya. Berbagai peraturan saling tumpang tindih antara peraturan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga ini sangat memberatkan masyarakat dan dunia usaha khususnya.. Seperti halnya adanya retribusi parkir berlangganan yang wajib dibayarkan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor. Retribusi parkir berlangganan ini dinilai memberatkan karena tidak adanya jaminan dari pemerintah daerah setempat untuk parkir gratis di tempat-tempat umum, sehingga masih tetap harus membayar parkir pada para penjaga parkir. Sementara pemilik kendaraan bermotor sudah melakukan pra-bayar atas parkir berlangganan tersebut tiap tahunnya. Selain itu, juga pungutan-pungutan lainnya yang bersifat tidak transparan, karena adanya jumlah lembaga/instansi yang cukup banyak dan jumlah pungutan yang beranekaragam, sehingga mengakibatkan keberagaman bentuk pungutan. Ini disebabkan orientasi pemerintah daerah pada peningkatan PAD merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri Oleh sebab itulah, adanya otonomi daerah di satu sisi dapat mengatasi permasalahan sentralisasi pengurusan daerah, akan tetapi di lain pihak banyak terdapat permasalahan baru yang muncul sebagai akibat desentralisasi

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional akan memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah juga sangat erat kaitannya dengan proses

desentralisasi pembangunan yang berkembang pada saat ini, sehingga usaha-usaha untuk mencapainya perlu senantiasa ditingkatkan agar laju pertumbuhan antar daerah semakin seimbang dan serasi sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia.³

Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan daerah sendiri, yaitu selain untuk meningkatkan produksi, pendapatan, menjaga kestabilan nasional, juga pemeratakan pembanguan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah nusantara dan diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja.⁴ Ini tentunya membuka peluang tantangan dan kendala, terutama bagi daerah Kabupaten dan Kota untuk lebih leluasa mengelola pembangunan di daerah masing-masing, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk itulah, pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud nyata otonomi.

Kebijakan desentralisasi fiskal sebagai tindak lanjut kebijakan otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri di samping transfer dana pusat dalam membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan yang sah menjadi kewenangan daerah. Wujud kewenangan daerah untuk menggali dana dari

³ Prijono Tjiptoheriyanto, *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hal., 1.

⁴ T. Gilarso, *Ekonomi Indonesia Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999), hal., 5.

sumber sendiri adalah kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan jenis-jenis yang tercantum dalam UU No. 34 tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya. Perolehan pendapatan asli daerah (PAD) yang setinggi-tingginya dijabarkan oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan berbagai macam peraturan daerah yang ada. Peraturan-peraturan daerah yang diterbitkan haruslah sejalan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang, peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap penanaman modal di daerah. Untuk itu, pemerintah daerah harus dapat membuktikan bahwa daerah mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi penanam modal sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah tanpa ragu-ragu.

Penerbitan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi menjadi dasar berpijak dari kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak maupun retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemberlakuan peraturan daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD, ditandatangani oleh Kepala Daerah serta diundangkan dalam lembaran daerah. Dalam Pasal 5a dan 25a UU No. 34 Tahun 2000, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan peraturan daerah kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri lima belas hari setelah ditetapkan, di mana kewajiban tersebut berkaitan dengan kewenangan pusat untuk melakukan pengawasan yang sudah harus ditetapkan dalam tempo satu bulan sejak diterimanya Perda tersebut.

Tindak lanjut atas pengawasan tersebut adalah keputusan untuk membatalkan Perda pajak atau retribusi apabila berdasarkan hasil pengkajian dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kata kunci untuk pembangunan, dalam hal ini pembangunan daerah adalah adanya penanaman modal atau investasi. Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan sehingga investasi pada hakikatnya juga merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, akan mengakibatkan pentingnya daerah menumbuhkan iklim investasi, seiring dengan kemampuan daerah dalam mengupayakan pembiayaan atas semua kegiatan di daerah. Roeslan Zaris menyatakan bahwa investasi swasta memainkan peranan penting dalam membentuk pola pembangunan di daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal daerah (*region capital formation*). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.⁵

Pengangguran adalah merupakan bagian dari permasalahan pembangunan, khususnya pembangunan di daerah. Tingkat pengangguran yang semakin meningkat sejak terjadinya krisis tahun 1997, memberikan

⁵ Roeslan Zaris, *Perpektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta : LPFEUI, 1987), hal., 27.

pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang sebelumnya tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah pusat. Pengguran juga merupakan suatu permasalahan yang harus segera dicari solusinya. Dengan adanya otonomi daerah ini, kewenangan dalam pengentasannya ada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itulah, penting membuka diri dan memberikan peluang untuk meningkatkan pembangunan dengan penanaman modal atau investasi. Dengan adanya investasi yang semakin meningkat, akan berakibat meningkatnya pula kesempatan bagi terbukanya lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Ini merupakan konsekuensi logis yang harus dipikul dari adanya pembangunan.

Dari beberapa daerah di tanah air, dalam profil Provinsi Republik Indonesia disebutkan bahwa salah satu daerah yang menarik untuk dicermati dan dianalisis dalam kegiatan pembangunan, kaitannya dengan investasi/penanaman modal, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah provinsi Jawa Tengah. Perkembangan rencana dan realisasi investasi di Jawa Tengah dari tahun 1997 sampai dengan 2003 cenderung mengalami fluktuatif, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

TABEL 1.1
PENANAMAN MODAL DI JAWA TENGAH

Tahun	Jumlah Proyek	Nilai Investasi PMA (US\$)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi PMDN (US\$)
1999	72	127.845.393.55	26	1.308.709.116.573
2000	56	72.072.435.43	34	2.451.203.432.171
2001	57	96.681.990.00	26	2.912.197.970.000
2002	44	91.765.000.00	14	1.541.259.610.000
2003	57	80.018.358.00	21	3.607.653.588.597

Sumber : Badan Penanaman Modal Jawa Tengah tahun 2003

Dari data tersebut menunjukkan bahwa investasi, baik PMA atau PMDN di Jawa Tengah mengalami perubahan yang bersifat fluktuatif. Perubahan fluktuatif tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan tiap tahun yang selalu berubah-ubah, di mana terkadang mengalami kenaikan dan penurunan. Untuk PMA, sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 terus mengalami penurunan, namun untuk PMDN justru sebaliknya, dari tahun 2002 ke tahun 2003 mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat.

Akan tetapi untuk investasi PMDN yang mengalami peningkatan dari tahun 2002 ke tahun 2003 sebesar dua kali lipat ini, merupakan *starting point* yang bagus untuk menumbuhkan iklim investasi di Jawa Tengah. Selain itu, berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal Jawa Tengah menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2003 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini dibuktikan dengan perekonomian Jawa Tengah pada triwulan III tahun 2003 mengalami peningkatan 0,89% dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,61% dibandingkan triwulan kedua. Selain itu, prosentase pengangguran relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2002, di mana jumlah penduduk miskin mengalami kecenderungan penurunan.⁸

Menurut penilaian pada rating daya tarik investasi yang dilakukan oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), menyatakan bahwa pada tahun 2002 Kota Semarang menempati peringkat pertama dari

⁸ Soendoro, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Promosi Investasi yang Tepat Sasaran bagi Provinsi Jawa Tengah dalam Era Otonomi Daerah", dalam Seminar Nasional "Prospek dan Peluang Investasi di Era Otonomi Daerah" dalam rangka Dies Natalis Universitas Semarang XXXIX, yang diselenggarakan oleh Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Semarang, di Semarang tanggal 23 Maret 2004, hal., 2.

134 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dalam hal peningkatan daerah yang nyaman untuk investasi. Hal ini disebabkan secara geografis dan karakteristik Provinsi Jawa Tengah masih banyak menyimpan potensi sumber daya yang siap untuk dimanfaatkan, yaitu perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, pertambangan, pariwisata dan industri. Selain itu, menurut data KPPOD tahun 2003 menunjukkan bahwa Kota Tegal menempati peringkat kedua terbaik dari aspek sosial politik. Sedangkan Kabupaten Cilacap menempati peringkat keempat ditinjau dari aspek infrastruktur.⁷

Penilaian yang dilakukan oleh KPPOD ini sangat bermanfaat bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Untuk dunia usaha, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi investor untuk melakukan kebijakan investasinya. Untuk pemerintah daerah, dapat dijadikan sumber informasi untuk kepentingan daerah otonom dalam melihat posisi relatifnya dalam hal daya tarik investasi di wilayahnya. Ini menunjukkan bahwa situasi yang baik dan kondusif dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Dari sisi potensi dan peluang investasi yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, hingga saat ini masih banyak yang belum dikerjakan secara optimal

Implikasi yang lebih jauh lagi adalah berupa telaah dan analisis kritis dalam bentuk pertanyaan mengenai faktor-faktor apa sesungguhnya yang berpengaruh terhadap keberadaan investasi swasta, baik domestik (dalam negeri) maupun asing, di suatu daerah terutama dalam hal ini Provinsi Jawa

⁷ *Ibid.*

Tengah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat penulis kerucutkan mengenai alasan pentingnya dilakukan penelitian ini, yaitu :

1. Otonomi daerah adalah merupakan wujud kebijakan baru dari pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan yang luas untuk daerah dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya.
2. Adanya perubahan paradigma yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan berubahnya pola pelaksanaan otonomi daerah, yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralistik.
3. Keberadaan UU No. 32 Tahun 2004 sebagai perubahan atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 sebagai perubahan atas UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menjadi landasan hukum bagi daerah untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka peningkatan perekonomian di daerah, sehingga akan menimbulkan insentif untuk meningkatkan iklim investasi dalam rangka untuk membiayai kegiatan daerah.
4. Provinsi Jawa Tengah adalah wilayah yang cukup kondusif untuk dilakukan investasi, mengingat kekayaan yang dimilikinya, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang belum dapat diberdayakan secara optimal.

B. PERMASALAHAN

Rumusan masalah adalah konteks dari penelitian yang merupakan alasan mengapa penelitian diperlukan dan petunjuk yang mengarahkan tujuan

penelitian. Pedoman dalam perumusan masalah adalah mengungkap fenomena apa di balik gejala masalah tersebut dan mengidentifikasi penyebab utamanya.

Kenyataan yang ada tentang investasi di Jawa Tengah menunjukkan bahwa sebagai lokomotif pembangunan merupakan suatu variabel yang tidak stabil. Investasi akan mengalami titik puncak (*peak*) dan menurun ketika stok kapital mencapai tingkat yang sama dengan stok optimum, berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang di atas, maka batasan dari masalah yang hendak dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai pemanfaatan dan peranan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 terhadap investasi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan melihat bagaimana peningkatan investasi berdasarkan dari kedua undang-undang tersebut di masa yang akan datang. Sedangkan alasan pemilihan jangka waktu penelitian dari tahun 1980-2003, karena peranan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui investasi di Jawa Tengah mulai dirasakan meningkat pada awal Pelita III, di samping kenyataan bahwa selama periode tersebut sampai 1997 perekonomian Indonesia relatif stabil dan baru mengalami krisis ekonomi setelah tahun 1998. Permasalahn untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap iklim investasi di Jawa Tengah ?
2. Bagaimanakah implikasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 terhadap iklim investasi di Jawa Tengah?
3. Bagaimana Undang-Undang No. 32 yang merevisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang merevisi

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mampu memberikan pemecahan pada masa yang akan datang sehingga mampu terwujud iklim investasi yang kondusif dalam rangka pembangunan daerah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis implikasi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap iklim investasi di Provinsi Jawa Tengah
2. Menganalisis implikasi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 terhadap iklim investasi di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis prospektif Undang-Undang No. 32 yang merevisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang merevisi Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dalam memberikan pemecahan yang diperlukan untuk masa yang akan datang sehingga mampu mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam rangka pembangunan daerah.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Kegunaan dari segi teoritis

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pengembangan pengetahuan akademis, khususnya ilmu hukum ekonomi, di samping membandingkan kegiatan penelitian yang ada sebelumnya di daerah lain maupun sebagai bahan penunjang bagi penelitian lainnya. selain itu juga dapat menambah khasanah (perbendaharaan) kepustakaan mengenai investasi di Provinsi Jawa Tengah.

2. Kegunaan dari segi praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat digunakan Pemerintah daerah sebagai instrumen pengambil kebijakan (*policy marker*) di daerah dalam menggali sumber pendapatan daerah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk membiayai kegiatan daerah;

b. Bagi Pihak Investor

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di Jawa Tengah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, pengetahuan dan analisis bahwa investasi merupakan salah satu usaha yang harus dilakukan untuk menggali pendapatan daerah dalam rangka menunjang otonomi daerah sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Berpijak pada judul dan permasalahan yang melandasi penelitian ini, maka digunakan penelitian yuridis sosiologis . Digunakan yuridis karena dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merevisi Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang merevisi Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memberikan solusi dan pemecahan terhadap implementasi atas kekurangan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999.

Digunakan sosiologis karena penelitian ini dilakukan dengan menitik beratkan pada pendekatan empiris, di mana yang diteliti adalah implementasi dari UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 terhadap iklim investasi di Jawa Tengah. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara bersamaan, karena kita tidak bisa melihat realitas hukum hanya dari sisi *law in the books* atau *law in action* saja, akan tetapi harus dari kedua sisinya, sehingga diketahui bagaimana efektifitas hukum dari dua sudut pandang yang berbeda tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu menggambarkan, baik dalam bentuk angka maupun pemaparan mengenai bagaimana implementasi UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 terhadap iklim investasi di Provinsi Jawa Tengah. Sifat kualitatif dari penelitian ini menghasilkan data deskriptif dari implementasi undang-undang tersebut terhadap iklim investasi di Provinsi Jawa Tengah, serta bagaimana UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 mampu memberikan pemecahan dan perbaikan bagi UU No. 22 Tahun 1999 dan UU no. 25 Tahun 1999 pada masa yang akan datang. Sifat deskriptif penelitian bukan dalam arti sempit, melainkan dalam arti luas, dengan memberikan gambaran tentang segala fenomena yang ada. Fakta-fakta apa yang terungkap digambarkan

dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum, karena fakta tidak mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

Digunakan spesifikasi tersebut, karena hukum dilihat tidak hanya semata-mata aturan-aturan normatif, akan tetapi secara empiris merupakan realitas yang menggejala di dalam masyarakat, sehingga dapat dilakukan analisis terhadap permasalahan kesenjangan yang terjadi antara *das sollen* dan *das sein* dari hukum.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipergunakan sebagai tempat penelitian adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Alasan dipergunakannya lokasi penelitian tersebut, karena Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan wujud daerah otonom dalam pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, menurut hasil kajian dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada tahun 2003 menunjukkan bahwa Jawa Tengah merupakan daerah yang cukup kondusif untuk menarik minat investasi.

Alasan lainnya adalah bahwa potensi dan peluang investasi yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah hingga saat ini masih banyak yang belum dikerjakan secara optimal.

4. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini diusahakan pengumpulan data sebanyak mungkin mengenai masalah-masalah yang berhubungan dalam penelitian ini. Oleh karena itulah akan digunakan data primer dan data sekunder.

Data primer adalah merupakan data yang dapat diperoleh di lapangan sebagai data utama,¹⁰ sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan, maupun aturan-aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk menunjang kelengkapan data primer.¹¹

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari realitas empiris di lapangan, yaitu data-data yang ditemukan selama berada di lapangan, pada saat dilakukan wawancara dengan para responden dan pada saat dilakukan dokumentasi terhadap data-data primer yang dapat diperoleh dari Badan Penanaman Modal Jawa Tengah dan dari para investor, baik investor domestik maupun investor asing. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan : Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁰ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia, 1992), hal., 52.

¹¹ *Ibid.*

Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 yang diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang berupa penelitian-penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, buku-buku ilmu hukum, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang mendukung dan memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus hukum.

5. Penentuan Responden Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang dibutuhkan adalah tuntasnya perolehan informasi dan data secara maksimal dengan keragaman variasi

yang timbul. Konsep sampel dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan pemilihan informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang mantap dan dapat dipercaya sehubungan dengan apa yang diteliti. Oleh karena itulah dalam pemilihan responden, menurut Spradley perlu dipertimbangan hal-hal sebagai berikut :¹²

1. Responden adalah subyek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian.
2. Responden secara aktif masih terlibat pada aktivitas yang menjadi sasaran penelitian.
3. Responden memiliki cukup waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Dalam memberikan informasi, tidak cenderung “dikemas” atau masih bersifat alami dan sesuai dengan realitas yang ada, sehingga tidak terjadi bias.
5. Banyak hal yang bisa digali dari informan tersebut, sehingga memungkinkan data yang diperoleh lebih banyak.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah :

1. Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah
2. Investor, yaitu BATAMTEX dan SANDRATEX

¹² Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang : YA3, 1990), hal., 58.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Oleh karena itulah, dalam pengambilan data dimulai dari informasi awal dan berikutnya dilakukan dalam proses penelitian dengan prinsip “bola salju” (*Snow Ball*), yaitu pengambilan informasi yang dilakukan secara terus menerus dari satu responden ke responden lainnya, demikian terus menerus dan akan berhenti setelah informasi yang dibutuhkan sebagai data dalam penelitian lengkap. Oleh karena itulah teknik pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara (*Interview*). Data diperoleh dengan cara : wawancara (*interview*).

Wawancara atau yang biasa disebut dengan *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan secara lisan oleh interviewer atau pewawancara untuk memperoleh informasi dan data dari responden yang bersangkutan mengenai hal-hal yang sedang diteliti.¹³ Wawancara atau *interview* digunakan oleh peneliti untuk menilai dan mencari data atau informasi tentang variable yang diperlukan dalam penelitian.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1998), hal., 145.

Wawancara (*interview*) dilakukan dengan cara bebas terpimpin.

Wawancara ini dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan yang dijadikan pedoman akan tetapi masih dimungkinkan dengan variasi pertanyaan lain disesuaikan situasi responden yang telah ditunjuk dengan tidak terlepas dari permasalahan yang dibahas. Disamping dilakukan dengan cara bebas terpimpin, teknik wawancara juga dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*depth interview*), yaitu wawancara yang dilakukan dengan kontak langsung oleh peneliti dengan responden secara terus menerus dan berulang-ulang sampai dengan hal yang mendasar, sesuai dengan kebutuhan peneliti.¹⁴ Wawancara dilakukan kepada responden-responden yang telah ditentukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai implikasi UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 serta bagaimana UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 memberikan pemecahan pada masa yang akan datang dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam rangka pembangunan daerah.

¹⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), Cetakan ke-1, hal., 138.

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Data atau informasi yang telah diperoleh harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain dengan metode yang berbeda-beda. Tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data.¹⁵ Teknik ini dikenal dengan 'triangulasi'. Menurut Denzin, triangulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan multimetode untuk menelaah fenomena yang sama.¹⁶ Maksudnya adalah keabsahan data diperiksa kembali dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut yang berfungsi sebagai pembanding atas data tersebut.

Teknik triangulasi yang dipakai adalah triangulasi metode, yaitu dengan dua strategi, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan dari beberapa sumber data dengan metode yang sama.

8. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif yang diolah dengan metode interaktif, artinya data yang diperoleh dengan metode wawancara mendalam dan dokumentasi, ditelaah secara lebih terperinci dan perhatian dipusatkan pada masalah tertentu secara simultan dengan terlebih dahulu memilih dan memprioritaskan data-data yang menunjang penelitian dan permasalahan yang dibahas, untuk selanjutnya

¹⁵ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 1992), hal., 10.

¹⁶ Sudarwan Danim, *Op.cit.*, hal., 37.

dilakukan editing terhadap data, kemudian data disajikan dan diambil kesimpulan.

Hasil analisis terhadap semua permasalahan dalam tesis ini pada akhirnya akan diformulasikan ke dalam saran, yang diharapkan dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam rangka penyusunan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim investasi di Jawa Tengah agar dapat tercipta iklim yang kondusif.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan diperlukan untuk memberikan gambaran dan uraian tentang pokok-pokok materi yang diangkat oleh penulis dalam menyusun tesis ini, yang dibagi ke dalam 4 (empat) bab dan beberapa sub bab.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini, disajikan secara lengkap mengenai gambaran umum sehingga dapat menimbulkan permasalahan serta landasan pemikiran sehingga muncul permasalahan. Pada bab ini terbagi menjadi 7 (tujuh) sub bab, yaitu :

- A. Latar Belakang, yang berisi mengenai latar belakang penelitian ini dilakukan sehingga timbul permasalahan dan alasan yang mendasari pemilihan judul dalam tesis ini.
- B. Perumusan Masalah, menguraikan tentang apa saja yang menjadi pokok permasalahan sehingga dilakukan penelitian dan penulisan tesis ini.
- C. Tujuan Penelitian, menguraikan tentang apa yang menjadi tujuan penulis mengadakan penelitian dan penyusunan tesis ini.
- D. Kontribusi Penelitian, menguraikan tentang kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, baik untuk pihak objek yang diteliti, maupun bagi masyarakat luas.
- E. Metodologi Penelitian, menguraikan metode-metode apa yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini, sehingga hasil dari penelitian ini secara kualitas dapat diakui validitasnya. Metodologi penelitian ini terbagi menjadi :
1. Metode Pendekatan
 2. Spesifikasi Penelitian
 3. Lokasi Penelitian
 4. Sumber dan Jenis Data

5. Penentuan Responden Penelitian

6. Teknik Pengumpulan Data

7. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

8. Teknik Analisis Data

F. Sistematika Penulisan, menguraikan tentang pokok-pokok materi yang diangkat oleh penulis dalam menyusun tesis ini.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang teori-teori hukum, telaah pustaka, asas-asas hukum, pendapat-pendapat hukum, dan aturan-aturan hukum yang dipakai, yang berhubungan dengan fakta yang sedang dihadapi dan bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh untuk selanjutnya dilakukan analisis agar dapat diperoleh pemecahan dari permasalahan yang dihadapi.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang kristalisasi dari fakta-fakta yang telah ditemukan dan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka teori yang ada sehingga diperoleh pemecahan atas masalah yang ada dalam bentuk kesimpulan. Selain itu juga diuraikan tentang saran-saran yang diberikan penulis untuk perbaikan dan kelangsungan ilmu hukum yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah, secara teoritis dan normatif telah tersurat dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berawal dari pernyataan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut di atas, maka eksistensi otonomi daerah telah memiliki landasan hukumnya untuk dilaksanakan dan keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah :

Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, daerah otonom yang selanjutnya disebut dengan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam otonomi daerah tersebut adalah :

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah diselenggarakan dalam rangka untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik dalam maupun luar negeri, serta adanya tantangan-tantangan globalisasi. Keberadaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa : Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Ini berarti, daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur daerahnya sendiri, sehingga terbuka kesempatan dan peluang yang lebar untuk mempelajari, memahami dan merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaatnya, sehingga daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang bersifat signifikan. Kemampuan, prakarsa dan kreatifitas daerah akan terpacu dan mengakibatkan kapabilitas daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan domestik akan semakin kuat.

Oleh karena itulah, menurut H.A.W. Widjaja, dalam bukunya *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, menyatakan bahwa :

Daerah harus membentuk suatu paket otonomi yang konsisten dengan kapasitas dan kebutuhannya. Dalam negara majemuk seperti Indonesia, "satu ukuran belum tentu cocok dengan untuk semua". Oleh karena itu, dalam penyusunan paket otonomi perlu melibatkan komunitas-komunitas lokal dari masing-masing daerah, sehingga menjamin proses desentralisasi secara lebih baik dan bertanggung jawab.¹

Paket otonomi tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang lengkap dan menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Gary F. Bell :

*Theoritically, decentralisation of power by it self does not lead to have negative impact on national unity, on foreign investmen, etc. The problem lies on whether the legal framework for decentralisation is clear and easily enforceable or not. If the legal framework for decentralisation such as the divicion of power, the hierarchy of laws and regulations, the status of regional regulations and the modes of conflict resolution or not entirely clear, it will caise many problems in the implementation of regional otonomy in Indonesia.*²

¹ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2002), cet.1, hal., 2.

² Garry F. Bell, "Decentralisation in Indonesia-Theory and Practice", dalam *Jurnal Hukum Bisnis Otonomi dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah*, (Jakarta : Business Law Development Foundation, 2002, hal., 5.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Gary F. Bell tersebut di atas, jelas bahwasannya dalam pelaksanaan desentralisasi harus disertai dan dilandasi dengan aturan hukum yang lengkap dan jelas, sehingga tidak terdapat saling tumpang tindih antara peraturan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sejak Indonesia merdeka dan membentuk suatu pemerintahan, telah diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan, yaitu :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Negara Indonesia Timor timur No. 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Indonesia Timur;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah;
5. Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah;
6. Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretaris Daerah;
7. Undang-Undang No.18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang No.19 Tahun 1965 tentang Desa Praja;
9. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Pokok-Pokok Pemerintah Daerah;

10. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.

11. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Sebelum diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004, telah diundangkan terlebih dahulu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Keberadaan UU No. 22 Tahun 1999 merupakan *starting point* yang merubah paradigma dalam pemerintahan secara mendasar. Konsep otonomi yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1974 dan aturan-aturan sebelumnya sarat dengan nuansa sentralistik, sehingga dinilai telah menghambat proses demokratisasi pemerintahan. Paradigma yang ditekankan dalam undang-undang tersebut adalah paradigma pembangunan. Paradigma ini menekankan bahwa pembangunan adalah peran pokok dari pemerintahan, sehingga mengorbankan peran hakiki dari pemerintah sebagai pihak yang memberikan pelayanan dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah yang terlalu menonjolkan pembangunan, pada tingkat pertama mengharuskan adanya suatu sistem perencanaan yang bersifat terpusat, di mana kendali pemerintahan dan pembangunan berada di pusat, sehingga terjadi adanya penyeragaman sistem organisasi pemerintah daerah dan manajemen proyek yang dikembangkan di daerah, dengan alasan bahwa agar hasil-hasil pembangunan mudah diukur, dikendalikan, diawasi, dan dievaluasi. Akibat dari paradigma ini adalah terjadinya ketergantungan yang kuat dari daerah kepada pemerintah pusat. Di sinilah akar dari hubungan antara pusat dan daerah yang bersifat patronasi. Keadaan inilah yang selanjutnya mematikan dan mematahkan daya kreatifitas dan prakarsa dari

pemerintah dan masyarakat daerah. Di sisi lain, beban yang dipikul oleh pemerintah semakin besar sehubungan dengan semakin memberat dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi, sehingga menyulitkan pemerintah pusat dalam membuat dan mengambil kebijakan yang tepat dan dapat merespon dinamika masyarakat dan tantangan yang sedang dihadapi.³

Selanjutnya dengan berlandaskan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dibentuklah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

UU No. 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 menekankan pada konsep pelayanan dan pemberdayaan masyarakat daerah

³ Syauckani, Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002), cet.2, hal., 173.

dalam rangka menyukseskan dan mendukung otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan yang berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perubahan paradigma ini bukan berarti pemerintah sudah tidak lagi memiliki komitmen terhadap pembangunan, akan tetapi mendudukkan tugas pembangunan di atas nilai-nilai pelayanan dan pemberdayaan, dalam arti tidak ada lagi kebijakan pembangunan yang mengandung nilai ketidakadilan dan bersifat mematikan kreatifitas masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah merupakan simbol kepercayaan (*trust*) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, artinya pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilakan untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab, karena daerah dinilai yang lebih mengetahui dengan jelas dan riil mengenai keadaan, sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Pemerintah pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itulah dalam kerangka otonomi daerah diperlukan adanya kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat, dengan adanya keleluasaan berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah daerah.

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, selain asas desentralisasi dan tugas pembantuan, juga dipergunakan asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Keberadaan UU No. 32 Tahun 2004 ini pada prinsipnya meletakkan titik berat otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota dengan tujuan untuk mendekatkan tugas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mohammad Hatta, bahwa :

Apabila kita ingin mendekatkan demokrasi yang bertanggung jawab kepada rakyat, melaksanakan cita-cita lama yang tertanam dalam pengertian “pemerintah dari yang diperintah”, maka sebaik-baiknya titik berat pemerintah itu sendiri diletakkan pada Kabupaten.⁴

Prinsip otonomi dan desentralisasi secara tersirat telah dikemukakan oleh Mohammad Hatta dalam pernyataan tersebut di atas. Menurut The Liang Gie, alasan dipergunakannya asas desentralisasi dalam otonomi daerah karena:

1. Desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah adanya penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani;
2. Desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat agar ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi;
3. Desentralisasi untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien;
4. Desentralisasi diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya diletakkan pada kekhususan suatu daerah, seperti geografis, penduduk, kegiatan ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya;

⁴ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), cet.2, hal., 12.

5. Desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih berperan dan membantu pembangunan ekonomi di daerah.⁵

Namun demikian, terdapat kelebihan dan kekurangan dari asas desentralisasi ini. Menurut Rozali Abdullah, kelebihan dari asas desentralisasi adalah :

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat;
2. Dalam menghadapi permasalahan yang sangat mendesak dan perlu adanya tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat;
3. Dapat mengurangi birokrasi yang panjang, sehingga setiap keputusan dapat segera dilaksanakan;
4. Dapat diadakan pembedaan (*differensiasi*) dan pengkhususan (*spesialisasi*) yang berguna bagi kepentingan tertentu;
5. Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang baik dapat diterapkan di seluruh wilayah negara dan yang kurang baik dapat dibatasi pelaksanaannya dan lebih mudah dihilangkan.⁶

Disamping keuntungan yang diperoleh dengan adanya asas desentralisasi, juga terdapat aspek kekurangan dari desentralisasi, yaitu :

1. Karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang dapat mempersulit koordinasi;
2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam keputusan dari daerah dapat lebih mudah terganggu;
3. Khusus daerah teritorial, dapat mendorong timbulnya daerahisme/provinsialisme;
4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena perlu adanya perundingan yang bertele-tele;
5. Diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit memperoleh uniformitas dan kesederhanaan.⁷

⁵ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid III, (Jakarta : Gunung Agung, 1968), hal., 35-41.

⁶ Rozali Abdullah, *Op.Cit.*, hal., 12-13.

⁷ *Ibid.*, hal., 14.

Konsep otonomi daerah yang sudah berlaku sampai dengan saat ini pada dasarnya telah menimbulkan terjadinya ambivalensi antara keinginan untuk menerapkan asas desentralisasi atau tetap mempertahankan konsep asas sentralisasi yang sebelumnya telah lama mengakar dan melembaga dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Hal ini sebenarnya merupakan suatu hal yang dapat dipahami. Sejak masa reformasi, di mana demokrasi yang berlandaskan Pancasila ingin dikembalikan sebagai landasan idiilnya, maka desentralisasi menjadi alternatif pilihan bagi penataan pemerintahan. Menurut Muhammad A.S. Hikam dan Syarif Hidayat :

Konsep desentralisasi yang digunakan oleh Indonesia lebih menunjuk kepada *administrative decentralisation perspectif*. Langkah fundamental yang harus diambil oleh Indonesia adalah melakukan reformulasi konsep desentralisasi dari *administrative decentralisation perspectif* menuju *political decentralisation*.⁸

*Administrative decentralisation perspectif is the transfer of authority from control to local government.*⁹ Ini berarti desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (bukan kekuasaan) dari pemerintah pusat kepada daerah dan tujuan utama yang hendak diwujudkan lebih dititikberatkan kepada upaya menciptakan efisiensi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sebaliknya, *political decentralisation* sebagai langkah fundamental yang harus direformulasikan merupakan konsep desentralisasi sebagai

⁸ Muhammad A.S. Hikam dan Syarif Hidayat, "Hubungan Pusat dan Daerah : Dari Ketergantungan Menuju Keseimbangan", *Indonesia Menapaki Abad 21 : Kajian ekonomi Politik (Kumpulan Tulisan Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemamusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)*, (Jakarta : Millenium Publisher, 2000), Cet.1, hal., 65.

⁹ *Ibid.*

devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan tujuan mewujudkan *political equality*, *local accountability* dan *local responsiveness*.¹⁰ Jadi yang direformulasi adalah perubahan konsep *the delegation of authority* menuju ke *devolution of power*.

Oleh karena itulah seringkali terjadi banyak kesalah pahaman tentang pelaksanaan otonomi daerah dengan diberlakukannya sistem desentralisasi. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahafsiran dalam penyelenggaraan otonomi daerah di masyarakat, sehingga pemberlakuan otonomi daerah ini dirasakan tidak berdampak positif bagi masyarakat, karena dirasakan sama saja dengan konsep sentralisasi yang diberlakukan sebelumnya. Menurut Syaukani, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, kesalahpahaman tentang otonomi daerah di masyarakat adalah :¹¹

1. Otonomi daerah dikaitkan semata-mata dengan uang,

bahwa dengan berotonomi, daerah harus mencukupi sendiri segala kebutuhan dalam bidang keuangan. Hal ini harus diluruskan, karena kata kunci dalam otonomi daerah adalah kewenangan, dan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah masalah keuangan dapat digali dan dicari, oleh karena itulah pemerintah daerah harus dapat mempergunakan uang tersebut dengan bijaksana, tepat guna dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

¹⁰ *Ibid.*, hal., 67.

¹¹ Syaukani, Affan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, *Op.Cit.*, hal., 212-217.

2. Daerah belum siap dan belum mampu,

Munculnya ungkapan ketidaksiapan dan ketidak mampuan daerah karena paradigma sentralistik yang sudah begitu kuat mengakar dan menjadi pola hidup, sehingga tercipta ketergantungan daerah kepada pusat yang sangat besar, terutama dalam bidang keuangan. Selain itu, ketidaksiapan dan ketidakmampuan dari sisi sumber daya manusia dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dalam memberikan *public service* kepada masyarakat. Akan tetapi, pernyataan ini tidak dapat secara otomatis menjadi sarana legitimasi agar otonomi daerah tidak diberlakukan. Pada dasarnya telah sekian lama pemerintah daerah bekerja dalam menyelenggarakan *public service* dan justru merekalah yang tahu dan memahami segala problematika yang dialami oleh daerah sehingga mereka sendirilah yang mampu memberikan alternatif penyelesaiannya sesuai dengan kultur dan kebiasaan masyarakat di daerah.

3. Dikhawatirkan pemerintah pusat akan melepaskan tanggung jawab untuk membantu dan membina daerah.

Kekawatiran ini harus dihapuskan, karena pemerintah pusat tetap memberikan dukungan dan bantuan, baik berupa bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintah maupun di bidang keuangan, akan tetapi dukungan dan bantuan yang diberikan dalam kerangka otonomi yang dijalankan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dikawatirkan daerah dapat melakukan apa saja,

Hakikat dari otonomi daerah adalah kemandirian daerah, akan tetapi kemandirian yang diselenggarakan dalam rangka memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan sebaliknya mewujudkan disintegrasi. Daerah dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintah apa saja asalkan sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku secara nasional, selain itu kepentingan masyarakat adalah prioritas utama dalam pengambilan kebijakan.

5. Dikhawatirkan otonomi daerah akan memindahkan korupsi ke daerah dan menciptakan raja-raja kecil di daerah,

Kekhawatiran ini harus dihapuskan karena paradigma sentralistik telah dihapuskan dan digantikan dengan paradigma desentralistik. Selain itu perubahan dan perbaikan dalam budaya menjalankan pemerintahan pun harus diubah untuk memutuskan tali kemungkinan dilakukannya korupsi ke daerah. Otonomi daerah mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat di daerah sehingga dapat terjalin sistem politik dan kontrol yang baik dari lembaga infrastruktur politik di daerah dan tercipta demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah :¹²

¹² Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), Cet.5, hal., 60-64.

1. Manusia yang baik,

Manusia sebagai pelaksana harus baik dan merupakan aspek paling eensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena manusia merupakan obyek dari aktivitas pemerintahan dan pelaksana serta penggerak mekanisme pemerintahan.

2. Keuangan yang baik,

Keuangan yang baik merupakan faktor yang sangat penting, karena setiap kegiatan pemerintahan membutuhkan biaya, sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh M. Manullang, bahwa :

Bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara adalah hal yang sangat penting. Makin baik keuangan suatu negara, maka akan semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. sebaliknya, kalau keuangan negara tersebut kacau, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya.¹³

3. Peralatan yang baik,

Peralatan yang baik sangat mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebih lagi dengan adanya teknologi modern, akan tetapi peralatan yang baik tergantung pada faktor manusia sebagai operasionalnya dan faktor keuangan sebagai penyediannya.

4. Organisasi dan manajemen yang baik,

Cara yang baik dalam mencapai tujuan pemerintah daerah menurut M. Manullang sangat ditentukan oleh manajemen pemerintah daerah itu sendiri. Menurut Theodore Caplow, organisasi adalah sistem sosial yang

¹³ M. Manullang, *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah*, (Jakarta : Pembangunan, 1973), hal., 67.

mempunyai keanggotaan tertentu dan mampu memformulasikan serta menciptakan aturan-aturan baru untuk menggerakkan kehendak mereka sendiri.¹⁴ Panglaykin memberikan pengertian sendiri, yaitu organisasi sebagai sudut formil administrasi merupakan alat atau saluran bagi administrasi tersebut dan dapat mengefektifkan tindakan-tindakan dan kebijakan administrasi tersebut.¹⁵

Menurut L.A. Appley, manajemen adalah keahlian untuk menggerakkan orang untuk melakukan suatu pekerjaan.¹⁶ Pengertian yang berbeda diberikan oleh James A.F. Stoner, bahwa :

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi sereta penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁷

B. Tinjauan Umum tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Seiring dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, diundangkan pula UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Keberadaan undang-undang ini dalam rangka menyukseskan dan mendukung otonomi daerah melalui

¹⁴ Fred W. Riggs, *Frontiers of Development Administration*, terj. Luqman Hakim, (Jakarta : Rajawali, 1986), Cet.1, hal., 90.

¹⁵ Ateng Syafrudin, *Pengaturan koordinasi Pemerintah Daerah*, (Bandung : Tarsito, 1976), hal., 76.

¹⁶ Josef Riwu Kaho, *Op.Cit.*, hal., 228.

¹⁷ *Ibid.*

penyediaan sumber-sumber pembiayaan yang berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Oleh karena itulah perlu diatur secara tersendiri dan terperinci mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan.

Sebelum diundangkannya undang-undang ini, terlebih dahulu telah diundangkan Undang-Undang Nomor.32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Akan tetapi dengan adanya pergeseran paradigma dari paradigma pembangunan yang sentralistik menuju ke paradigma pembangunan yang desentralistik dengan menekankan pelayanan dan pemberdayaan, maka sebagai implikasi adanya otonomi daerah, masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pun harus disesuaikan dengan paradigma desentralistik. Hal ini disebabkan, keberadaan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan serta adanya kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mendukung otonomi daerah. Selanjutnya dengan mengingat amanah yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C dan Pasal33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. maka diundangkanlah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Latar belakang diundangkannya undang-undang ini karena UU No. 25 Tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti dan merupakan akibat dari tidak dapat dilaksanakannya mekanisme perimbangan keuangan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 1956.¹⁸

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah :

Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan, desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pemerintah pusat yang selanjutnya disebut dengan pemerintah adalah :

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pemerintah daerah adalah :

¹⁸ Machfud Sidik, "Prospek dan Problematika Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah", dalam *Jurnal Hukum Bisnis Otonomi dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah*, (Jakarta : Business Law Development Foundation, 2002, hal.,15.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 penerimaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ini, terdiri dari :

a. Pajak daerah

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (daerah bila pajak daerah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁹

b. Retribusi daerah.

Menurut Santoso Brotodihardjo, retribusi adalah pembayaran kepada kas negara (daerah bila retribusi daerah) berdasarkan peraturan yang berlaku secara umum dan untuk menaatinya, yang berkepentingan dapat memaksa bila ingin mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah dengan cara pembayaran yang bermacam-macam (tidak selalu dengan uang).²⁰

¹⁹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung : Refika Aditama, 1998), Cet.5, hal., 1.

²⁰ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung : Refika Aditama, 1998), Cet.19, hal., 7.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi :
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 2) Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHT); dan
- 3) Pajak Penghasilan (PPh).

Dana bagi hasil dari penerimaan PBB dan BPHT dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan pemerintah. Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
- b. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. 9% untuk biaya pemungutan.

10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbalan :

- a. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
- b. 35% dibagikan secara insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Dana bagi hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% dengan rincian :

- a. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
- b. 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

20% bagian pemerintah dari penerimaan PBHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

Dana bagi hasil dari penerimaan PPh dengan wajib pajak orang pribadi dalam negeri dibagi dengan imbalan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi. Penyalurannya dilakukan secara triwulan.

Pembagian penerimaan negara yang bersumber dari sumber daya alam ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
 - 1) Dana bagi hasil IHPH yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian :
 - a. 16% untuk provinsi;
 - b. 64% untuk kabupaten/kota penghasil.
 - 2) Dana bagi hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian :
 - a. 16% untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 32% untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- b. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari dana reboisasi yang menjadi bagian daerah adalah:

- 1) 60% bagian pemerintah digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional;
- 2) 40% bagian daerah penghasil digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kabupaten/kota penghasil.

- c. Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

Penerimaan pertambangan umum terdiri atas penerimaan iuran tetap (*Land-rent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*Royalty*).

Dana bagi hasil dari penerimaan negara iuran tetap yang menjadi bagian daerah adalah :

- 1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan;
- 2) 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

Dana bagi hasil dari penerimaan negara iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang menjadi bagian daerah adalah :

- 1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan;
- 2) 32% untuk kabupaten/kota penghasil;
- 3) 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

- d. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten/kota.

Penerimaan perikanan terdiri atas penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. Dana bagi hasilnya dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

- e. Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbalan :

- 1) 84,5% untuk pemerintah;
- 2) 15,5% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi sebesar 15% dan dibagi dengan rincian :

- 1) 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- 2) 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil;
- 3) 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

- f. Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbalan :

- 1) 69,5% untuk pemerintah;
- 2) 30,5% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi sebesar 30% dan dibagi dengan rincian :

- 1) 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- 2) 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil;
- 3) 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

- g. Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

Penerimaan negara dari pertambangan panas bumi merupakan penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas setoran bagian pemerintah dan iuran tetap dan iuran produksi. Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah dibagi dengan rincian :

- 1) 16% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- 2) 32% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil;
- 3) 32% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut dengan DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah hal yang sangat penting dalam otonomi daerah, oleh karena itulah aturan hukumnya menjadi satu paket dengan aturan hukum mengenai otonomi daerah. Menurut Ali Djoefri Chozin Soen'an, manfaat yang ditimbulkan dengan adanya pengaturan tentang perimbangan keuangan ini adalah :

1. Terbentuknya kemampuan perekonomian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat transparan, dengan adanya dukungan aktif dari masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
2. Terciptanya sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan pasti.²¹

Oleh karena itulah diperlukan perimbangan keuangan yang bersifat :

1. Bersifat umum dan dapat berlaku di setiap daerah yang memenuhi persyaratan.

²¹ Ali Djoefri Chozin Soen'an, "Persoalan dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999", *Indonesia Menapaki Abad 21 : Kajian Ekonomi Politik (Kumpulan Tulisan Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia)*, (Jakarta : Millenium Publisher, 2000), hal., 104.

2. Bersifat transparan dan alasan penetapan perimbangan harus diketahui dan dimengerti oleh masyarakat luas.
3. Metode penyaluran dana perimbangan APBN/APBD/bentuk-bentuk lain yang legal.
4. Bentuk perimbangan dapat berupa subsidi (kalau suatu daerah perlu mendapatkan bantuan) atau pajak (kalau daerah perlu memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan ekonomi daerah).
5. Bentuk dan besarnya perimbangan ditetapkan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkepentingan dan dapat berupa sumbangan/hadiah, pinjaman jangka panjang, menengah, pendek berupa finansial ataupun non-finansial.²²

C. Tinjauan Umum tentang Investasi

Penanaman modal (*investment*) adalah merupakan salah satu upaya yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan demikian, keberadaan investasi pada hakikatnya merupakan langkah awal dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat tampak dengan jelas marak lesunya pembangunan di suatu daerah. Oleh karena itulah, setiap daerah dalam era otonomi ini berusaha untuk menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.

Indonesia sebagai negara berkembang, telah membuka diri terhadap dunia investasi. Penggairahan iklim investasi di Indonesia diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Selanjutnya pada tahun 1968, diundangkan pula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pasal

²² *Ibid.*

176 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah menuangkan aturan secara jelas dan terang dalam hal investasi, yaitu :

Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pernyataan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, jelas bahwasannya dengan diberlakukannya otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam hal pengembangan ekonomi melalui investasi/penanaman modal.

Pengertian investasi secara luas, berarti mengorbankan dollar yang sekarang untuk dollar di masa yang akan datang.²³ Barry P. Basworth dalam buku *Tax Incentives and Economic Growth*, menyatakan bahwa menurut persepsi teoritis, investasi merupakan fungsi dari proyeksi penjualan masa yang akan datang (*expected future sales*) dan biaya penggantian tenaga dan modal.²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut berarti terdapat dua atribut yang melekat, yaitu risiko dan waktu, artinya pengorbanan yang terjadi saat ini adalah merupakan suatu kepastian, sedangkan hasilnya baru akan diperoleh di kemudian hari dan besarnya tidak pasti.²⁵ Dengan demikian, investasi menjangkau waktu yang akan datang. Dengan pengorbanan yang ada sekarang

²³ William F. Share, Gordon J. Alexander, Jeffery V. Bailey, *Investment*, (New Jersey : Prentice Hall Inc., 1995), hal., 1.

²⁴ Gunadi, *Pajak dalam Aktivitas Bisnis*, (Jakarta, Penerbit Andi Tandur, 1999, hal., 3.

²⁵ William F. Share, Gordon J. Alexander, Jeffery V. Bailey, *Op.cit.*, hal., 1.

untuk mendapatkan hasil dikemudian hari. Komaruddin memberikan pengertian investasi dalam 3 (tiga) arti, yaitu :

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
2. Suatu tindakan untuk membeli barang-barang modal;
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan hasil pendapatan di masa yang akan datang.²⁶

Saham merupakan sesuatu hak terhadap harta kekayaan perseroan,²⁷

sedangkan obligasi adalah perikatan (*verbintenis*), bukti tertulis dari suatu pinjaman, surat pengakuan utang, surat yang khusus dapat diperdagangkan yang merupakan bukti ikut serta dalam suatu pinjaman dari lembaga pemerintah dan badan usaha swasta.²⁸

Penanaman modal dalam negeri (*domestik*) adalah merupakan investasi yang dilaksanakan oleh pemilik-pemilik modal domestik di dalam negeri yang bersangkutan untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha yang dilaksanakan tersebut.²⁹ Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun

1968, penanaman modal dalam negeri adalah :

Penggunaan daripada kekayaan (kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun oleh swasta nasional atau swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha), baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

²⁶ Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2003), Cet.1, hal., 3.

²⁷ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), Cet.1, hal., 51.

²⁸ Heru Suprptomo, "Segi-segi Hukum Obligasi", *Otonomi dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah*, (Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, 2004), Vol.23, No.1, hal., 45.

²⁹ Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta : BPFE, 1999), cet. III, hal., 103.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1968, modal dalam negeri adalah :

Bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun oleh swasta nasional atau swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang dimaksud adalah yang menjadi modal asing, yaitu :

1. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dalam luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Penanaman modal asing adalah merupakan investasi yang dilaksanakan oleh pemilik-pemilik modal asing di dalam negeri yang bersangkutan untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha yang dilaksanakan tersebut.³⁰ Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang disebut dengan penanaman modal asing adalah :

Penanaman modal asing hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

³⁰ Irawan dan M. Suparmoko, *Op.Cit.*, hal., 103.

Keuntungan yang diperoleh negara/daerah yang bersangkutan dengan adanya investasi adalah diolahnya sumber daya alam yang ada, membuka lapangan kerja bagi sumber daya manusia yang ada dan terjadinya nilai tambah (*added value*), meningkatnya penerimaan negara/daerah dari sumber pajak serta adanya alih teknologi. Sebaliknya keuntungan yang diperoleh para investor adalah adanya aliran deviden dari hasil usaha itu dari negara/daerah di mana modal tersebut ditanamkan ke negara dari mana modal itu berasal.³¹

Pernyataan yang senada dikemukakan oleh aliran neoklasik tradisional yang memusatkan perhatiannya pada berbagai determinan faktor penentu pertumbuhan ekonomi, bahwa penanaman modal merupakan suatu hal yang bersifat positif karena keberadaannya dapat mengisi kekurangan tabungan yang dapat dihimpun dari dalam negeri, menambah cadangan devisa, memperbesar penerimaan pemerintah dan mengembangkan manajemen bagi perekonomian di negara penerimanya. Oleh karena itulah, investasi merupakan faktor kunci untuk dapat mencapai target pembangunan.³²

Secara umum terdapat 2 (dua) macam penanaman modal, yaitu :³³

1. Penanaman modal langsung

Pihak investor secara langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.

³¹ Gunadi, *Op.Cit.*, hal., 104.

³² Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta : Erlangga, 1998), cet.I, hal., 151.

³³ Rosyidah Rakhmawati, *Op.Cit.*, hal., 11.

2. Penanaman modal tidak langsung (*port folio*)

Pihak investor tidak terlibat langsung dan aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (*obligasi*) dan saham-saham perusahaan di mana modal tersebut ditanamkan atau hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata.

Menurut M.L. Jhingan, investasi langsung memiliki lebih banyak kelebihan dan menguntungkan dibandingkan investasi *port folio*. Keuntungan menggunakan investasi *port folio* hanya menyangkut tingkat suku bunga yang lebih tinggi, karena investasi *port folio* tidak memerlukan biaya yang yang besar.³⁴ Keuntungan yang diperoleh investasi langsung adalah :

1. Langsung memperkenalkan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi serta organisasi yang mutakhir kepada negara penerima.
2. Mendorong perusahaan lokal untuk investasi sendiri lebih banyak pada industri pendukung atau bekerjasama dengan perusahaan asing.
3. Negara penerima memperoleh jumlah modal yang besar, dalam hal sebagian laba dari investasi langsung ditanamkan kembali untuk pengembangan, modernisasi/pembangunan industri yang terkait.
4. Investasi langsung disalurkan untuk penggunaan yang logis dan produktif sehingga dapat menambah kapasitas produksi negara penerima.
5. Investasi langsung pada tahap pembangunan dapat meringankan beban neraca pembayaran negara penerima, karena tenggang waktu antara pengoperasian perusahaan dan perolehan laba membutuhkan waktu yang relatif lama.
6. Investasi langsung mendorong para pengusaha untuk menanamkan modal di negara penerima.³⁵

³⁴ M.L. Jhingan, *The Economics of Development and Planning*, terj. D. Guritno, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), Cet.6, hal., 608.

³⁵ *Ibid.*

Para pihak yang terlibat dalam kegiatan penanaman modal adalah penanam modal (*investor*) dan negara penerima modal (*host country*),³⁶ sedangkan pihak-pihak yang mendukung penanaman modal adalah tenaga kerja atau buruh yang bekerja dalam perusahaan tersebut, lembaga-lembaga keuangan (baik bank maupun non-perbankan), mitra kerja, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Terdapat 2 (dua) teori yang berhubungan dengan tingkat investasi yang diusahakan, yaitu :³⁷

1. Teori Usaha Perlahan-lahan (*Gradualist*)

Teori ini menyatakan bahwa negara yang sedang berkembang, sebaiknya tidak mengadakan industrialisasi cepat-cepat, karena resiko dan kekeliruan yang mungkin terjadi sangat besar untuk dipikul oleh negara yang bersangkutan. Injeksi kapital yang berlebihan dan banyak adalah kurang baik sampai dengan perekonomian di negara tersebut mampu untuk menyerapnya dengan baik. pemilihan teknik-teknik produksi dan investasi didasarkan pada biaya-biaya relatif daripada faktor-faktor produksi. Dalam kegiatan ekonominya harus diusahakan/diberdayakan untuk memajukan industri kecil.

2. Teori Dorongan Besar

Teori ini menyatakan bahwa hanya sedikit-sedikit saja usaha untuk menaikkan pendapatan, karena ini hanya akan mendorong pertumbuhan

³⁶ Rosyidah Rakhmawati, *Op.Cit.*, hal., 14.

³⁷ Irawan, M. Suparmoko, *Op.Cit.*, hal., 110-111.

penduduk saja, yang nantinya akan menghambat kenaikan pendapatan per kapita. Oleh karena itu harus dilaksanakan usaha secara besar-besaran untuk mengatasi pertumbuhan penduduk. Implikasinya harus diadakan investasi secara besar-besaran untuk menghilangkan kemiskinan, memaksimalkan output dengan menggunakan teknik yang paling produktif yang kadang-kadanya membutuhkan kapital yang cukup besar. Konsentrasi terhadap investasi untuk menghasilkan alat-alat kapital untuk mempertahankan pertambahan dan pertumbuhan output. Konsumsi ditekan, sehingga investasi dapat terus ada.

Untuk melakukan suatu investasi diperlukan kriteria-kriteria untuk mengarahkan investasi, yaitu :

1. Investasi harus ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat memaksimisasikan perbandingan antara output dan kapital.
2. Proyek-proyek yang dipilih harus memberikan perbandingan yang dapat memaksimisasikan penggunaan tenaga kerja terhadap investasi, sehingga lebih padat karya (produktivitas tenaga kerja yang tinggi).
3. Investasi hendaknya dapat mengurangi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran internasional, sehingga dapat memaksimisasikan perbandingan antara ekspor dan investasi.³⁸

Untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas, harus dipenuhi faktor-faktor sebagai berikut :³⁹

1. Pendapatan per kapita.

Bahwa investasi harus diarahkan untuk menaikkan pendapatan per kapita.

2. Pendapatan nasional

³⁸ *Ibid.*, hal., 192.

³⁹ *Ibid.*, hal., 193-195.

Bahwa investasi harus diarahkan untuk menaikkan pendapatan nasional tanpa mengesampingkan kenaikan pendapatan per kapita.

3. Faktor waktu

Bahwa investasi sangat ditentukan oleh faktor waktu, misalkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, investasi yang paling menguntungkan adalah gula, akan tetapi dalam jangka waktu 15 tahun yang akan datang belum tentu investasi industri gula menguntungkan.

4. Kepentingan masyarakat

Bahwa dalam mengadakan investasi perlu dipertimbangkan tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang paling utama, penting, dasar dan mendesak.

5. Faktor pasar

Bahwa investasi tidak hanya ditekankan pada produksi saja, akan tetapi harus mempertimbangkan faktor pasar sebagai tempat untuk menjual hasil produksinya.

6. Titik pertumbuhan (*growing point*)

Bahwa di negara yang sedang berkembang investasi diarahkan pada titik pertumbuhan. Menurut Rostow, titik pertumbuhan pada negara yang sedang berkembang adalah ditekankan pada :

a. Sektor primer

b. Sektor pelengkap (*supplementary sectors*)

- c. Sektor pertumbuhan sebagai akibat lanjutan (*derived growth sectors*), yaitu perkembangan yang didorong oleh penambahan penduduk dan pendapatan.

7. Pertumbuhan seimbang (*balanced growth*)

Investasi pada tingkat pertumbuhan harus didasarkan pada 2 (dua) pertimbangan, yaitu :

- a. Kriteria neraca pembayaran dan kriteria produktivitas

Bahwa investasi harus mengarah pada perbaikan neraca pembayaran dan peningkatan produktivitas.

- b. Pertumbuhan seimbang

Bahwa arah investasi harus diarahkan ke semua sektor, karena masing-masing sektor tersebut saling bergantung dan melengkapi.

8. Teknik produksi

Teknik produksi hendaknya padat modal atau padat karya.

Menurut teori Keynes, ransangan untuk melakukan investasi tergantung pada hal-hal :⁴⁰

1. Efisiensi Modal Marginal

Efisiensi modal marginal menggambarkan bahwa fungsi permintaan untuk barang-barang investasi baru. Dalam mengevaluasi aset-aset baru, investor memperhatikan hasil-hasil prospektif yang akan diperolehnya di masa yang akan datang.

⁴⁰ Alfred W. Stoiner, Douglas C. Hague, *Teori Ekonomi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hal., 150.

2. Tingkat suku bunga

Tinggi rendahnya tingkat suku bunga sangat berpengaruh dalam melakukan investasi.

Dalam melakukan penanaman modal, baik domestik maupun asing, harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penanaman modal adalah :

1. Prosedur penanaman modal
2. Kondisi politik dan keamanan suatu negara/daerah yang dituju
3. Bidang usaha penanaman modal
4. Kualitas dan kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan
5. Hak kepemilikan tanah
6. Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum
7. Fasilitas dan insentif yang diberikan⁴¹

Faktor eksternal yang mempengaruhi penanaman modal adalah :

1. Interdependensi antarnegara
Setiap negara mempunyai perbedaan, baik berupa kekurangan maupun kelebihan, oleh karena itulah terdapat saling membutuhkan satu sama lain dan untuk memenuhinya dilakukan melalui investasi.
2. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi Internasional
3. Persaingan antarnegara berkembang.⁴²

⁴¹ Rosyidah Rakhmawati, *Op.Cit.*, hal., 48.

⁴² *Ibid.*, hal., 49.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 terhadap Iklim Investasi di Jawa Tengah

Kesepakatan perdagangan bebas di lingkungan negara-negara ASEAN (*Asean Free Trade Area*) pada tahun 2003 mencerminkan bahwa Indonesia, khususnya Jawa Tengah telah masuk dalam perekonomian dunia yang bercirikan “ekonomi tanpa batas teritorial”, dengan karakteristik semakin tekikisnya hambatan ekonomi. Hal ini membawa implikasi arus komoditi perdagangan dan investasi (modal, barang dan jasa) akan bebas masuk ke Indonesia atau dari Indonesia ke negara lain dengan tanpa hambatan tarif dan non tarif atau tanpa kebijakan-kebijakan yang bernuansa proteksionis.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang telah berjalan selama kurun waktu 5 tahun membawa implikasi yang sangat besar terhadap penciptaan iklim investasi di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan keberadaan otonomi daerah menunjang iklim investasi di daerah, khususnya di Jawa Tengah.

Berdasarkan data yang tercatat dalam Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Tengah, perkembangan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMIDN) di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang berarti.

Tabel 3.1. Perkembangan Rencana dan Realisasi Investasi PMA di Provinsi Jawa Tengah Periode 1997-2003

No	Tahun	Rencana (Milyar)	Realisasi (Milyar)
1	1997	2.221,52	432,33
2	1998	3.072,20	213,29
3	1999	127,85	159,66
4	2000	72,07	163,60
5	2001	96,68	66,85
6	2002	91,77	73,44
7	2003	80,02	60,68
		5.762,11	1.169,85

Sumber : BKPMMD Tahun 2003

Tabel 3.2 Perkembangan Rencana dan Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Jawa Tengah Periode 1997-2003

No	Tahun	PMDN	
		Rencana (Milyar)	Realisasi (Milyar)
1	1997	7.406,63	1.960,00
2	1998	2.482,40	941,00
3	1999	1.308,71	300,58
4	2000	2.451,20	666,08
5	2001	2.912,20	756,17
6	2002	1.541,26	777,12
7	2003	3.607,65	1.062,16
		21.710,05	6.463,11

Sumber : BKPMMD Tahun 2003

Berdasarkan data-data tersebut di atas, dapat dilihat secara riil perkembangan realisasi investasi PMA/PMDN di Jawa Tengah sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2003, realisasi investasi yang mampu diwujudkan jauh melebihi angka investasi yang diproyeksikan. Apabila diperhatikan, pada investasi PMA tahun 1997 dan 1998 realisasi investasi sangat jauh dari yang diproyeksikan. Hal ini dapat dimaklumi karena tahun 1997 adalah awal terjadinya krisis moneter. Pada tahun 1999 dan 2000 terjadi kenaikan yang melonjak, bahkan kenaikan lebih dari separohnya. Namun, sejak diberlakukannya secara efektif UU No. 22 dan 25 tahun 1999 terjadi penurunan

realisasi investasi. Sedangkan untuk investasi PMDN, sejak tahun 1997 sampai dengan 2003 realisasi investasi masih sangat jauh dari rencana.

Laporan Perkembangan penanaman Modal Jawa Tengah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003 menyatakan bahwa, posisi penanaman modal di Jawa Tengah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003 (selama kurun waktu 2003), apabila dibandingkan dengan posisi penanaman modal periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2002 (selama kurun waktu 2002) mengalami kenaikan pada jumlah proyek, nilai rencana investasi dan tenaga kerja yang akan terserap. Perbandingan masing-masing kategori pada proyek PMA dan PMDN adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah proyek PMA dan PMDN pada tahun 2003 sebanyak 78 proyek, sedangkan pada tahun 2002 berjumlah 53 proyek, sehingga mengalami kenaikan sebanyak 20 proyek (34,5%);
- b. Nilai investasi pada tahun 2003 sebesar Rp. 4.293.924,89 juta, sedangkan pada tahun 2002 sebesar Rp. 2.409.407,28 juta, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.884.517,61 (78,2%).
- c. Jumlah tenaga kerja Indonesia dan asing yang telah terserap pada tahun 2003 sebanyak 44.896 orang dan pada tahun 2002 sebanyak 17.038 orang, sehingga terdapat kenaikan sebanyak 27.858 orang (163,5%).

Tabel 3.3 Perbandingan Perkembangan Penanaman Modal di Jawa Tengah Periode Tahun 2002 dengan Periode tahun 2003

No	Uraian	Tahun 2002	Tahun 2003	Prosentase
1.	PMDN			
	- Jumlah proyek	14	21	+50,0%
	- Nilai investasi	1.541.259,61	3.607.653,59	+134,0%
	- Tenaga kerja Indonesia	2.906	24.002	+725,9%
	- Tenaga kerja asing	21	105	+400%
	- Rencana ekspor	66,566.50	199,890.00	+200%

2.	PMA			
-	Jumlah proyek	44	57	+29,5%
-	Nilai investasi	868.147,67	686.271,30	-20,9%
-	Tenaga kerja Indonesia	13.897	20.560	+47,9%
-	Tenaga kerja asing	214	229	+7,0%
-	Rencana ekspor	88,041.53	171,662.20	+95,0%
3.	PMDN dan PMA			
-	Jumlah proyek	58	78	+34,5%
-	Nilai investasi	2.409.407,28	4.293.924,89	+78,2%
-	Tenaga kerja Indonesia	16.803	44.562	+165,2%
-	Tenaga kerja asing	235	334	+42,1%
-	Rencana ekspor	154,608.03	371,552.20	+140,3%

Sumber : Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003

Berdasarkan Laporan Perkembangan Kinerja Penanaman Modal di Jawa Tengah Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004, perkembangan persetujuan penanaman modal di Jawa Tengah untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2004 telah mencapai sebanyak Rp. 5.627.661.832,232 meningkat 113,58% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2003 sebesar Rp. 2.634.890.000.000. hal ini dikarenakan adanya peningkatan persetujuan PMA dan PMDN, masing-masing meningkat sebesar 69,64% dan 118,37%. Kegiatan penanaman modal di Jawa Tengah terbagi atas :

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Persetujuan PMDN pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2004 (berlakunya UU No. 22 dan 25 tahun 1999) sebanyak Rp. 5.220.950.000.000. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 118% apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2003 sebesar Rp. 2.390.820.000.000. hal ini disebabkan oleh adanya persetujuan penanaman modal dalam negeri sebanyak 4 (empat)

proyek, antara lain : bidang listrik, gas, air, industri kimia, industri tekstil dan kayu, dan produk kayu, masing-masing berada di Kabupaten/Kota antara lain : Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukoharjo.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Perkembangan persetujuan PMA periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2004 sebanyak US\$ 47,4 juta, meningkat 69,89% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2003 sebesar US\$ 27,95 juta. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan persetujuan pada periode tersebut sebanyak 20 proyek, antara lain:

Jasa konsultasi teknik dan rekayasa, industri barang dari tanah liat untuk rumah tangga, industri furniture dari kayu, industri daur ulang barang-barang non logam jasa perdagangan/industri pakaian jadi dari tekstil dan kulit, yang berada di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah, antara lain : Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Magelang, dan Kota Surakarta.

Penyerapan tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN untuk periode tersebut sebanyak 9.184 orang yang terbagi atas tenaga kerja untuk PMDN sebanyak 8.015 orang (87,2%) dan untuk PMA sebanyak 1.169 orang (12,8%). Dengan adanya penyerapan tenaga kerja ini, tentunya akan mempunyai dampak positif padapenyerapan tenaga kerja dan pengembangan ekonomi di Jawa Tengah.

Rencana ekspor bagi penanaman modal pada periode ini sebanyak US\$ 44,8 juta yang terdiri atas rencana ekspor bagi PMDN US\$ 23,26 juta (52%), sedangkan sisanya US\$ 21,54 juta (48%) akan direncanakan oleh PMA.

Pengusaha atau investor yang menanamkan modal di Jawa Tengah periode Januari sampai dengan Juni 2004 sebanyak 16 negara, terdiri atas : RRC, Australia, Singapura, Austria, Malaysia, Jepang, Virgin Island, masing-masing satu proyek dengan nilai sebanyak US\$ 3,8 juta (8%), Inggris, Italia, USA, Bangladesh dan Jerman, masing-masing dua proyek dengan nilai US\$ 42,49 juta (89,62%), dan Belgia dengan tiga proyek senilai US\$ 4,9 juta (2,8%). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa investor asal Eropa adalah yang terbesar, sebanyak US\$ 42,5 juta diikuti oleh investor asal Asia sebesar US\$ 21,71 juta dan sisanya investor asal Amerika sebanyak US\$ 0,85 juta.

Proyek PMA/PMDN pada periode ini sebanyak 24 buah yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah, di mana sebagian besar berada di Semarang, sebanyak 10 buah (PMA 9 proyek, PMDN 1 proyek), dan untuk Kabupaten Jepara, Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, masing-masing sebanyak 2 proyek, sedangkan untuk Kabupaten Demak, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal masing-masing 1 proyek PMA dan untuk Kabupaten Kudus, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Cilacap, masing-masing 1 proyek untuk PMDN.

Tabel 3.4 Perbandingan Perkembangan Penanaman Modal di Jawa Tengah Periode Januari-Juni 2003 dengan periode Januari-Juni 2004 (Semester I Tahun 2004)

No	Uraian	Januari-Juni 2003	Januari-Juni 2004	Prosentase
1.	PMDN			
	- Jumlah proyek	11	4	-63,64%
	- Nilai investasi	2.390.820.000.000,00	5.220.950.000.000,00	118,87%
	- Rencana tenaga kerja	17.191 orang	8.015 orang	-53,38%
	- Rencana ekspor	US\$ 68,940,000.00	US\$ 23,260,000.00	-66,26%
2.	PMA			
	- Jumlah proyek	21	20	-4,76%
	- Nilai investasi	US\$ 27,950,050.00	US\$ 47,415,738.08	69,64%
	- Rencana tenaga kerja	9.902 orang	1.169 orang	-88,19%
	- Rencana ekspor	US\$ 79,157,200.00	US\$ 21,546,100.00	-72,78%
3.	PMDN + PMA			
	- Jumlah proyek	33	24	-27,27%
	- Nilai investasi	2.634.890.000.000,00	5.627.661.832.232,00	113,58%
	- Rencana tenaga kerja	27.093 orang	9.184 orang	-66,10%
	- Rencana ekspor	US\$ 148,097,200.00	US\$ 44,806,100.00	-69,75%

Sumber : Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004

Berdasarkan data-data di atas, dapat digambarkan bahwasannya iklim investasi di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 terdapat kenaikan laju investasi secara signifikan, baik dari sisi PMDN maupun PMA, bahkan nilai investasi yang dapat diserap oleh Jawa Tengah menjadi yang tertinggi di tingkat nasional. Secara tidak langsung keberadaan UU No. 22 Tahun 1999 membawa pengaruh terhadap investasi, karena undang-undang ini menganut asas desentralisasi, di mana pemerintah daerah secara otonom dapat menerapkan kebijakan investasi dan OSS merupakan produk dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang sudah mulai diberlakukan di beberapa daerah kabupaten/kota. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa nilai investasi PMDN Jawa

Tengah pada tahun 2004 mencapai Rp. 6.01 trilyun, sedangkan untuk PMA mencapai US\$ 3,37 milyar. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, seperti Provinsi Jawa Timur nilai investasi PMDN tercatat Rp. 3,398 triliun, nilai investasi PMDN Jawa Barat sebesar 3,933 triliun dan nilai investasi PMDN DKI Jakarta sebesar 3,481 triliun.

Data BKPM juga menunjukkan bahwa nilai investasi PMA Jawa Timur sebesar US\$ 325 juta, nilai investasi PMA Jawa Barat sebesar US\$ 2,08 miliar, nilai investasi PMA DKI Jakarta sebesar US\$ 1,72 miliar.

Adanya prestasi Jawa Tengah yang menduduki peringkat teratas dalam hal investasi PMDN dan PMA selama kurun waktu 2004, menurut Hendrawan supratikno, Guru Besar Institut Bisnis Indonesia di Jakarta ini didasarkan pada sektor investasi Jawa Tengah yang berbasis kekayaan alam, seperti industri pengolahan kayu, perikanan dan pertambangan. Selain itu, juga investasi di sektor agroindustri juga sangat potensial untuk dikembangkan, seperti industri teh dan makanan kaleng.¹

Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Yeru Salimianto, Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa kemajuan yang dicapai oleh Jawa Tengah dalam hal investasi ini sangat dipengaruhi oleh adanya semangat pemerintah untuk menggalakkan pelayanan satu pintu (*one stop service*) dalam hal perijinannya. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tetap memelihara investor-investor yang sudah

¹ Jawa Tengah Peringkat Teratas Investasi PMDN dan PMA 2004, (Jakarta : Kompas, 4 Februari 2005), hal., A.

lama menanamkan modalnya di Jawa Tengah ini. Bentuk pemeliharaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah menyangkut pemberian jaminan dan kepastian keamanan, yaitu situasi keamanan yang kondusif di wilayah ini dibandingkan dengan di wilayah lainnya dan memberikan perhatian khusus padaperbaikan saran dan infrastruktur di sekitar lokasi industri mereka..

Selanjutnya Yeru Salimianto juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan komunikasi yang bersifat "*gethok tular*", yaitu investor-investor yang sudah lama menanamkan modalnya secara tidak langsung juga akan menginformasikan kondisi dan keadaan Jawa Tengah yang kondusif kepada rekan-rekan di negara asalnya. Hubungan yang sudah terjalin ini akan dimanfaatkan untuk mengundang investor-investor baru lainnya.

Sistem pelayanan satu pintu atau *one stop service* yang telah dilakukan oleh Jawa Tengah, khususnya di beberapa kabupaten dan kota selama ini telah terbukti secara efektif dan efisien meningkatkan laju investasi di kabupaten atau kota yang bersangkutan terlebih lagi bagi provinsi. Oleh karena itu, Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Tengah mendorong Pemerintah Kota dan Kabupaten yang belum menerapkan pelayanan investasi satu pintu agar mencontoh dan menerapkan daerah-daerah lain yang sudah menerapkannya. Terdapat lima kabupaten/kota yang telah menerapkan pola pelayanan satu pintu di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sragen. Penerapan

sistem pelayanan ini agar berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) di daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana di Kabupaten Banjarnegara yang telah menerapkan pola pelayanan satu pintu, telah membentuk Dinas Perijinan dan Penanaman Modal. Kabupaten Wonosobo pun juga membentuk Dinas Pelayanan Terpadu, sedangkan Kabupaten Kudus membentuk Kantor Perijinan dan Investasi, Kabupaten Sragen membentuk Kantor Pelayanan Terpadu dan di Kabupaten Purbalingga membentuk Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal.

Pembentukan kantor dan dinas pelayanan penanaman modal ini diikuti dengan penetapan kepastian layanan, seperti layanan investasi yang mudah, cepat dan tidak birokrasi yang tidak panjang. Selama ini pelayanan investasi memerlukan waktu 120 hari, namun sejak diberlakukannya pelayanan satu pintu ini layanan investasi hanya berkisar 6 sampai dengan 12 hari. Pelayanan yang seperti ini secara otomatis akan merangsang minat para investor untuk menginvestasikan dananya di Jawa Tengah, karena kendala yang paling dikeluhkan oleh para investor adalah adanya prosedur perijinan dengan pelayanan yang panjang.

Secara rinci, dijelaskan oleh Yeru Salimianto, bahwa dengan adanya pelayanan satu pintu yang telah diterapkan di Kabupaten Banjarnegara, terjadi peningkatan investasi 34% selama tahun 2003/2004, dari Rp. 92.855 juta menjadi Rp. 123.537 juta. Dengan demikian, pemasukan untuk PAD tahun 2003/2004 juga mengalami peningkatan dari Rp. 147 juta menjadi Rp. 579,27 juta atau naik 294%.

Di Kabupaten Wonosobo juga terjadi hal yang sama, yaitu mengalami peningkatan investasi sebesar 264% dari nilai investasi Rp. 995.664 juta menjadi Rp. 3.628.501 juta. Pemasukan untuk PAD pada tahun 2003/2004 meningkat sebesar 70% dari Rp. 572,99 juta menjadi Rp. 978 juta.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Kudus, di mana nilai investasi naik sebesar 206%, dari nilai investasi sebelumnya Rp. 140.700 juta menjadi Rp. 430.000 juta. Di Kabupaten Sragen, nilai investasi pada tahun 2003/2004 juga mengalami kenaikan 81%, dari nilai investasi semula Rp. 69.334 juta menjadi Rp. 125.551 juta. Pemasukan untuk PAD pada tahun 2003/2004 di Kabupaten Sragen mengalami kenaikan 152%, dari Rp. 478,76 juta menjadi Rp. 1.231,45 juta.

Di Kabupaten Purbalingga juga terjadi kenaikan laju investasi sebesar 57%, dari nilai investasi semula Rp. 1.974.825 juta menjadi Rp. 3.109.129 juta. Pemasukan PAD diperoleh Kabupaten Purbalingga selama 2003/2004 juga mengalami kenaikan sebesar 124%, dari Rp. 571,83 menjadi Rp. 1.281,19 juta.

Oleh karena itulah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan berbagai fasilitas dalam rangka menerapkan secara lengkap dan komprehensif pola pelayanan investasi satu pintu ini kepada kabupaten atau kota lainnya yang belum melaksanakan pola investasi ini, yaitu dengan memberikan pelatihan dan bantuan *software* mengenai pelayanan investasi dari BPM Jawa Tengah, memanggil ahli komputer untuk memberikan pelatihan di daerah-daerah agar semua daerah di Jawa Tengah bisa *link* ke BPM Jawa Tengah.

♦ Daerah yang sudah menyelenggarakan *One Stop Service* :

1. Kabupaten Banjarnegara
2. Kabupaten Wonosobo
3. Kabupaten Purbalingga
4. Kabupaten Sragen
5. Kabupaten Kudus

♦ Daerah yang sudah mempunyai unit *One Sto Service* :

1. Kabupaten Jepara
2. Kabupaten Blora
3. Kabupaten Karanganyar
4. Kabupaten Sukoharjo
5. Kabupaten Klaten
6. Kota Semarang
7. Kabupaten Kendal
8. Kota Magelang
9. Kabupaten Pekalongan
10. Kabupaten Batang

♦ Daerah yang masih menggunakan pelayanan satu atap :

1. Kabupaten Grobogan
2. Kabupaten Pati
3. Kabupaten Boyolali
4. Kabupaten Magelang
5. Kabupaten Purworejo

6. Kabupaten Banyumas

7. Kabupaten Brebes

♦ Daerah yang sudah membubarkan pelayanan itu atau :

1. Kabupaten Semarang

2. Kabupaten Salatiga

♦ Daerah yang berkeinginan dan potensial mengembangkan *software One*

Stop Service :

1. Kabupaten Rembang

2. Kabupaten Cilacap

3. Kabupaten Kebumen

♦ Daerah yang sedang/dalam rangka membangun *software* :

1. Kabupaten Banyumas

2. Grobogan

♦ Daerah yang telah menerima bantuan program *software* :

1. Kabupaten Sragen

2. Kabupaten Karanganyar

3. Kota Magelang

4. Kabupaten Magelang

5. Kabupaten Wonosobo

6. Kabupaten Purbalingga

7. Kabupaten Banjarnegara

8. Kabupaten Tegal

9. Kabupaten Kudus

10. Kabupaten Jepara

11. Kabupaten Pati

Menurut KPPOD, ukuran dan kriteria dalam menentukan iklim dan minat investasi adalah :²

1. Membaiknya kondisi ekonomi global, dengan angka pertumbuhan yang mencapai 4,5-5%;
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada negara maju;
3. Adanya upaya diversifikasi usaha dan produk sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat luas;
4. Berubahnya pola pengembangan industri dari *local oriented* menjadi *international oriented* melalui multi corporation (MNC), trans national corporations (TNC);
5. Kondisi makro ekonomi yang baik;
6. Adanya keelarsan pada pengelolaan ekonomi makro dan mikro;
7. Adanya kestabilan politik dan jaminan kepastian hukum;
8. Adanya aturan yang jelas mengenai penanaman modal sebagai landasan kegiatan investasi;
9. Pola Pelayanan Satu Atap (*One Stop Service*);
10. Pemberian insentif sebagai perangsang penanaman modal;
11. Sarana dan prasarana penunjang investasi.

Dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Repetada) Tahun 2004, telah dicanangkan program untuk mencapai sasaran pembangunan penanaman modal, yaitu :

1. Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal

Program ini untuk merencanakan dan mengkaji kebutuhan Penanaman Modal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, baik pada perencanaan kebutuhan/target penanaman modal pembangunan pemerintah maupun swasta, menciptakan iklim penanaman modal

² Yeru Salimianto, "*Strategi Kebijakan Investasi di Era Otonomi Daerah*", (Semarang, Seminar Nasional, 2004), hal., 4.

yang kondusif, menyediakan dan memberdayakan kawasan industri, menyediakan sarana prasarana pendukung penanaman modal.

2. Promosi Penanaman Modal

Program ini untuk mempromosikan potensi-potensi penanaman modal yang dimiliki oleh setiap Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, baik untuk tingkat nasional maupun internasional.

3. Pelayanan Perijinan Penanaman Modal

Program ini untuk mendorong terlaksanannya pelayanan terpadu untuk perijinan pola satu pintu dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat serta menyiapkan peraturan-peraturan.

4. Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

Program ini untuk mendorong realisasi penanaman modal di Jawa Tengah, melalui pemantauan realisasi PMA/PMDN serta pemantauan dan fasilitasi permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal.

Strategi kebijakan investasi yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan infrastruktur yang memadai
2. Meningkatkan promosi mengenai potensi dan peluang penanaman modal secara selektif dan terpadu
3. Melakukan fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Lembaga/Instansi negara lain.
4. Memfasilitasi penyusunan peraturan di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota
5. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi melalui pemantauan dan pelaporan serta peningkatan perusahaan yang berwawasan lingkungan.

Matrik Rencana Tindak yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jawa Tengah dan yang akan diusulkan untuk dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam hal perindustrian dan Perdagangan menyatakan bahwa :

Penanaman Modal.

REPETADA 2004							
NO	PROGRAM RENSTRA	PERMASALAHAN	PROGRAM	RENCANA TINDAK	INDIKATOR KEBERHASILAN/ SASARAN	BIDANG KEWENANGAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal	Lemahnya struktur permodalan BKK, rendahnya kontribusi BUMD dalam PAD, dan iklim investasi yang kurang kondusif serta sarana prasarana penunjang Penanaman Modal yang kurang memadai.	Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal	<p>a. Pengembangan BUMD melalui penambahan penyerapan modal Pemda baik terhadap BPR BKK-BKK, Bank BPD Jawa Tengah dan Perusda.</p> <p>b. Forum pengembangan ekonomi dan Sumberdaya Jawa Tengah.</p> <p>c. Pengembangan program dan evaluasi Penanaman Modal di Jawa Tengah.</p> <p>d. Pengembangan program pelayanan Penanaman Modal Kab/Kota melalui one stop service.</p> <p>e. Penyusunan pengembangan Penanaman Modal angkutan container.</p>	<p>a. Meningkatkan peran BUMD dalam kontribusi PAD.</p> <p>b. Tersusunnya formulasi kebijakan pengembangan Dunia Usaha.</p> <p>c. Tersusunnya program secara sinergis serta adanya peningkatan/perbaikan sistem pengembangan penanaman modal.</p> <p>d. Meningkatkan pelayanan Penanaman Modal di Jawa tengah melalui one stop service.</p> <p>e. Tersusunnya informasi potensi angkutan container</p>	Bidang Administrasi Umum Pemerintahan <	

REPETADA 2004							
NO	PROGRAM RENSTRA	PERMASALAHAN	PROGRAM	RENCANA TINDAK	INDIKATOR KEBERHASILAN/ SASARAN	BIDANG KEWENANGAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
				f. Pengembangan kerjasama Penanaman Modal dengan Kab/Kota, Propinsi dan Negara lain:	f. Terjalannya kerjasama Penanaman Modal dengan Kab/Kota, Propinsi, Badan/Lembaga & Negara lain, al : <ul style="list-style-type: none">• Terjalannya kerjasama pengembangan Penanaman Modal antar Propinsi di dlm maupun luar negeri.• Terfasilitasinya kerja- sama pengembangan Penanaman Modal antar Kab/ Kota antar Prop dan Kab/Kota.• Meningkatkan kualitas SDM Bidang Penanaman Modal dan persepsi yang sama dalam pengem bangan Penanaman Modal.• Meningkatkan koordina si dan komunikasi peng embangan Penanaman Modal di dalam dan luar negeri.• Terselenggaranya temu kemitraan bagi dunia usaha.		

REPETADA 2004						
NO	PROGRAM RENSTRA	INDIKATOR KEBERHASILAN/ SASARAN			BIDANG KEWENANGAN	UNIT KERJA
		PERMASALAHAN	PROGRAM	RENCANA TINDAK		
1	2	3	4	5	7	8
2.	Promosi Penanaman Modal	Kurangnya informasi potensi dan peluang Penanaman Modal yang siap untuk dikembangkan.	Promosi Penanaman Modal	l. Persiapan rencana pengembangan Penanaman Modal jalan tol m. Pengembangan program Penanaman Modal melalui media elektronik.	l. Tersusunnya rencana pengembangan Penanaman Modal jalan tol. m. Terinformasikan program pengembangan Penanaman Modal daerah melalui media elektronik a. Adanya hasil dan follow up antar pengusaha dari temu usaha di dalam dan luar negeri. b. Adanya hasil dan follow up antar pengusaha dari pameran Penanaman Modal di dalam dan luar negeri. c. Adanya hasil dan follow up dari pameran Penanaman Modal di luar negeri. d. Tersedianya bahan promosi Penanaman Modal. e. Pengembangan Home Page dan terjalinya jaringan sistem informasi Kab/Kota & Propinsi di Jawa Tengah	Bidang Penanaman Modal Badan Penanaman Modal
				a. Temu usaha di dalam dan luar negeri b. Pameran Penanaman Modal dalam negeri dan luar negeri. c. Pameran Internasional (ITI) d. Peningkatan dan akuratisasi sarana prasarana promosi. e. Peningkatan Home Page/Web Site & penyusunan program sistem informasi (net working) Kab/Kota.		

REPETADA 2004						
NO	PROGRAM RENSTRA	PERMASALAHAN	PROGRAM	INDIKATOR-KEBERHASILAN/		UNIT KERJA
				RENCANA TINDAK	SASARAN	
1	2	3	4	5	6	7
				<p>f. Penyusunan pengembangan potensi sarana prasarana penunjang Penanaman Modal regional</p> <p>g. Penyusunan strategi pengembangan Penanaman Modal di Jawa Tengah.</p> <p>h. Pemberdayaan pengembangan an Penanaman Modal portofolio di Jateng.</p> <p>i. Forum komunikasi dunia usaha dan dokumentasi Penanaman Modal.</p> <p>j. Penyusunan profil Penanaman Modal SDA dan sarana prasarana.</p> <p>k. Menyediakan profil negara calon investor luar negeri</p>	<p>f. Tersusunnya informasi pengembangan potensi sarana prasarana penunjang Penanaman Modal regional</p> <p>g. Tersusunnya strategi pengembangan Penanaman Modal Jawa Tengah tahun 2005 – 2010</p> <p>h. Terciptanya pemahaman masyarakat terhadap Penanaman Modal portofolio (surat berharga) di Jawa Tengah.</p> <p>i. Meningkatnya kualitas komunikasi dunia usaha dan Pengembangan dokumen Penanaman Modal.</p> <p>j. Tersusunnya data potensi SDA dan sarana prasarana penunjang Penanaman Modal.</p> <p>k. Tersedianya informasi karakteristik negara calon investor dari luar negeri</p>	8

REPETADA 2004							
NO	PROGRAM RENSTRA	PERMASALAHAN	PROGRAM	RENCANA TINDAK	INDIKATOR KEBERHASILAN/ SASARAN	BIDANG KEWENANGAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Pelayanan Perijinan Penanaman Modal	Belum optimalnya pelayanan dan masih lemahnya peraturan perundangan Penanaman Modal	Pelayanan Perijinan Penanaman Modal	Fasilitasi peningkatan pelayanan perijinan Penanaman Modal PMA/PMDN.	Meningkatnya pelayanan perijinan Penanaman Modal PMA/PMDN di Jawa Tengah .	Bidang Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal
4.	Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Rendahnya realisasi Penanaman Modal PMA/PMDN kesadaran investor terhadap industri berwawasan lingkungan	Pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal	Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi Penanaman Modal PMA/PMDN.	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya hasil pantauan Penanaman Modal PMA/PMDN• Tersedianya hasil evaluasi Penanaman Modal PMA/PMDN• Terfasilitasinya kegiatan PMA/PMDN	Bidang Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal

Pernyataan dan informasi yang sebaliknya diberikan oleh para pelaku usaha, dalam hal ini para investor dari beberapa perusahaan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. PT. Batam Textile Industry yang berdomisili di Kabupaten Semarang adalah sebuah perusahaan yang berinvestorkan asing (Penanaman Modal Asing), yaitu dari Hongkong, dengan kualitas produksinya 70% untuk ekspor dan 30% untuk lokal. Kegiatan usahanya adalah di bidang pertekstilan, yang terbagi menjadi 4 unit produksi, yaitu pemintalan (kapas menjadi benang), benang menjadi kain, pengolahan bahan menjadi bahan jadi dan garment.

Menurut Suharyo, Personalia PT. Batam Textile,¹ keberadaan otonomi daerah belum dapat dirasakan secara optimal menunjang iklim investasi. Pelaksanaan perijinan, khususnya di Kabupaten Semarang masih sama seperti sebelum berlakunya undang-undang otonomi daerah. akan tetapi dari waktu ke waktu terakhir ini dinilai ada kecenderungan membaik dalam pelaksanaannya. Menurutnya, aturan investasi dalam kerangka otonomi daerah sudah dapat mengcounter permasalahan yang ada, akan tetapi banyak faktor ekstern yang seringkali dapat menghambat perkembangan investasi itu sendiri, seperti : situasi perpolitikan, keamanan, aktivitas demo yang dibacking oleh LSM, dan masih banyak lagi. Pada intinya situasi yang kondusif adalah hal yang penting untuk diciptakan. Dalam hal perijinan, dirasakan relatif lama dan berbelit-belit,

¹ Hasil *Depth Interview* yang telah diolah dengan Bapak Suharyo, Bagian Personalia PT. Batam Textile Industry pada tanggal 15 April 2005.

sehingga ada kesan dipersulit, misalnya : pemerintah daerah yang bersangkutan telah menyediakan lahan untuk didirikan industri, akan tetapi masyarakat setempat tidak menghendaki, atau dengan kata lain belum ada kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat. Seharusnya, lahan yang telah disediakan oleh pemerintah tersebut sudah bebas dari segala perijinan dan kendala-kendala yang mungkin timbul di masyarakat.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Sidharta, Bagian Personalia PT. Sandratex,² yang merupakan perusahaan swasta nasional berdomisili di Kota dan bergerak di bidang tekstile pertenunan, bahwa pemerintah Kota Semarang belum maksimal memberikan perhatiannya kepada eksistensi para investor yang telah menanamkan modalnya di Kota Semarang. Pemerintah cenderung menggiatkan pabrik-pabrik yang berskala besar, sedangkan yang kecil, menengah dan swasta nasional kurang mendapatkan perhatian. Menurut^{nya}, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah hanya dapat dinikmati oleh kaum birokrat itu sendiri, yaitu dengan membeli bahan dari luar/mengimpor dan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme masih sangat besar.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan secara langsung di lapangan, membuktikan bahwasannya secara empiris, kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mampu mengatasi segala permasalahan tentang investasi, terlebih

² Hasil *Depth Interview* yang telah diolah dengan Sidharta, Bagian Personalia PT. Sandratex pada tanggal 25 Mei 2005.

lagi menarik minat investor untuk berinvestasi. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah masih berada dalam tataran teori yang masih perlu diuji kemanfaatannya di lapangan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus secara komprehensif mengatur dan mencounter segala permasalahan investasi, tidak hanya dalam hal perijinan saja. Dengan adanya otonomi daerah, hal-hal yang bersifat kedaerahan yang dapat menghambat investasi adalah : pelaksanaan otonomi daerah yang cenderung menciptakan birokrasi yang lebih panjang, insentif investasi belum banyak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, sarana dan prasarana investasi di daerah masih sangat terbatas, persepsi aparat terhadap investasi masih beragam dan munculnya gangguan-gangguan dari oknum/lembaga yang dapat mempengaruhi aktivitas usaha, seperti masalah buruh, pencemaran serta persoalan lingkungan.

Daya tarik investasi menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) atas survey yang telah dilakukan pada tahun 2002, terdapat 5 (lima) faktor yang berperan dalam menciptakan iklim investasi di daerah, yaitu : faktor kelembagaan (31%), sosial, politik dan budaya (26%), ekonomi daerah (17%), tenaga kerja dan produktivitasnya (17%), serta infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) (13%). Dengan demikian, maka faktor terbesar yang paling mendasari adanya daya tarik investasi di suatu daerah adalah faktor kelembagaan.

Berdasarkan hasil survey KPPOD tersebut, maka langkah urgen yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah adalah dalam hal penciptaan

Value for
man
083

kelembagaan yang baik. Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan yang mengurus masalah penanaman modal di daerah, dalam hal ini adalah BKPM dan instansi-instansi lain yang terkait dengan penanaman modal secara prosedural dan struktural di daerah. Oleh karena itu, di Jawa Tengah saat ini sedang diupayakan untuk mengatur kelembagaan dan prosedur perijinan dengan sistem satu atap (*one stop service*). Ini disebabkan dalam pengurusan prosedur perijinan dengan menggunakan sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, karena perlu terciptanya suatu koordinasi antar instansi dan sistem prosedur yang baik.

Selain masalah kelembagaan, faktor sosial, politik dan budaya, faktor ekonomi daerah, faktor tenaga kerja dan produktivitas serta faktor infrastruktur fisik juga penting. Oleh karena itulah upaya pengembangan dan peningkatan investasi di Jawa Tengah untuk mendorong peningkatan ekspor di pasar internasional perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat sasaran. Secara internal :

1. Promosi potensi investasi dan produk-produk yang memiliki keunggulan komparatif di dalam dan luar negeri;
2. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah di sektor riil;
3. Penyederhanaan perijinan melalui *one stop service* di Jawa Tengah;
4. Peningkatan realisasi investasi dan memfasilitasi penyelesaian masalah;

5. Membangun jaringan/networking dengan institusi di dalam dan luar negeri;
6. Penyiapan dan pengembangan kawasan/wilayah industri di daerah;
7. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk pemulihan kepercayaan;
8. Mendorong adanya kepastian hukum dan keamanan;
9. Pemberdayaan atau pemanfaatan asosiasi PMA sebagai *public relation* di luar negeri

Secara eksternal adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan kerjasama bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat, antara lain :

1. Pada European Community Investment Partners (ECIP) dan Center for Development Small and Medium Enterprise (CD-SMEs)
2. Pada Regional Cooperation, seperti ASEAN-EU dan kerjasama regional lainnya
3. Mempertemukan antar pengusaha/produsen dengan investor/calon pembeli dari luar negeri
4. Mendorong kerjasama intercity Indonesia-Eropa
5. Promosi terpadu Trade, Tourism and Investment (TII) di luar negeri, bekerjasama dengan pihak swasta di Indonesia dan luar negeri, yang sekaligus sebagai sarana pemulihan kepercayaan dunia terhadap Indonesia dan menjadikannya sebagai tujuan investasi yang menarik dan aman.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat dilihat bahwasannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap iklim investasi di Jawa Tengah. Implikasi yang diberikan adalah dalam bentuk keleluasaan dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi yang dapat menunjang investasi. Keberadaan investasi sangat mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 daerah sebagai pemegang kewenangan daerah dapat meregulasikan dan merumuskan suatu kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah adalah penerapan *one stop service* (OSS) di setiap kota/kabupaten di Jawa Tengah, yang sudah diawali dengan diterapkannya OSS pada Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purbalinga, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Kudus.

Selain kebijakan penerapan OSS, Provinsi Jawa Tengah juga meregulasikan beberapa peraturan daerah yang dapat menunjang iklim investasi di Jawa Tengah, yaitu :

1. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
2. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah
5. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah
6. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
7. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
8. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
9. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
10. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
11. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah
12. Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Hasil Hutan
13. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan
14. Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
15. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan

B. Implikasi Undang-Undang No.25 Tahun 1999 terhadap Iklim Investasi di Jawa Tengah

Selama tahun 1995 sampai dengan tahun 2000, tepatnya adalah lima tahun sebelum diberlakukannya paket undang-undang otonomi daerah, yaitu UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah setiap tahunnya sudah mengalami kenaikan secara signifikan, dengan data sebagai berikut :

Tabel Perkembangan PAD dan Kontribusi terhadap APBD Provinsi Jawa Tengah Selama Lima Tahun Anggaran

No	Tahun Anggaran	APBD	PAD	%
1	1995/1996	1.309.698.743.000	280.650.031.741	21,43
2	1996/1997	1.556.140.971.000	328.926.704.412	21,14
3	1997/1998	1.483.188.782.000	361.612.532.589	24,38
4	1998/1999	591.874.873.000	288.962.803.531	48,82
5	1999/2000	941.718.526.000	316.334.286.332	33,59
Jumlah		5.882.621.895.000	1.576.552.357.605	26.79

Sumber : Perhitungan Anggaran Dipenda

Berdasarkan perhitungan tabel di atas, diketahui bahwasannya tiap tahunnya terjadi peningkatan PAD dan realisasi penerimaan PAD mengalami kenaikan rata-rata 26,79%. Kenaikan yang sangat tajam adalah pada tahun 1995/1996 dan 1996/1997. selanjutnya terjadi penurunan yang sangat tajam pada tahun 1998/1999. Menurut data dari Dinas Pendapatan Daerah, penurunan tersebut disebabkan oleh diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 yang menghapus sebanyak 17 jenis

penerimaan senilai kurang lebih 35 Milyard. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, jenis pungutan retribusi daerah di Jawa Tengah yang semula berjumlah 24 jenis berubah menjadi hanya 7 jenis. Ini mengakibatkan penurunan PAD dari sektor retribusi. Selain itu juga adanya akibat dan imbas dari adanya krisis moneter, sehingga mengalami penurunan kurang lebih 40% atau 120 Milyard.

Sedangkan berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2003, bahwa :

I. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1. Target APBD	Rp. 2.278.959.173.000,-	100%
2. Target Tahapan (12 bulan)	Rp. 2.278.959.173.000,-	100%
3. Realisasi (12 bulan)	Rp. 2.460.343.882.860,-	107,96%
4. Perhitungan :		
a. Selisih dari target APBD :		
(3 – 1) lebih	Rp. 181.384.709.860,-	7,96%
b. Selisih dari target tahapan		
(3 – 2) lebih	Rp. 181.384.709.860,-	7,96%

II. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil

1. Target PAD	Rp. 1.497322.423.000,-	100%
2. Target Tahapan (12 bulan)	Rp. 1.497322.423.000,-	100%

3. Realisasi (12 bulan) Rp. 1.678.703.535.860,-

112,11%

4. Perhitungan :

a. Selisih dari target PAD

(3-1) lebih Rp. 181.381.112.860,- 12,11%

b. Selisih dari target tahapan

(3-2) lebih Rp. 181.381.112.860,- 12,11%

DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

REKAPITULASI
REALISASI PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2003
BULAN: DESEMBER 2003

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	P E N E R I M A A N			SELISIH LEBIH / KURANG	%
			S/D BLN LALU	BLN LAPORAN	S/D BLN LAPORAN		
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4+5)	8.(6-3)	7.(6-3)
1 C: 0500 1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.070.000.000.000,00	1.130.437.830.188,00	131.051.823.707,00	1.261.489.653.895,00	191.489.653.895,00	9.(8.3)
1 1 1 1	PAJAK DAERAH	133.153.208.000,00	109.236.378.425,00	13.772.759.849,00	123.055.626.524,00	(10.097.581.476,00)	17,90
1 1 1 2	RETRIBUSI DAERAH	9.971.133.000,00	5.519.363.905,00	4.202.000.000,00	9.721.363.905,00	(249.774.095,00)	(7,58)
1 1 1 3	HASIL PERUSAHA MILIK DAERAH	117.368.077.000,00	71.117.010.770,00	9.598.733.446,00	80.660.255.966,00	(36.698.821.034,00)	(2,50)
1 1 1 4	LAIN-LAIN PADAYANG SAH	1.330.492.423.000,00	1.316.310.583.288,00	158.625.317.002,00	1.474.935.900.290,00	144.443.477.290,00	(31,27)
	JUNILAH PAD.						
1 2 1 0 1	DANA PERIMBANGAN	161.500.000.000,00	153.595.862.005,00	45.363.873.246,00	198.959.735.251,00	37.459.735.251,00	10,86
1 2 1 0 2	BAGI HASIL PAJAK	5.330.000.000,00	4.334.787.417,00	473.112.902,00	4.807.900.319,00	(522.099.681,00)	23,19
	BAGI HASIL BUKAN PAJAK	166.830.000.000,00	157.930.649.422,00	45.836.986.148,00	203.767.635.570,00	36.937.635.570,00	(9,80)
	JUNILAH BAGI HASIL						
1 2 2	JUNILAH PAD + BAGI HASIL	1.497.322.423.000,00	1.417.424.123.270,00	204.462.303.150,00	1.678.763.535.860,00	181.381.112.860,00	22,14
1 C: 0300 2 2 0 1	DANA ALOKASI UNIFORM	509.870.000.000,00	509.870.002.000,00	0,00	509.870.002.000,00	2.000,00	12,11
	DANA ALOKASI KHUSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUNILAH DANA PERIMBANGAN	676.700.000.000,00	667.900.651.422,00	45.836.986.148,00	713.637.637.570,00	36.937.637.570,00	5,46
1 3	LAIN - LAIN PENDAPATAN	271.766.750.000,00	271.770.345.000,00	0,00	271.770.345.000,00	3.595.000,00	0,00
1 3 1 0 1	DANA PENYEIMBANG DARI PEMERINTAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 0 2	DANA DARURAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUNILAH SELURUHNYA	2.278.959.173.000,00	2.255.881.579.710,00	204.462.303.150,00	2.460.343.882.860,00	181.384.709.860,00	7,96

rekasda-3 2003/renbang

Sumber Data : Kasda Jawa Tengah

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2003									
BULAN : DESEMBER 2003									
KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN		TARGET 3	P E N E R I M A A N					
	1	2		S/D BULAN LALU 4	BULAN LAPORAN 5	S/D BULAN LAPORAN 6			
1 01 0500 1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1.330.452.423.000,00	1.316.310.583.238,00	158.625.317.002,00	1.474.935.900.290,00			
1 01 0500 1 1 01	PAJAK DAERAH		1.070.000.000.000,00	1.130.437.830.188,00	131.051.823.707,00	1.251.489.653.895,00			
1 01 0500 1 1 01 01	Pajak Kendaraan Bermotor		390.000.000.000,00	421.822.666.980,00	47.796.546.510,00	469.619.213.490,00			
1 01 0500 1 1 01 02	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)		125.725.328.210,00	136.700.490.080,00	14.745.091.275,00	151.445.581.355,00			
1 01 0500 1 1 01 03	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)		2.171.859.700,00	3.174.630.500,00	457.053.500,00	3.631.654.000,00			
1 01 0500 1 1 01 04	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak umum)		1.335.304.800,00	1.291.315.300,00	138.257.300,00	1.429.572.600,00			
1 01 0500 1 1 01 05	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)		4.758.730.400,00	7.021.081.435,00	730.843.225,00	7.751.924.660,00			
1 01 0500 1 1 01 06	C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)		83.178.097.800,00	90.439.010.320,00	9.188.866.550,00	99.627.866.870,00			
1 01 0500 1 1 01 07	C-2 Truck, Pick Up (Umum)		2.014.143.950,00	2.676.848.625,00	217.069.275,00	2.893.917.900,00			
1 01 0500 1 1 01 08	D kendaraan Khusus		288.169.200,00	989.452.875,00	135.555.275,00	1.125.108.150,00			
1 01 0500 1 1 01 09	E Sepeda Motor, Roda Tiga		159.518.316.500,00	179.529.867.845,00	22.183.650.110,00	201.713.557.955,00			
1 01 0500 1 1 02	Pertubuhan		9.440,00	0,00	0,00	0,00			
1 01 0500 1 1 03	Pajak Kendaraan diatas Air		0,00	0,00	0,00	0,00			
1 01 0500 1 1 03 01	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		465.000.000.000,00	501.217.599.215,00	60.242.633.035,00	561.460.282.250,00			
1 01 0500 1 1 03 02	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)		100.915.326.000,00	135.975.049.700,00	6.591.348.550,00	142.566.398.250,00			
1 01 0500 1 1 03 03	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)		3.338.753.690,00	6.742.872.275,00	1.034.823.750,00	9.777.695.975,00			
1 01 0500 1 1 03 04	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak umum)		537.024.000,00	884.829.050,00	33.901.500,00	924.730.550,00			
1 01 0500 1 1 03 05	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)		11.547.800.000,00	11.583.763.215,00	938.431.875,00	12.522.295.090,00			
1 01 0500 1 1 03 06	C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)		69.111.888.000,00	74.582.025.225,00	6.387.156.175,00	81.069.211.400,00			
1 01 0500 1 1 03 07	C-2 Truck, Pick Up (Umum)		1.428.877.000,00	1.697.345.200,00	142.455.500,00	1.839.801.700,00			
1 01 0500 1 1 03 08	D kendaraan Khusus		314.811.750,00	702.372.875,00	58.259.175,00	760.632.050,00			
1 01 0500 1 1 03 09	E Sepeda Motor, Roda Tiga		277.405.500.000,00	292.949.275.725,00	42.650.276.510,00	335.599.552.235,00			
1 01 0500 1 1 04	Pertubuhan		17.650,00	0,00	0,00	0,00			
1 01 0500 1 1 05	Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air		0,00	0,00	0,00	0,00			
1 01 0500 1 1 05 01	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		202.000.000.000,00	197.792.372.250,00	19.943.259.354,00	217.735.631.604,00			
1 01 0500 1 1 05 02	Bensin / Premium		115.146.597.000,00	127.886.496.733,00	11.387.264.353,00	139.253.850.737,00			
1 01 0500 1 1 05 03	Solar		85.001.911.500,00	68.189.194.395,00	8.134.050.401,00	96.019.596.360,00			
1 01 0500 1 1 05 04	Premi/Pertamax		1.651.000.000,00	1.716.681.121,00	421.944.600,00	2.033.348.440,00			
1 01 0500 1 1 06	Pertubuhan		91.500,00	0,00	0,00	0,00			
1 01 0500 1 1 07	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT		8.000.000.000,00	6.754.952.618,00	1.403.792.830,00	8.158.745.448,00			
1 01 0500 1 1 08	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AP		5.000.000.000,00	2.850.239.125,00	1.665.541.978,00	6.415.991.103,00			

2

2

1	2	3	4	5	6 (5+4)	7 (6+3)	8 (6-3)	9 (8+3)
	RETRIBUSI DAERAH:							
1 12	Retribusi Pelayanan Kesehatan	133.153.208.300,00	109.236.378.425,00	13.819.248.099,00	123.055.626.524,00	92,42	(10.097.581.476,00)	(7,58)
1 12	Administrasi / Karcis	82.910.505.000,00	58.474.376.895,00	8.282.186.338,00	76.756.563.233,00	92,58	(6.153.941.767,00)	(7,42)
1 12	Tindakan / Operasi	1.095.289.000,00	942.677.700,00	127.312.500,00	1.069.990.200,00	97,59	(25.298.800,00)	(2,31)
1 12	Rawat Jalan	13.672.650.000,00	11.465.192.795,00	1.108.811.269,00	12.554.004.065,00	91,56	(1.098.645.935,00)	(8,04)
1 12	Rawat Inap Umum	4.191.170.000,00	2.702.992.400,00	732.921.828,00	3.435.914.228,00	81,98	(755.255.772,00)	(18,02)
1 12	Rawat Inap Kusta	10.158.000.000,00	6.839.325.693,00	842.664.802,00	7.681.990.561,00	75,63	(2.475.009.499,00)	(24,37)
1 12	Obat-obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 12	PHB / Askes	33.916.630.000,00	27.737.932.124,00	2.789.639.493,00	30.527.571.677,00	90,01	(3.385.058.323,00)	(9,99)
1 12	Laboratorium	5.515.324.000,00	6.728.289.410,00	1.209.549.969,00	7.937.819.379,00	143,92	2.422.495.379,00	43,92
1 12	Radiologi	6.455.456.000,00	5.423.164.305,00	690.216.611,00	6.113.400.917,00	94,70	(342.055.083,00)	(5,30)
1 12	Ambulance	3.618.040.000,00	2.898.384.601,00	292.880.992,00	3.191.265.593,00	88,29	(425.774.407,00)	(11,80)
1 12	DSP	132.125.000,00	86.559.850,00	8.970.000,00	95.539.850,00	72,31	(36.585.150,00)	(27,69)
1 12	Diklat	21.000.000,00	13.541.069,00	5.546.000,00	19.087.000,00	90,99	(1.913.000,00)	(9,11)
1 12	Jasa Konsultasi Medis	745.150.000,00	407.405.875,00	145.063.750,00	552.469.625,00	74,14	(182.680.375,00)	(25,86)
1 12	EKG, Nebuliser, Purcic, Spirometri	2.157.380.000,00	1.534.023.910,00	178.569.600,00	1.712.993.510,00	79,49	(444.386.490,00)	(20,50)
1 12	Rawat Jalan Kusta	49.615.000,00	16.315.000,00	3.662.000,00	19.997.000,00	40,30	(29.618.000,00)	(59,70)
1 12	UGD	0,00	15.360,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1 12	Rawat Inap Jiwa	35.000.000,00	22.654.500,00	2.606.500,00	24.661.000,00	70,46	(10.339.000,00)	(29,54)
1 12	Psikologi / Keterangan Kesehatan Jiwa	288.336.000,00	886.545.140,00	26.394.500,00	912.939.640,00	340,22	624.605.140,00	240,22
1 12	MMPI	35.050.000,00	44.155.500,00	14.359.500,00	58.515.000,00	166,55	23.456.000,00	68,55
1 12	Rehabilitasi Psikososial dan hasil ketrampilan	7.400.000,00	12.750.000,00	11.100.000,00	23.800.000,00	321,52	16.400.000,00	221,52
1 12	Pemeriksaan Gigi	4.500.000,00	2.225.250,00	110.000,00	2.335.250,00	51,52	(2.165.750,00)	(48,08)
1 12	Seleksi	44.500.000,00	20.720.850,00	1.697.250,00	22.418.100,00	50,38	(22.081.900,00)	(49,62)
1 12	Perawatan Jantung	25.000.000,00	14.699.000,00	2.250.000,00	16.949.000,00	67,80	(8.051.000,00)	(32,20)
1 12	GT / RL	16.710.000,00	1.599.875,00	132.000,00	1.531.675,00	9,17	(15.178.325,00)	(90,83)
1 12	PDP SS-BK	30.000.000,00	14.745.000,00	1.201.500,00	16.029.500,00	55,43	(13.970.500,00)	(46,57)
1 12	Sanitasi dan Laundry	472.349.000,00	416.113.575,00	0,00	416.113.575,00	87,90	(56.235.425,00)	(11,99)
1 12	Pelatihan kerja	23.280.000,00	15.445.925,00	1.710.768,00	17.217.693,00	73,96	(6.062.307,00)	(26,04)
1 12	EEG	5.300.000,00	3.760.000,00	535.000,00	4.315.000,00	81,42	(985.000,00)	(18,58)
1 12	ECT	48.500.000,00	8.778.000,00	3.425.000,00	12.203.000,00	25,16	(36.297.000,00)	(74,84)
1 12	ECT Monitor	44.500.000,00	56.250.000,00	10.950.000,00	67.210.000,00	151,03	22.710.000,00	51,03
1 12		190.000.000,00	53.690.000,00	6.650.000,00	50.350.000,00	60,35	(39.650.000,00)	(39,65)

1	2	3	4	5	6 (5+4)	7 (6+3)	8 (6+3)	9 (8+3)
110	120122	Pemeriksaan Spesialistik						
110	120123	Fisioterapi / Dietetm / Pemeriksaan Penunjang Medik						
110	120124	Observasi	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	120125	Gigi	0,00	11.500,00	455.500,00	65,07	(254.500,00)	(33,9)
110	120126	Surat Keterangan.	33.832.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	120127	Brainmapping	70.500.000,00	2.854.000,00	36.693.750,00	0,00	36.693.750,00	0,00
101	1202	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	59.800.000,00	130.700.000,00	792,12	114.200.000,00	692,11
101	120201	Sewa Tanah dan Bangunan	8.402.969.289,00	1.164.380.340,00	9.567.349.609,00	90,80	(968.807.391,00)	(9,21)
101	120202	Sewa alat-alat berat	836.222.424,00	132.135.824,00	968.024.253,00	93,88	(63.162.732,00)	(6,12)
101	120203	Sewa work shop	735.403.500,00	82.742.500,00	818.146.000,00	84,89	(145.604.000,00)	(15,11)
101	120204	Sewa Rumah dinas	312.671.250,00	30.675.000,00	343.346.850,00	56,62	(12.013.150,00)	(3,32)
101	120205	Sewa Lapangan Tennis	247.563.000,00	31.753.000,00	279.336.000,00	107,83	20.274.020,00	7,83
101	120206	Sewa Ruangan / Aula / Asrama / Gedung	9.153.900,00	1.035.000,00	10.190.000,00	69,32	(4.510.000,00)	(30,68)
110	120207	Sewa Toko	992.924.545,00	158.195.500,00	1.151.121.045,00	87,98	(157.286.555,00)	(12,02)
101	120207	Sewa Kantin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	120208	Sewa Unit Laboratorium & Pemeriksaan Lapangan	38.495.362,00	8.184.760,00	46.675.122,00	120,82	8.044.122,00	20,52
101	120209	Sewa Lahan	851.577.234,00	134.650.915,00	986.465.559,00	95,71	(33.856.491,00)	(3,25)
101	120209	PT. Senerang Mineral Pembangunan (SWP)	57.321.735,00	27.799.630,00	85.121.350,00	125,29	17.720.350,00	25,29
101	120210	Sewa Wisma DPRD	31.361.000,00	40.453.597,00	71.833.557,00	89,79	(8.165.403,00)	(10,21)
101	120213	Sewa Tempal Olah Raga	75.000.000,00	6.900.000,00	81.900.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
101	120214	Kwarda Pramuka	1.500.000,00	145.000,00	1.645.000,00	47,03	(1.854.100,00)	(52,97)
101	120215	Penerimaan PDE	200.000,00	450.000,00	1.250.000,00	100,00	0,00	0,00
101	120216	Sewa Tanah Pengeringan Kayu	750.000.000,00	53.384.928,00	1.250.000,00	54,50	(3.40.613.254,00)	(45,42)
101	120217	Akomodasi Peserta Diklat	3.600.000,00	436.500,00	409.385.748,00	12,13	(3.163.500,00)	(97,68)
101	120217	Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	282.650.000,00	39.710.000,00	335.690.000,00	127,81	73.040.000,00	27,81
101	120217	Ternak Perguliran	4.800.000,00	501.600,00	4.914.100,00	102,38	114.100,00	2,38
101	120217	Jasa Perawatan Bergulir	307.930.000,00	88.206.620,00	159.645.357,00	55,09	(138.283.513,00)	(44,91)
101	120217	Penerimaan Dana Bergulir	22.900.000,00	269.000,00	22.000.000,00	100,00	0,00	0,00
101	120217	Pelatihan Dokter Hiperkes	74.700.000,00	0,00	77.850.000,00	104,22	3.150.000,00	4,22
101	120217		30.000.000,00	0,00	27.000.000,00	90,00	(3.000.000,00)	(10,00)

1	2	3	4	5	6 (5+4)	7 (6+3)	8 (6+3)	9 (8+3)
1 15 0100 12 02 17	Penerimaan Akper Wonorebo	265.500.000,00	222.582.000,00	54.900.000,00	277.488.000,00	104,52	11.982.000,00	4,52
1 15 1202 17	Perkir	33.300.000,00	27.350.000,00	2.750.000,00	30.100.000,00	90,39	(3.200.000,00)	(9,61)
1 15 0500 12 02 17	Penjualan Barang Rehab	3.300.000,00	2.535.500,00	210.000,00	2.745.500,00	83,20	(554.500,00)	(16,80)
1 15 0100 12 02 17	Karcis Tanda Masuk Mosium	44.000.000,00	17.955.000,00	1.213.000,00	19.168.000,00	43,57	(24.831.000,00)	(56,43)
1 15 0200 12 02 17	Hasil Karya Panti	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00	0,00	0,00
1 15 0200 12 02 17	Pembagian Pengelolan DUJS	275.000.000,00	178.800.000,00	0,00	178.800.000,00	65,02	(96.200.000,00)	(34,98)
1 15 2400 12 02 18	Pendaftaran Anggola Perpustakaan	9.700.000,00	7.892.000,00	400.000,00	8.292.000,00	85,55	(1.402.000,00)	(14,45)
1 15 0101 12 02 18	Penerimaan Balai Metrologi	1.410.000.000,00	1.269.227.670,00	138.923.930,00	1.408.151.600,00	99,91	(1.242.400,00)	(0,09)
1 15 0107 12 02 18	Balai Pengujian dan Sertifikasi mutu barang	30.000.000,00	26.719.052,00	326.535,00	27.045.588,00	90,15	(2.954.412,00)	(9,85)
1 15 0100 12 02 18	Siaya Latihan Sekrelaris	19.200.000,00	18.037.500,00	1.162.500,00	19.200.000,00	100,00	0,00	0,00
1 15 0300 12 02 18	Lain - Lain	85.504.000,00	139.478.150,00	0,00	139.478.150,00	162,37	53.974.150,00	62,37
1 15 2200 12 02 18	Ijin Amatir Radio	54.000.000,00	88.865.000,00	4.185.000,00	93.050.000,00	172,37	39.050.000,00	72,37
1 15 2400 12 02 19	Sebas Pinjam Perpustakaan	600.000,00	927.000,00	0,00	927.000,00	154,50	327.000,00	54,50
1 15 0000 12 02 19	Sewa Buku	993.270.000,00	897.338.450,00	28.578.000,00	925.916.450,00	93,22	(67.353.550,00)	(6,78)
1 15 2200 12 02 19	Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk	2.100.000,00	1.977.000,00	300.000,00	2.277.000,00	108,43	177.000,00	8,43
1 15 1202 20	Siaya Komputer	72.600.000,00	42.535.500,00	2.552.600,00	45.092.500,00	62,11	(27.507.500,00)	(37,89)
1 15 1200 12 02 20	Ijin Frekwensi Radio siaran Lokal	23.415.000,00	29.220.000,00	0,00	29.220.000,00	124,79	5.805.000,00	24,79
1 15 0000 12 02 21	Siaya Pelatihan Bahasa Jecang	24.500.000,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	93,88	(1.500.000,00)	(6,12)
1 15 1200 12 02 21	Ijin Frekwensi Radio Komersial Lokal	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	42.850.000,00	100,00	0,00	0,00
1 15 1202 22	Siaya Pelatihan dengan Peta III	75.500.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	26,49	(55.500.000,00)	(73,51)
1 15 2200 12 02 23	Siaya Latihan Bahasa Inggris	153.664.000,00	132.192.000,00	10.328.000,00	142.520.000,00	87,03	(21.144.000,00)	(12,97)
1 15 1202 24	Iuran Wajib Lath ILK	3.150.000,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	80,95	(500.000,00)	(19,05)
1 15 2200 12 02 25	Siaya Pemeriksaan/pengujian faktor kimia lingkungan kerja	6.000.000,00	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	19,85	(4.849.000,00)	(80,15)
1 15 2200 12 02 25	Siaya Pemeriksaan/pengujian faktor fisika lingkungan kerja	150.600.000,00	159.415.927,00	33.144.400,00	192.560.327,00	127,66	41.959.327,00	27,66
1 15 2200 12 02 27	Siaya Pemeriksaan Kesehatan Kerja	47.000.000,00	25.520.000,00	4.537.000,00	30.357.000,00	64,59	(16.643.000,00)	(35,41)
04 0100 12 03 01	Retribusi Pencetakan Peta Topografi	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)
01 0500 12 05 02	Retribusi Tempat Petelangan Hasil Hutan	189.200,00	215.200,00	5.000,00	220.200,00	122,22	40.000,00	22,22
03 0100 12 05 01	Tempat Petelangan Ikan	3.500.000.000,00	3.311.920.600,00	220.371.675,00	3.532.292.275,00	100,92	22.292.275,00	0,92
1 15 2200 12 05 01	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa	10.000.000.000,00	5.958.340.085,00	1.089.221.446,00	7.027.561.531,00	70,23	(2.972.438.469,00)	(29,77)
1 15 2200 12 05 01	Asrama Haji Donohuden	1.015.400.000,00	779.332.545,00	65.150.000,00	844.482.545,00	83,17	(170.917.455,00)	(16,83)
1 15 2200 12 05 03	Wisma Penda Tri Lomba Juang	530.000.000,00	446.662.545,00	14.550.000,00	461.212.545,00	78,17	(128.787.455,00)	(21,83)
03 0100 12 06 06	Tempat Penginapan Disnakertrans	35.000.000,00	24.735.000,00	3.255.000,00	27.990.000,00	79,97	(7.010.000,00)	(20,03)
03 0100 12 06 06		5.400.000,00	4.770.000,00	630.000,00	5.400.000,00	100,00	0,00	0,00

5

1	2	3	4	5	6 (5+4)	7 (6-3)	8 (6-3)	9 (8-3)
1 17 0100 12 06 09	Hotel Karimunjawa	5.040.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	148,81	2.460.000,00	48,81
1 17 0100 12 06 10	Wisma Punggosan Tawangmangu	36.000.000,00	22.370.000,00	11.225.000,00	33.595.000,00	33,32	(7.405.000,00)	(5,68)
1 17 0100 12 06 11	Wisma Pondok Slamet Baturaden	69.960.000,00	28.710.000,00	14.660.000,00	43.370.000,00	61,99	(26.550.000,00)	(38,01)
1 17 0100 12 06 12	Wisma Garuda Kopeng	14.000.000,00	10.135.000,00	3.920.000,00	14.055.000,00	100,39	55.000,00	0,39
1 01 1900 12 06 06	Sewa Wisma Dharmawangsa, Prapanca dan Samarinda	250.000.000,00	234.450.000,00	15.910.000,00	251.360.000,00	56,68	(8.640.000,00)	(3,32)
1 1 2 08								
1 22 0100 12 03 01	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.453.366.000,00	3.105.722.381,00	1.434.475.200,00	4.540.197.581,00	101,95	86.831.581,00	1,95
1 22 0100 12 03 02	Penerimaan Dinas Pertanian	2.462.836.000,00	1.586.397.150,00	881.275.600,00	2.467.672.750,00	100,20	4.836.750,00	0,20
1 22 0100 12 03 03	Hasil Pertanian BLPP Soropadan	5.500.000,00	1.896.000,00	3.700.000,00	5.596.000,00	101,75	96.000,00	1,75
1 22 0100 12 03 04	Hasil Kajian BPTPH Ungeran	15.000.000,00	8.547.200,00	3.500.000,00	12.147.200,00	80,98	(2.852.800,00)	(19,02)
1 22 0200 12 03 07	Penerimaan Dinas Peternakan (Hasil Penj Prod Tenak)	428.797.000,00	209.745.875,00	221.337.050,00	431.082.925,00	100,53	2.285.925,00	0,53
1 22 0200 12 03 08	Penjualan Hasil Kebun UPTD BPSMP Ungeran	2.000.000,00	2.125.000,00	200.000,00	2.325.000,00	116,25	325.000,00	16,25
1 22 0200 12 03 09	Penjualan Produk UPT IB	585.000.000,00	534.404.000,00	51.720.000,00	585.124.000,00	100,19	1.124.000,00	0,19
1 23 0100 12 03 04	Penerimaan Dinas Perikanan (Bekal Benth)	240.000.000,00	190.182.600,00	46.729.500,00	235.912.100,00	98,71	(3.087.500,00)	(1,29)
1 23 0500 12 03 05	Penerimaan (Hasil Kebun Kelapa Kelat)	35.000.000,00	35.010.050,00	1.450.000,00	36.460.050,00	104,17	1.460.050,00	4,17
1 23 0200 12 03 06	Penjualan Hasil Kebun Dinas	579.233.000,00	537.314.466,00	224.553.050,00	751.877.516,00	112,17	82.644.516,00	12,17
1 15 0100 12 05 01	Retribusi Ijin Trayek	500.000.000,00	255.555.500,00	51.362.600,00	306.918.500,00	61,32	(193.081.500,00)	(38,62)
1 15 0100 12 10 01	Retribusi Kelembahan Muatan	20.000.000.000,00	18.661.829.500,00	1.502.145.500,00	20.163.975.000,00	100,82	163.975.000,00	0,82
1 05 0100 12 11 01	Retribusi Ijin Pemanfaatan Kayu Lintas Kabi/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05 0100 12 12 01	Retribusi Ijin Pengendalian dan Pemanf Flora/Fauna	2.500.000,00	6.066.250,00	300.000,00	6.366.250,00	254,65	3.866.250,00	154,65
1 04 0100 12 13 01	Retribusi Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan ABT	180.000.000,00	260.250.000,00	24.500.000,00	235.750.000,00	158,19	104.750.000,00	58,19
1 14 0200 12 14 01	Retribusi Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan AP	55.100.000,00	19.800.000,00	5.150.000,00	24.950.000,00	45,28	(30.150.000,00)	(54,72)
1 13	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	9.971.136.000,00	5.519.363.905,00	4.202.000.000,00	9.721.363.905,00	97,50	(249.774.095,00)	(2,50)
1 13 01	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah							
1 01 0300 13 01 01	Unit Perkebunan Tigo	532.000.000,00	455.000.000,00	137.000.000,00	592.000.000,00	63,52	(340.000.000,00)	(36,48)
1 01 0200 13 01 02	Unit Hotel Kesambi Haju	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00
1 01 0300 13 01 03	Unit PTT Tawangmangu	60.000.000,00	33.000.000,00	7.000.000,00	46.000.000,00	66,67	(20.000.000,00)	(33,33)
1 01 0300 13 01 04	Unit Pabrik Keramik Mayong	42.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.500.000,00	47,68	(22.500.000,00)	(52,32)
1 01 0300 13 01 05	Unit PPK Wiroso Grobogan	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	75,00	(5.000.000,00)	(25,00)
1 01 0300 13 01 06	Unit Pabrik Logam Batur Ceper	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)
1 01 0300 13 01 07	Unit PBF Margo Husodo Semarang	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.000.000,00)	(100,00)
1 01 0300 13 01 08	Unit PBF Margo Husodo Solo	100.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00
1 01 0300 13 01 09	Unit Apolik Margo Husodo I Semarang	40.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	75,00	(10.000.000,00)	(25,00)
1 01 0300 13 01 10	Unit Apolik Margo Husodo II Semarang	7.500.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	80,00	(1.500.000,00)	(20,00)
		20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	25,00	(15.000.000,00)	(75,00)

S

1	2	3	4	5	6 (5+4)	7 (6+3)	8 (6-3)	9 (8-3)
1300130101	Unit Apotik Margo Husodo Solo	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
1300130102	Unit Apotik Margo Husodo Kartosuro	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
1300130103	Unit Patik Es Saripelojo Semarang	100.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30,00	(70.000.000,00)	(70,00)
1300130104	Unit Patik Es Saripelojo Solo	100.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00
1300130105	Unit Patik Es Saripelojo Cilacap	75.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	20,00	(60.000.000,00)	(80,00)
1300130106	Unit Patik Es Saripelojo Tegal	100.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	75.000.000,00	75,00	(25.000.000,00)	(25,00)
1300130107	Unit Patik Es Saripelojo Lasem Rembang	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	10,00	(22.500.000,00)	(90,00)
1300130108	Unit Persewaan Arum Tegal	10.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	35,00	(6.500.000,00)	(65,00)
1300130300	Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank SPR - Bank	8.130.270.000,00	4.220.270.000,00	4.000.000.000,00	8.220.270.000,00	101,11	90.000.000,00	1,11
1300130400	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal / Investasi PDAB Sekel Tegal	8.130.270.000,00	4.220.270.000,00	4.000.000.000,00	8.220.270.000,00	101,11	90.000.000,00	1,11
1300130401	PT. Kawasari Industri Wijaya Kusuma	908.888.000,00	844.093.905,00	65.000.000,00	909.093.905,00	100,02	225.905,00	0,02
1300130402	PT. Asuransi Bangun Askrinda	200.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00
1300130403	PT. GCP Sekel Diri	6.000.000,00	6.225.747,00	0,00	6.225.747,00	103,76	225.747,00	3,76
1300130404	PT. PRP	652.838.000,00	552.866.158,00	0,00	652.866.158,00	100,00	155,00	0,00
1300130405	PT. PRP	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
1300130406	PT. PRP	25.000.000,00	15.000.500,00	10.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
1300130407	PT. PRP	117.368.077.000,00	71.117.010.770,00	9.552.245.195,00	80.669.255.965,00	68,73	(36.698.821.034,00)	(31,27)
1300130408	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2.381.259.000,00	522.843.819,00	2.710.215.958,00	3.233.059.777,00	135,77	851.800.777,00	35,77
1300130409	Penjualan Hak Atas Tanah	1.424.244.600,00	59.512.000,00	1.422.000,00	85.834.000,00	48,11	(90.410.000,00)	(51,89)
1300130410	Penjualan Tanah Jabatan/Rumah Dinas	107.515.000,00	90.807.819,00	5.979.107,00	97.785.925,00	90,95	(9.728.074,00)	(9,05)
1300130411	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	108.000.000,00	0,00	109.104.883,00	109.104.883,00	101,02	1.104.883,00	1,02
1300130412	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	957.000.000,00	0,00	2.457.249.958,00	2.457.249.958,00	254,11	1.490.249.958,00	154,11
1300130413	Penjualan Bangunan & Inventaris	184.500.000,00	172.165.000,00	0,00	172.165.000,00	93,33	(12.335.000,00)	(6,67)
1300130414	Penjualan Arum Sekas	90.000.000,00	50.151.000,00	20.910.000,00	71.061.000,00	78,96	(18.939.000,00)	(21,04)
1300130415	Penjualan Hasil Perkebunan Pohon	750.000.000,00	140.088.000,00	101.750.000,00	241.838.000,00	32,25	(508.162.000,00)	(67,75)
1300130416	Penerimaan Jasa Giro	63.365.320.000,00	11.501.285.443,00	300.199.859,00	11.801.485.307,00	18,62	(51.563.834.693,00)	(81,38)
1300130417	Jasa Giro Kas Daerah	17.500.000.000,00	11.057.829.526,00	151.242.241,00	11.209.071.767,00	64,05	(6.290.928.233,00)	(35,95)
1300130418	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	442.455.922,00	148.957.618,00	592.413.540,00	0,00	592.413.540,00	0,00
1300130419	Jasa Giro Khusus	45.865.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.865.320.000,00)	(100,00)
1300130420	Penerimaan Bunga Deposito	32.300.000.000,00	30.500.459.299,00	1.985.519.549,00	32.485.978.848,00	101,52	485.978.848,00	1,52
1300130421	Bunga Deposito	20.300.000.000,00	22.148.471.957,00	1.794.575.190,00	23.943.047.157,00	117,95	3.643.047.157,00	17,95
1300130422	Bunga Tabungan	11.700.000.000,00	8.351.987.332,00	190.944.359,00	8.542.931.691,00	0,00	(3.157.068.309,00)	0,00

7

1	2	3	4	5	6 (5+4)	7 (6+3)	8 (6-3)	9 (8+3)
1 405	Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian/Kehilangan Kekayaan Daerah (TP - TGR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 405 01	Kerugian Uang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 405 02	Kerugian Barang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 405	Sumbangan Pihak Ketiga	14.900.000.000,00	13.428.867.308,00	1.465.157.002,00	14.894.004.310,00	99,96	(5.995.690,00)	(0,04)
1 405 01	Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan (Dealer)	8.500.000.000,00	8.620.412.860,00	1.095.627.325,00	9.720.240.175,00	114,36	1.220.240.175,00	14,36
1 405 02	Sumbangan Pihak Ketiga Keyu	6.400.000.000,00	4.808.454.458,00	355.303.677,00	5.173.764.135,00	80,84	(1.226.235.865,00)	(19,16)
1 407	Penerimaan Lain-lain	4.721.498.000,00	15.163.554.896,00	3.091.172.828,00	18.254.727.724,00	386,63	13.533.229.724,00	286,63
1 407 01	Tempat Rekreasi Nusa Kambangan	15.000.000,00	12.303.000,00	3.500.000,00	15.803.000,00	105,35	803.000,00	5,35
1 407 02	Penerimaan Kembali Kredit BKK	293.998.000,00	69.064.522,00	57.453.546,00	126.528.068,00	43,04	(167.469.932,00)	(56,96)
1 407 03	Tenak Tidak Layak Bibit	37.500.000,00	25.090.500,00	20.934.000,00	46.024.500,00	122,73	8.524.500,00	22,73
1 407 04	Penerimaan lainnya	2.000.000.000,00	12.671.752.351,00	2.941.725.282,00	15.613.477.633,00	780,67	13.613.477.633,00	590,67
1 407 05	Penerimaan dari Dana Bergulir / Revolving	2.375.000.000,00	2.375.145.201,00	67.553.000,00	2.442.698.201,00	102,85	67.695.201,00	2,85
1 407 06	Kerja sama dengan BUMIDA	0,00	10.199.322,00	0,00	10.199.322,00	#DIV/0!	10.199.322,00	#DIV/0!
2	DANA PERKIMBANGAN	676.706.000.000,00	667.800.651.422,00	45.836.965.148,00	713.637.637.570,00	105,46	35.937.637.570,00	5,46
2 1	BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	166.630.000.000,00	157.930.649.422,00	45.836.965.148,00	203.767.635.570,00	122,14	35.937.635.570,00	22,14
2 1 01	BAGI HASIL PAJAK	161.500.000.000,00	153.595.862.005,00	45.363.873.246,00	198.959.735.251,00	123,19	37.459.735.251,00	23,19
2 1 01 01	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	73.000.000.000,00	72.662.790.911,00	14.708.432.916,00	87.371.203.827,00	119,69	14.371.203.927,00	19,69
2 1 01 02	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	13.500.000.000,00	14.644.393.094,00	1.510.455.033,00	16.154.842.127,00	119,67	2.654.842.127,00	19,67
2 1 01 03	Pajak Penghasilan Orang Pribadi termasuk PPh. Psl 21	75.000.000.000,00	66.288.678.000,00	29.144.571.297,00	95.433.649.297,00	127,24	20.433.649.297,00	27,24
2 1 02	BAGI HASIL BUKAN PAJAK	5.330.000.000,00	4.334.787.417,00	473.112.902,00	4.807.900.319,00	90,20	(522.099.681,00)	(9,80)
2 1 02 01	Iuran Tetap / Landrent	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
2 1 02 02	Iuran Eksploresi	135.000.000,00	48.586.222,00	0,00	48.586.222,00	35,99	(86.413.778,00)	(64,01)
2 1 02 03	Penerimaan dari sektor Pertambangan Minyak Bumi	175.000.000,00	318.673.299,00	24.245.460,00	342.924.759,00	195,96	157.924.759,00	95,96
2 1 02 04	Pemberian Hak Atas Tanah Pemerintah	1.500.000.000,00	328.632.400,00	0,00	328.632.400,00	21,91	(1.171.367.600,00)	(78,09)
2 1 02 05	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.500.000.000,00	3.638.899.495,00	448.657.442,00	4.087.556.938,00	116,79	587.556.938,00	16,79
	JUMLAH PAD + BAGI HASIL	1.497.322.423.000,00	1.474.241.232.710,00	204.462.303.150,00	1.678.703.535.860,00	112,11	181.381.112.860,00	12,11

1	2	3	4	5	6 (5+4)	7 (6+3)	8 (6+3)	9 (8+3)
1	DANA ALOKASI UMUM							
1 01 0300 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	509.870.000.000,00	509.870.002.000,00	0,00	509.870.002.000,00	100,00	2.000,00	0,00
1	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH							
1 01 0300 3 1 01 01	BANTUAN DANA KONTINJENS PENYEIMBANG PEM.	271.766.750.000,00	271.770.345.000,00	0,00	271.770.345.000,00	100,00	3.595.000,00	0,00
1 01 0300 3 1 01 02	Bantuan Dana Penyeimbang	271.766.750.000,00	271.770.345.000,00	0,00	271.770.345.000,00	100,00	3.595.000,00	0,00
	Bantuan Dana Penyeimbang (ad hoc)	26.836.750.000,00	271.770.345.000,00	0,00	271.770.345.000,00	110,96	26.840.345.000,00	10,96
	JUMLAH SELURUHNYA	2.278.959.173.000,00	2.255.881.579.710,00	0,00	2.460.343.882.860,00	0,00	(26.836.750.000,00)	(100,00)
				204.462.303.150,00	2.460.343.882.860,00	107,96	181.384.709.860,00	7,56

Revisi 2003/Revisi

Berdasarkan data-data yang telah tersaji di atas, maka adanya investasi membawa dampak dan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1), bahwa penerimaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi berasal dari Pendapatan Daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah; Dana Perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam (penerimaan kehutanan, penerimaan pertambangan umum, penerimaan perikanan, penerimaan pertambangan minyak, gas bumi dan panas bumi. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pajak Daerah :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Pajak Kendaraan di Atas Air
- c. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- e. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT
- f. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AP

2. Retribusi Daerah

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan (ASKES)
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - d. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
 - e. Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan
 - f. Retribusi Ijin Trayek
 - g. Retribusi Kelebihan Muatan
 - h. Retribusi Pemanfaatan Kayu Lintas Kabupaten/Kota
 - i. Retribusi Ijin Pengendalian dan Pemanfaatan Flora/Fauna
 - j. Retribusi Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan ABT
 - k. Retribusi Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan AP
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- a. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non-Bank (BPR-BKK)
 - b. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal/Investasi

4. Lain-Lain PAD yang sah

Apabila dibandingkan dengan tahun 2004, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

I. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1. Target APBD	Rp.2.554.602.823.000,-	100%
2. Target Tahapan (12 bulan)	Rp.2.554.602.823.000,-	100%
3. Realisasi (12 bulan)	Rp.2.884.319.075.868,-	107,96%
4. Perhitungan :		

a. Selisih dari target APBD :

(3 – 1) lebih	Rp. 329.716.252.868,-	7,96%
---------------	-----------------------	-------

b. Selisih dari target tahapan

(3 – 2) lebih	Rp. 329.716.252.868,-	7,96%
---------------	-----------------------	-------

II. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil

1. Target PAD dan Bagi Hasil	Rp.1.772.406.823.000,-	100%
------------------------------	------------------------	------

2. Target Tahapan (12 bulan)	Rp.1.772.406.823.000,-	100%
------------------------------	------------------------	------

3. Realisasi (12 bulan)	Rp.2.102.123.075.868,-	112,11%
-------------------------	------------------------	---------

4. Perhitungan :

a. Selisih dari target PAD

(3-1) lebih	Rp. 329.716.252.868-	12,11%
-------------	----------------------	--------

b. Selisih dari target tahapan

(3-2) lebih	Rp. 329.716.252.868,-	12,11%
-------------	-----------------------	--------

DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

LAPORAN
REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2004

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET PERUBAHAN	P E N E R I M A A N			%	SELISIH LEBIH / KURANG
			S/D BLN LALU	BLN LAPORAN	S/D BLN LAPORAN		
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4+5)	7.(6:3)	8.(5-3)
	PEMBIAYAAN						
2 1 0500 1	Penerimaan Daerah	383.357.106.000.00	39.649.565.431.00	0.00	39.649.565.431.00	10.34	(343.707.540.569.00)
2 1 0500 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	343.707.540.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(343.707.540.000.00)
2 1 0500 1 3	Piutang	39.649.565.000.00	39.649.565.431.00	0.00	39.649.565.431.00	100.00	(589.00)
2 1 0500 1 3a	Piutang Pendapatan P23KB	37.548.059.000.00	37.548.058.855.00	0.00	37.548.058.855.00	100.00	(134.00)
2 1 0500 1 3b	Piutang Pendapatan Pajak AP	2.001.497.000.00	2.001.496.555.00	0.00	2.001.496.555.00	100.00	(435.00)

Revisi IV 2004/renhang

DANA PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

REKAPITULASI
REALISASI PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2004
BULAN : DESEMBER 2004

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET PERUBAHAN	P E N E R I M A A N					%	SELISIH LEBIH / KURANG
			S/D BLN LALU	BLN LAPORAN	S/D BLN LAPORAN	6,(4+5)	7,(5+3)		
1.	2.	3.	4.	5.	6,(4+5)	7,(5+3)	8,(6-3)		
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH								
11	PAJAK DAERAH	1.305.250.434.000,00	1.451.234.531.445,00	151.454.521.391,00	1.502.599.352.834,00	122,59	295.445.918.834,00		
12	RETRIBUSI DAERAH	452.955.453.010,00	150.545.352.331,00	15.045.854.354,00	145.599.214.354,00	95,85	(5.299.278.535,00)		
13	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH	13.821.727.000,00	12.763.251.351,00	105.000.000,00	12.868.251.350,00	92,67	(1.013.475.920,00)		
14	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	111.238.159.000,00	93.935.751.721,00	9.352.053.449,00	103.287.805.169,00	92,55	(17.940.333.831,00)		
	JUMLAH PAD.	1.554.206.823.000,00	1.598.393.154.543,00	177.010.425.904,00	1.855.403.623.447,00	117,75	281.195.800.447,00		
2	DANA PERIMBANGAN								
21	BAGI HASIL PAJAK	155.000.000.000,00	151.415.512.764,00	31.710.301.549,00	233.155.514.713,00	125,37	47.185.514.713,00		
22	BAGI HASIL BUKAN PAJAK	2.200.000.000,00	2.055.145.533,00	1.475.455.125,00	3.333.637.708,00	150,82	1.333.537.708,00		
	JUMLAH BAGI HASIL	157.200.000.000,00	153.470.658.347,00	33.245.790.074,00	236.719.452.421,00	125,72	45.519.452.421,00		
23	JUMLAH PAD + BAGI HASIL	1.772.406.823.000,00	1.841.863.855.893,00	250.259.216.578,06	2.102.123.075.868,00	118,60	329.715.252.868,00		
24	DANA ALOKASI UMUM	553.054.000.000,00	553.054.000.000,00	0,00	553.054.000.000,00	100,00	0,00		
25	DANA ALOKASI KHUSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	741.254.000.000,00	705.534.552.347,00	83.245.790.074,00	785.783.452.421,00	106,55	45.519.452.421,00		
3	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH								
31	DANA PENYEIMBANG	231.739.000.000,00	231.739.000.000,00	0,00	201.735.000.000,00	100,00	0,00		
32	DANA PENYEIMBANG AD HOC	27.393.000.000,00	27.393.000.000,00	0,00	27.393.000.000,00	100,00	0,00		
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	229.132.000.000,00	229.132.000.000,00	0,00	229.132.000.000,00	100,00	0,00		
	JUMLAH SELURUHNYA	2.554.502.823.000,00	2.524.055.855.823,00	350.259.218.978,00	2.884.319.075.868,00	112,91	329.715.252.868,00		

DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN
REALISASI PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2004
BULAN : DESEMBER 2004

KODE PEKERJA	URAIAN PENDAPATAN	TARGE PERUBAHAN	P E N E R I M A A N					%	SELISIH LEBIH / (KURANG)	%
			SID BULN LALU	BULAN LAPORAN	SID BULN LAPORAN	6 (5+4)	7 (6+3)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101 0500 11	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.584.206.823.000,00	1.668.393.194.543,00	177.010.428.904,00	1.865.403.623.447,00	1.865.403.623.447,00	117,75	281.196.800.447,00	17,75	
101 0500 11 01	PAJAK DAERAH	1.306.250.434.000,00	1.451.204.831.443,00	151.434.521.391,00	1.602.699.352.834,00	1.602.699.352.834,00	122,69	296.448.918.834,00	22,69	
101 0500 11 01 01	Pajak Kendaraan Bermotor	511.000.000.000,00	570.176.303.911,00	55.561.456.845,00	626.737.790.656,00	626.737.790.656,00	122,65	115.737.790.656,00	22,65	
101 0500 11 01 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	157.575.855.090,00	162.500.314.935,00	17.820.853.550,00	200.121.198.498,00	200.121.198.498,00	119,21	32.244.342.408,00	19,21	
101 0500 11 01 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	4.433.367.681,00	4.513.449.075,00	523.355.532,00	5.036.814.675,00	5.036.814.675,00	113,61	603.425.994,00	13,61	
101 0500 11 01 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak umum)	1.385.216.359,00	1.522.951.800,00	155.816.775,00	1.678.768.575,00	1.678.768.575,00	120,90	293.552.216,00	20,90	
101 0500 11 01 01 04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	6.876.368.384,00	7.899.455.235,00	726.183.052,00	8.627.638.287,00	8.627.638.287,00	125,47	1.751.269.903,00	25,47	
101 0500 11 01 01 05	C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	104.589.417.051,00	115.632.568.998,00	10.495.213.475,00	126.127.802.465,00	126.127.802.465,00	120,59	21.538.385.414,00	20,59	
101 0500 11 01 01 06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	3.142.284.752,00	3.051.152.512,00	351.032.475,00	3.312.189.987,00	3.312.189.987,00	105,41	159.905.235,00	5,41	
101 0500 11 01 01 07	D kendaraan Khusus	1.173.630.538,00	1.700.070.800,00	144.592.575,00	1.814.553.375,00	1.814.553.375,00	154,62	641.032.837,00	54,62	
101 0500 11 01 01 08	E Sepeda Motor, Roda Tiga	221.518.835.853,00	253.346.272.531,00	25.591.645.455,00	280.037.921.986,00	280.037.921.986,00	126,42	58.519.086.133,00	26,42	
101 0500 11 02	Pembayaran	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,232,00	12,232,00	
101 0500 11 03	Pajak Kendaraan diatas Air	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
101 0500 11 03 01	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	565.500.000.000,00	672.504.761.425,00	70.584.156.825,00	743.088.930.250,00	743.088.930.250,00	126,92	157.588.930.250,00	26,92	
101 0500 11 03 02	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	136.941.621.500,00	159.805.054.475,00	15.154.767.925,00	165.550.851.500,00	165.550.851.500,00	121,92	30.019.230.000,00	21,92	
101 0500 11 03 03	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	9.767.824.000,00	10.992.448.160,00	1.231.514.100,00	12.227.352.400,00	12.227.352.400,00	125,23	2.459.528.400,00	25,23	
101 0500 11 03 04	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak umum)	1.101.552.500,00	1.095.455.850,00	57.184.575,00	1.153.581.575,00	1.153.581.575,00	108,36	52.029.075,00	5,36	
101 0500 11 03 05	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	7.483.527.950,00	8.179.767.950,00	325.431.525,00	8.509.218.475,00	8.509.218.475,00	113,71	1.025.690.525,00	13,71	
101 0500 11 03 06	C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	77.351.401.400,00	93.510.111.300,00	8.935.583.775,00	102.545.695.075,00	102.545.695.075,00	131,70	24.884.293.675,00	31,70	
101 0500 11 03 07	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	1.458.425.200,00	1.721.538.100,00	200.587.575,00	1.922.325.175,00	1.922.325.175,00	131,81	463.899.975,00	31,81	
101 0500 11 03 08	D kendaraan Khusus	2.767.892.560,00	3.877.041.275,00	59.541.300,00	3.946.582.575,00	3.946.582.575,00	141,58	1.159.090.015,00	41,58	
101 0500 11 03 09	E Sepeda Motor, Roda Tiga	348.677.740.400,00	422.221.173.475,00	43.531.645.050,00	445.752.813.525,00	445.752.813.525,00	128,06	97.075.073.125,00	28,06	
101 0500 11 04	Pembayaran	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,00	13,490,00	
101 0500 11 05	Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
101 0500 11 05 01	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	197.351.931.000,00	194.948.865.542,00	22.404.045.072,00	217.352.910.618,00	217.352.910.618,00	110,13	20.000.979.618,00	10,13	
101 0500 11 05 02	Bensin / Premium	104.114.573.922,00	113.754.471.017,00	14.201.452.537,00	128.155.933.354,00	128.155.933.354,00	123,09	24.041.359.432,00	23,09	
101 0500 11 05 03	Solar	91.500.501.067,00	78.814.753.369,00	7.632.638.775,00	86.447.392.144,00	86.447.392.144,00	94,48	(5.053.208.923,00)	(5,52)	
101 0500 11 05 04	Premix/Pentamax	1.736.756.100,00	2.379.641.160,00	355.943.550,00	2.749.585.120,00	2.749.585.120,00	158,32	1.012.829.020,00	58,32	
101 0500 11 06	Pembayaran	(89,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	(100,00)	
101 0500 11 07	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT	8.800.000.000,00	8.255.452.852,00	981.833.741,00	9.237.286.593,00	9.237.286.593,00	104,97	437.286.593,00	0,00	
101 0500 11 07	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AP	3.498.503.000,00	5.319.447.709,00	942.986.808,00	6.262.434.517,00	6.262.434.517,00	179,00	2.763.931.517,00	0,00	

2

1	2	3	4	5	6 (5+4)	7 (6-3)	8 (6-3)	9 (8-3)
12	RETRIBUSI DAERAH :	152.896.493.000,00	130.549.360.300,00	16.048.854.064,00	146.596.214.364,00	95,88	(6.296.278.636,00)	(4,12)
12 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	92.005.568.000,00	81.270.941.166,00	9.551.458.328,00	90.822.398.494,00	98,71	(1.183.168.506,00)	(1,29)
12 01 01	Administrasi Karcis	1.166.708.000,00	1.162.336.050,00	56.359.314,00	1.220.695.364,00	104,63	53.957.364,00	4,63
12 01 02	Rawat Darurat	1.657.179.000,00	1.330.842.772,00	102.236.803,00	1.440.081.572,00	85,90	(217.097.428,00)	(13,10)
12 01 03	Rawat Jalan	1.926.892.000,00	1.895.095.787,00	68.216.875,00	1.963.315.662,00	102,93	56.423.662,00	2,93
12 01 04	Rawat Inap	9.537.056.000,00	8.181.957.405,00	555.451.324,00	8.737.428.729,00	91,62	(799.557.271,00)	(8,35)
12 01 05	Rawat Intensif	777.538.000,00	826.043.600,00	55.185.103,00	883.228.700,00	113,59	105.570.700,00	13,59
12 01 06	Tindakan Medis Operatif	5.354.848.000,00	4.712.487.277,00	292.652.725,00	4.915.170.003,00	91,79	(439.677.997,00)	(8,21)
12 01 07	Tindakan Medis non Operatif	1.564.188.000,00	1.504.337.823,00	55.011.403,00	1.579.349.232,00	99,12	(13.538.765,00)	(0,87)
12 01 08	Pelayanan Kebidanan	1.476.000.000,00	1.181.909.462,00	219.557.143,00	1.401.457.605,00	94,76	(77.542.395,00)	(5,24)
12 01 09	Pelayanan Asuhan Keperawatan	1.917.132.000,00	1.516.271.175,00	145.959.857,00	1.661.231.062,00	85,65	(255.905.938,00)	(13,35)
12 01 10	Laboratorium	7.378.770.000,00	5.535.645.435,00	329.759.616,00	5.865.415.051,00	82,20	(1.318.354.949,00)	(17,80)
12 01 11	Radiologi	3.736.528.000,00	2.955.236.990,00	327.437.731,00	3.282.676.721,00	88,12	(443.851.279,00)	(11,88)
12 01 12	Pemeriksaan Elektromedika Tindakan Khusus	2.026.950.000,00	1.558.234.059,00	125.711.936,00	1.683.945.997,00	83,08	(343.004.003,00)	(16,92)
12 01 13	Rehabilitasi Medik	170.390.000,00	136.529.515,00	11.845.207,00	148.375.715,00	85,90	(22.314.285,00)	(13,10)
12 01 14	Pelayanan Ortolik	4.000.000,00	3.443.000,00	162.501,00	3.609.500,00	90,24	(390.500,00)	(9,76)
12 01 15	Pelayanan Gigi dan Mulut	266.858.000,00	207.654.300,00	22.150.500,00	229.804.800,00	77,42	(57.123.200,00)	(22,58)
12 01 16	Farmasi	35.137.830.000,00	31.321.552.553,00	2.412.411.153,00	33.733.974.145,00	95,01	(1.401.855.856,00)	(3,99)
12 01 17	Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikowaga	455.835.000,00	420.102.675,00	16.056.950,00	436.161.375,00	95,91	(19.577.625,00)	(4,09)
12 01 18	Konsultasi Gigi	50.500.000,00	37.978.408,00	2.414.800,00	40.393.208,00	79,99	(10.106.800,00)	(20,01)
12 01 19	Dijilat	324.750.000,00	757.266.950,00	57.042.500,00	214.309.450,00	96,73	(10.441.550,00)	(1,27)
12 01 20	Perawatan Jentazah	6.705.000,00	4.501.500,00	313.000,00	4.614.500,00	71,79	(1.551.500,00)	(26,21)
12 01 21	Pelayanan Ambulance dan Mobil Jentazah	123.356.000,00	99.770.700,00	6.553.800,00	106.324.500,00	87,81	(15.031.500,00)	(12,19)
12 01 22	Askes / PHJ	5.386.559.000,00	8.095.058.331,00	1.319.577.347,00	10.314.645.878,00	151,49	4.928.086.878,00	91,49
12 01 23	Jamsostek dan Perusahaan non Asuransi	1.915.423.000,00	1.918.123.483,00	452.217.400,00	2.110.340.883,00	110,18	194.917.883,00	10,18
12 01 24	PKPS / Pelayanan Pasien miskin	8.705.912.000,00	4.816.351.324,00	2.539.457.452,00	7.515.818.776,00	86,33	(1.189.093.224,00)	(13,67)
12 01 25	Medical Check Up	253.396.000,00	402.164.725,00	7.095.000,00	409.259.725,00	161,51	155.863.725,00	51,51
12 01 26	Laundry / Sanitasi	56.000.000,00	47.716.455,00	4.231.100,00	51.919.555,00	92,71	(4.083.445,00)	(7,29)
12 01 27	Lein - Lein	74.100.000,00	31.262.815,00	10.654.973,00	41.927.788,00	55,58	(32.172.212,00)	(43,42)
12 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.548.229.000,00	8.380.781.778,00	1.209.673.835,00	9.590.455.614,00	112,19	1.042.226.614,00	12,19
12 02 01	Sewa Tanah dan Bangunan	1.172.413.000,00	1.193.675.752,00	93.665.447,00	1.287.342.199,00	109,80	114.929.199,00	9,80
12 02 02	Sewa alat-alat berat	1.015.730.000,00	1.010.795.000,00	122.563.505,00	1.133.359.500,00	111,58	117.529.500,00	11,58
12 02 03	Sewa work shop	407.900.000,00	329.281.430,00	64.457.300,00	393.738.730,00	96,53	(14.161.270,00)	(3,47)
12 02 04	Sewa Rumah dinas	257.874.000,00	302.002.853,00	130.138.000,00	432.196.853,00	167,60	174.322.853,00	67,60
12 02 05	Sewa Lapangan Tennis	11.100.000,00	9.600.000,00	1.200.000,00	10.800.000,00	97,30	(300.000,00)	(2,70)
12 02 06	Sewa Ruangan / Aula / Asrama / Gedung	1.502.417.000,00	1.537.170.484,00	212.010.147,00	1.749.180.631,00	116,42	246.763.631,00	16,42
12 02 07	Sewa Kantin	71.307.000,00	61.337.770,00	11.844.230,00	73.182.000,00	102,63	1.875.000,00	2,63
12 02 08	Sewa Unit Laboratorium & Pemeriksaan Lapangan	1.083.290.000,00	1.287.563.512,00	166.923.175,00	1.454.486.687,00	134,27	371.196.687,00	34,27

1	2	3	4	5	6 (5+4)	7 (6+3)	8 (6-3)	9 (8-3)
1 01 01 0500 12 02 09	Sewa Lahan	82.265.000,00	75.165.950,00	19.081.500,00	54.287.450,00	114,59	12.022.450,00	14,59
1 01 01 0500 12 02 09	PT. Sinarang Mineral Pembangunan (SKP)	80.000.000,00	41.901.000,00	4.455.000,00	45.358.000,00	57,95	(33.544.000,00)	(42,05)
1 01 01 0300 12 02 13	Sewa Tempat Olah Raga	2.500.000,00	1.708.000,00	174.000,00	1.632.000,00	75,28	(516.000,00)	(24,72)
1 01 01 0300 12 02 14	Kwarda Pramuka	1.750.000,00	1.922.000,00	0,00	1.922.000,00	109,83	172.000,00	9,83
1 01 01 0200 12 02 15	Penerimaan PDE	130.000.000,00	207.718.785,00	41.693.584,00	249.412.370,00	191,86	119.412.370,00	91,86
1 01 01 0700 12 02 15	Sewa/Penjualan Barang lainnya	50.000,00	282.500,00	25.000,00	277.500,00	555,00	227.500,00	455,00
1 01 01 0100 12 02 16	Sewa Tanah Pengering Kayu	3.600.000,00	2.710.000,00	500.000,00	3.210.000,00	89,17	(393.000,00)	(10,83)
1 01 01 0300 12 02 17	Akomodasi Peserta Diklat	292.825.000,00	392.415.000,00	15.950.000,00	324.375.000,00	110,77	31.555.000,00	10,77
1 01 01 0200 12 02 17	Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	7.500.000,00	7.335.200,00	463.000,00	7.813.200,00	104,18	31.555.000,00	4,18
1 01 01 0200 12 02 17	Ternak Perikanan	217.000.000,00	119.745.552,00	119.147.953,00	235.897.995,00	110,09	21.637.995,00	10,09
1 01 01 0100 12 02 17	Jasa Peralatan Bergulir	30.450.000,00	27.253.000,00	3.217.000,00	30.450.000,00	100,00	0,00	0,00
1 01 01 0100 12 02 17	Penerimaan Dana Bergulir	103.380.000,00	103.380.000,00	0,00	103.380.000,00	100,00	0,00	0,00
1 01 01 0100 12 02 17	Pencetakan Peta Topografi	200.000,00	325.000,00	25.000,00	350.000,00	175,00	125.000,00	75,00
1 01 01 0100 12 02 17	Pelatihan Dokter Hiperkas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00	0,00	0,00
1 01 01 0100 12 02 17	Penerimaan Akper Wonorejo	263.700.000,00	169.900.000,00	117.000.000,00	267.900.000,00	112,97	34.555.000,00	12,97
1 01 01 0100 12 02 17	Perkir	31.500.000,00	22.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00	76,19	(7.500.000,00)	(23,81)
1 01 01 0100 12 02 17	Penjualan Sarang Rebas	5.400.000,00	4.055.550,00	563.000,00	4.779.550,00	88,52	(331.350,00)	(11,48)
1 01 01 0100 12 02 17	Karcis Tanda Masuk Museum	44.000.000,00	48.155.500,00	1.529.000,00	46.682.500,00	112,93	5.555.500,00	12,93
1 01 01 0100 12 02 18	Hasil Karya Panji	1.750.000,00	1.055.000,00	710.000,00	1.775.000,00	101,43	25.000,00	1,43
1 01 01 0300 12 02 18	Pendaftaran Anggota Perpustakaan	11.000.000,00	5.475.000,00	494.000,00	5.964.000,00	54,22	(5.515.000,00)	(45,78)
1 01 01 0300 12 02 18	Penerimaan dari Apolik Peduli	83.904.000,00	74.635.885,00	0,00	74.635.885,00	88,88	(9.268.115,00)	(13,12)
1 01 01 0100 12 02 19	Bebas Pinjam Perpustakaan	900.000,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00	114,33	129.000,00	14,33
1 01 01 0100 12 02 19	Biaya Latihan Industri	1.055.255.000,00	534.615.300,00	29.541.000,00	714.157.300,00	67,04	(251.657.700,00)	(32,95)
1 01 01 0100 12 02 19	Sewa Buku	2.100.000,00	2.128.000,00	180.000,00	2.308.000,00	109,90	228.000,00	9,90
1 01 01 0100 12 02 20	Biaya Komputer	9.600.000,00	8.105.000,00	0,00	8.105.000,00	84,38	(1.495.000,00)	(15,62)
1 01 01 0100 12 02 22	Biaya Pelatihan dengan Pihak III	201.520.000,00	355.431.520,00	49.922.000,00	405.353.520,00	201,15	203.833.520,00	101,15
1 01 01 0100 12 02 23	Biaya Latihan Bahasa Inggris	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
1 01 01 0100 12 02 25	Biaya Pemeriksaan/pengujian faktor kimia lingkungan kerja	212.749.000,00	247.432.700,00	0,00	247.432.700,00	116,33	34.743.700,00	16,33
1 01 01 0100 12 02 26	Biaya Pemeriksaan/pengujian f.ika lingkungan kerja	80.000.000,00	59.070.614,00	0,00	59.070.614,00	86,34	(10.529.385,00)	(13,66)
1 01 01 0100 12 02 27	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Kerja	9.800.000,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	23,67	(7.480.000,00)	(75,33)
1 01 01 0100 12 05 01	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	17.000.000,00	10.985.014.320,00	1.546.470.494,00	12.531.484.814,00	73,71	(4.468.515.186,00)	(26,29)
1 01 01 0100 12 05 03	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa	1.128.710.000,00	907.004.750,00	186.722.500,00	1.067.727.250,00	94,60	(60.982.750,00)	(5,40)
1 01 01 0100 12 05 04	Wisma Pemda Tri Lomba Juang	35.000.000,00	33.865.000,00	1.606.000,00	35.465.000,00	101,33	455.000,00	1,33
1 01 01 0100 12 05 04	Asrama Haji Donohudan	590.000.000,00	430.327.500,00	116.362.500,00	546.690.000,00	92,66	(13.310.000,00)	(7,34)
1 01 01 0100 12 05 06	Tempat Penginapan Disnakertrans	7.330.000,00	5.530.000,00	1.800.000,00	7.330.000,00	100,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6 (5+4)	7 (6+3)	8 (6+3)	9 (8+3)
1 1 1300 12 05 07	Sewa Wisma Dhamawangsa, Prajaica dan Samarinda	277.000.000.00	232.180.000.00	21.295.000.00	253.475.000.00	91.51	(23.525.000.00)	(6.49)
1 1 1300 12 05 09	Sewa Wisma DPRD	84.000.000.00	74.900.000.00	6.800.000.00	81.700.000.00	97.26	(2.337.000.00)	(2.74)
1 1 1300 12 05 09	Hotel Karimunjawa	15.000.000.00	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	100.00	0.00	0.00
1 1 1300 12 05 10	Wisma Pringgesan Tawangmangu	36.000.000.00	45.084.250.00	3.149.000.00	48.233.250.00	133.98	12.233.250.00	33.98
1 1 1300 12 05 11	Wisma Pondok Slamet Satraden	69.960.000.00	42.135.000.00	7.500.000.00	56.635.000.00	80.95	(13.327.000.00)	(19.05)
1 1 1300 12 05 12	Wisma Garuda Kopeng	14.420.000.00	20.982.000.00	2.215.000.00	23.195.000.00	160.87	8.775.000.00	50.87
1 1 1208	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.709.911.000.00	3.749.708.530.00	892.942.400.00	4.642.650.930.00	98.57	(67.256.070.00)	(1.43)
1 1 1300 12 05 01	Penerimaan Dinas Perikanan	2.522.835.000.00	2.143.832.985.00	420.537.650.00	2.564.370.635.00	101.65	41.537.650.00	1.55
1 1 1300 12 05 02	Hasil Pertanian BLPP Soropadan	5.500.000.00	1.650.000.00	3.850.000.00	5.500.000.00	100.00	0.00	0.00
1 1 1300 12 05 03	Lahan Kajian BPTPH Ungeran	15.000.000.00	11.450.000.00	3.550.000.00	15.000.000.00	100.00	0.00	0.00
1 1 1300 12 05 04	Penerimaan Dinas Perikanan (Salai Benih)	250.000.000.00	198.117.500.00	45.884.500.00	245.002.000.00	98.00	(4.988.000.00)	(2.00)
1 1 1300 12 05 05	Penerimaan Hsl Kebun Kelapa Kelet	40.000.000.00	40.000.000.00	314.050.00	40.314.550.00	100.79	314.550.00	0.79
1 1 1300 12 05 06	Penjualan Produksi Usaha Daerah	702.720.000.00	612.347.595.00	104.152.500.00	716.500.195.00	101.95	13.752.950.00	1.95
1 1 1300 12 05 07	Hasil Penjualan Produksi Ternak	435.855.000.00	243.805.750.00	221.447.200.00	455.252.950.00	105.74	25.397.950.00	5.74
1 1 1300 12 05 08	Penjualan Hasil Kebun UPTD SP SMP Ungeran	4.000.000.00	3.650.000.00	722.600.00	4.402.600.00	110.07	402.600.00	10.07
1 1 1300 12 05 09	Penjualan Produk UPT IS	734.000.000.00	454.824.000.00	91.484.000.00	595.508.000.00	79.88	(147.592.000.00)	(23.12)
1 1 1300 12 09 01	Retribusi Ijin Trayek	755.000.000.00	573.942.600.00	67.898.700.00	641.842.300.00	83.90	(123.157.700.00)	(16.10)
1 1 1300 12 10 01	Retribusi Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan	22.000.000.000.00	15.456.591.000.00	1.862.674.000.00	21.321.575.000.00	96.32	(676.625.000.00)	(3.08)
1 1 1300 12 11 01	Retribusi Ijin Pengendalian Kayu luntas Kab/Kota	1.500.000.000.00	1.088.774.391.00	335.663.956.00	1.424.458.337.00	94.96	(75.541.663.00)	(5.04)
1 1 1300 12 12 01	Retribusi Ijin Pengendalian dan Pemanf. Flora/Fauna	12.500.000.00	19.950.950.00	1.214.000.00	21.174.950.00	163.40	8.674.950.00	69.40
1 1 1300 12 13 01	Retribusi Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan AST	275.000.000.00	237.500.000.00	40.500.000.00	278.000.000.00	101.24	3.496.000.00	1.24
1 1 1300 12 14 01	Retribusi Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan AP	55.100.000.00	44.750.000.00	2.800.000.00	47.550.000.00	86.30	(7.556.000.00)	(13.70)
1 1 1300 12 15 01	Retribusi Tempal Pelelangan Hasil Hutan	2.700.000.000.00	1.692.445.375.00	227.300.300.00	1.919.745.675.00	71.10	(780.254.325.00)	(28.90)
1 1 1300 12 16	Retribusi Bidang Metrologi	1.900.000.000.00	1.898.329.050.00	100.589.550.00	1.998.918.600.00	105.21	98.918.600.00	5.21
1 1 1300 12 17	Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan & Telekom	296.475.000.00	241.306.400.00	48.725.000.00	290.031.400.00	57.83	(6.443.600.00)	(2.17)
1 1 13	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	13.621.727.000.00	12.703.251.080.00	105.000.000.00	12.808.251.080.00	52.67	(1.013.475.920.00)	(7.33)
1 1 1301	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	1.100.000.000.00	10.000.000.00	0.00	10.000.000.00	0.91	(1.090.000.000.00)	(99.09)
1 1 1302	Perusahaan Daerah Jawa Tengah	1.100.000.000.00	10.000.000.00	0.00	10.000.000.00	0.91	(1.090.000.000.00)	(99.09)
1 1 1303	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
1 1 1303	PT. Sank Pembangunan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
1 1 1303	Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank	10.926.727.000.00	10.926.727.000.00	0.00	10.926.727.000.00	100.00	70.00	0.00
1 1 1303	SPR - BKK	10.926.727.000.00	10.926.727.000.00	0.00	10.926.727.000.00	100.00	70.00	0.00
1 1 1304	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal / Investasi	1.755.000.000.00	1.756.524.910.00	105.000.000.00	1.871.524.910.00	104.26	76.524.910.00	4.26
1 1 1304	PDAB Slawi Tegal	200.000.000.00	120.000.000.00	80.000.000.00	200.000.000.00	100.00	0.00	0.00
1 1 1304	PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	10.000.000.00	10.265.345.00	0.00	10.265.345.00	102.86	265.345.00	2.86
1 1 1304	PT. Asuransi Bangun Askrada	800.000.000.00	876.237.664.00	0.00	876.237.664.00	109.53	76.237.664.00	9.53
1 1 1304	PT. GOR Jati Diri	30.000.000.00	30.000.000.00	0.00	30.000.000.00	100.00	0.00	0.00
1 1 1304	PT. P3PP	35.000.000.00	10.000.000.00	25.000.000.00	35.000.000.00	100.00	0.00	0.00
1 1 1304	Losari Hotel Resort	720.000.000.00	720.000.000.00	0.00	720.000.000.00	100.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6 (5+4)	7 (6+3)	8 (6-3)	9 (6-3)
14	LAIN - LAIN P A D. YANG SAH	111.238.169.000.00	93.935.751.720.00	9.362.053.449.00	103.297.805.169.00	92.86	(7.940.363.831.00)	(7.14)
01 2100 1 4 01 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	3.624.255.000.00	1.501.465.571.00	89.532.914.00	1.590.998.885.00	43.90	(2.033.256.115.00)	(56.10)
01 2100 1 4 01 04	Pelepasan Hak Atas Tanah	174.244.000.00	0.00	12.587.000.00	12.587.000.00	7.22	(161.657.000.00)	(92.78)
01 2100 1 4 01 05	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	57.010.000.00	60.480.697.00	1.089.447.00	81.550.144.00	143.05	24.540.144.00	43.05
01 2100 1 4 01 06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	15.000.000.00	14.055.450.00	5.100.000.00	19.155.450.00	127.70	4.155.450.00	27.70
01 2100 1 4 01 08	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	2.410.000.000.00	1.099.726.033.00	4.202.467.00	1.103.926.500.00	45.81	(1.305.671.500.00)	(54.19)
01 2100 1 4 01 09	Penjualan Sengkaran Bangunan & Inventaris	200.000.000.00	73.397.791.00	41.392.500.00	114.790.291.00	57.40	(65.205.703.00)	(42.60)
01 2100 1 4 01 09	Penjualan Drum Bekas	101.351.000.00	48.831.000.00	11.931.500.00	60.762.500.00	59.95	(40.595.500.00)	(40.05)
01 2100 1 4 02	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	666.640.000.00	154.975.000.00	13.250.000.00	195.225.000.00	29.73	(468.415.000.00)	(70.27)
01 2100 1 4 02 01	Penerimaan Jasa Giro	63.533.744.000.00	43.525.347.482.00	3.974.648.274.00	47.499.995.766.00	74.76	(16.033.748.234.00)	(25.24)
01 2100 1 4 02 02	Jasa Giro Kas Daerah	17.500.000.000.00	6.722.957.738.00	437.840.952.00	7.169.828.690.00	40.92	(10.339.171.310.00)	(59.05)
01 2100 1 4 02 03	Jasa Giro Pemegang Kas	168.424.000.00	454.256.890.00	136.807.322.00	591.054.212.00	350.94	422.546.212.00	250.94
01 2100 1 4 03	Jasa Giro Khusus	45.655.320.000.00	36.348.102.864.00	3.400.000.000.00	39.748.102.864.00	56.56	(6.117.217.135.00)	(13.34)
01 2100 1 4 03 01	Penerimaan Bunga Bank	20.000.000.000.00	22.502.239.845.00	2.327.241.542.00	24.829.481.387.00	124.15	4.829.481.387.00	24.15
01 2100 1 4 03 02	Bunga Deposito	20.000.000.000.00	22.502.239.845.00	2.327.241.542.00	24.829.481.387.00	124.15	4.829.481.387.00	24.15
01 2100 1 4 03 02	Bunga Tabungan	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
01 2100 1 4 05	Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian/Kehilangan	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
01 2100 1 4 06	Kekayaan Daerah (TP - TGR)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
01 2100 1 4 06 01	Sumbangan Pihak Ketiga	16.000.000.000.00	22.095.236.544.00	2.070.250.365.00	24.165.486.909.00	134.25	6.165.486.909.00	34.25
01 2100 1 4 06 02	Sumbangan Pihak Ketiga - Perantara (Dealer)	12.500.000.000.00	14.136.650.410.00	1.754.553.000.00	15.891.203.410.00	127.53	3.441.203.410.00	27.53
01 2100 1 4 07	Sumbangan Pihak Ketiga - Lain-lain	5.500.000.000.00	7.958.588.134.00	315.697.055.00	8.274.285.189.00	149.53	2.724.285.189.00	49.53
01 2100 1 4 07 01	Penerimaan Lain-lain	6.080.170.000.00	4.311.459.888.00	900.380.654.00	5.211.840.522.00	85.72	(866.329.478.00)	(14.28)
01 2100 1 4 07 03	Penerimaan Kembali Kres - BKK	281.071.000.00	210.038.844.00	55.165.582.00	255.204.426.00	94.35	(15.655.574.00)	(5.55)
01 2100 1 4 07 04	Penek Tidak Layak Bibit	37.500.000.00	26.658.600.00	36.726.000.00	59.354.500.00	158.35	21.884.500.00	58.35
01 2100 1 4 07 05	Penek Internet	7.500.000.00	11.733.750.00	661.250.00	12.395.000.00	165.27	4.895.000.00	65.27
01 2100 1 4 07 06	Penerimaan dari Dana Berputar / Revolving	500.000.000.00	710.249.000.00	101.249.500.00	611.498.500.00	162.30	311.498.500.00	62.30
01 2100 1 4 07 06	Kerja sama dengan BUMDA	6.000.000.00	3.567.500.00	0.00	3.567.500.00	59.45	(2.432.500.00)	(40.54)
01 2100 1 4 07 04	Penerimaan DUKS	352.592.000.00	753.725.387.00	355.025.000.00	1.104.511.387.00	236.30	812.022.387.00	233.30
01 2100 1 4 07 01	Tempat Rekreasi Nusanarungan	17.500.000.00	7.872.000.00	4.628.000.00	12.500.000.00	71.43	(5.006.000.00)	(28.57)
01 2100 1 4 07 02	Sewaan TP-TGR	1.687.000.00	2.437.500.00	0.00	2.437.500.00	144.49	750.500.00	44.49
01 2100 1 4 07 04	Penerimaan lainnya dari Seida	4.597.000.000.00	2.036.814.075.00	61.691.991.00	2.098.505.066.00	45.52	(2.504.576.934.00)	(54.48)
01 2100 1 4 07 04	Penerimaan lainnya dari Dinas-dinas	279.237.000.00	525.303.212.00	262.432.331.00	787.735.543.00	282.10	508.498.543.00	122.10
2	DANA PERIMBANGAN	741.264.000.000.00	706.534.662.347.00	83.248.790.074.00	789.783.452.421.00	106.55	43.519.452.421.00	6.55
21	BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	188.200.000.000.00	153.470.662.347.00	83.248.790.074.00	236.719.452.421.00	125.78	48.519.452.421.00	25.78
2101	BAGI HASIL PAJAK	186.000.000.000.00	151.415.512.764.00	81.770.301.949.00	233.185.814.713.00	125.37	47.185.814.713.00	25.37
01 0300 2 1 01 01	Pejak Bumi dan Bangunan (PRB)	80.000.000.000.00	74.635.483.847.00	41.534.508.777.00	116.169.992.624.00	145.21	36.169.992.624.00	45.21
01 0300 2 1 01 02	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	15.000.000.000.00	19.194.132.217.00	3.257.803.625.00	22.451.935.842.00	149.68	7.451.935.842.00	49.68
01 0300 2 1 01 03	Pejak Penghasilan Orang Pribadi termasuk PPh. Psl 21	91.000.000.000.00	57.585.896.700.00	36.977.989.547.00	94.563.896.247.00	103.92	3.563.896.247.00	3.92

1	2	3	4	5	6 (5+4)	7 (6+3)	8 (5+3)	9 (6+3)
1	2102	BAGI HASIL BUKAN PAJAK						
101030210201		Pembelian Hak Atas Tanah Pemerintah	2.200.000.000,00	1.472.488.125,00	3.533.637.768,00	160,62	1.333.637.768,00	50,62
101030210202		Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		0,00		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
101030210203		Sumber Daya Alam (Migas)	1.750.000.000,00	1.358.265.887,00	3.232.565.150,00	187,93	1.539.586.150,00	87,93
101030210204		Juran Eksplorasi/Landrent	300.000.000,00	110.222.258,00	244.051.348,00	81,35	(55.948.452,00)	(18,65)
		Jumlah PAD + BAGI HASIL	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)
2	22	DANA ALOKASI UMUM	1.772.466.823.000,00	1.841.863.856.890,00	2.102.123.075.858,00	118,60	329.716.252.868,00	18,60
101030220101		Dana Alokasi Umum	553.064.000.000,00	553.064.000.000,00	553.064.000.000,00	100,00	0,00	0,00
101030230101		Dana Alokasi Khusus	553.064.000.000,00	553.064.000.000,00	553.064.000.000,00	100,00	0,00	0,00
		LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
3	3101	BANTUAN DANA KONTINJENS/PENYEIMBANG PEM	229.132.000.000,00	229.132.000.000,00	229.132.000.000,00	100,00	0,00	0,00
101030310101		Dana Penyeimbang	229.132.000.000,00	229.132.000.000,00	229.132.000.000,00	100,00	0,00	0,00
101030310102		Dana Penyeimbang ad hoc Gaji ke XIII	201.739.590.000,00	201.739.590.000,00	201.739.590.000,00	100,00	0,00	0,00
			27.393.000.000,00	27.393.000.000,00	27.393.000.000,00	100,00	0,00	0,00
		Jumlah SELURUHNYA	2.554.602.823.000,00	2.624.059.856.890,00	2.824.319.075.858,00	112,91	329.716.252.868,00	12,91

101030310102

Berdasarkan data-data yang telah tersaji di atas, maka adanya investasi membawa dampak dan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pajak Daerah :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Pajak Kendaraan di Atas Air
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- d. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air
- e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- f. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT
- g. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AP

2. Retribusi Daerah

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan (ASKES)
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- d. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
- e. Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan
- f. Retribusi Ijin Trayek
- g. Retribusi Dispensasi Kelebihan Muatan
- h. Retribusi Pengendalian Kayu Lintas Kabupaten/Kota
- i. Retribusi Ijin Pengendalian dan Pemanfaatan Flora/Fauna

- j. Retribusi Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan ABT
 - k. Retribusi Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan AP
 - l. Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- a. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non-Bank (BPR-BKK)
 - b. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal/Investasi
4. Lain-Lain PAD yang sah

Berdasarkan data-data pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 dan 2004, khususnya yang berasal dari adanya investasi, baik PMA maupun PMDN yang telah tersaji di atas, dapat diketahui dan diperbandingkan bahwa terdapat kenaikan Pendapatan Asli Daerah dengan adanya investasi. Oleh karena itulah, penciptakan iklim investasi yang kondusif di Jawa Tengah sangat penting dilakukan dan berhubungan dengan pembangunan daerah khususnya.

Dalam hal pendapatan asli daerah yang telah diperoleh daerah-daerah di Jawa Tengah, terdapat data bahwa kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pola perijinan *one stop service*, mengalami peningkatan PAD, yaitu :

1. Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan investasi 34% selama tahun 2003/2004, dari Rp. 92.855 juta menjadi Rp. 123.537 juta. Pemasukan untuk PAD tahun 2003/2004 juga mengalami kenaikan dari Rp. 147 juta menjadi Rp. 579, 27 juta atau naik 294%
2. Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan investasi sebesar 264% dari nilai investasi Rp. 995.664 juta menjadi Rp. 3.628.501 juta. Pemasukan PAD tahun 2003/2004 meningkat sebesar 70% dari Rp. 572,99 juta menjadi Rp. 978 juta.
3. Kabupaten Kudus mengalami kenaikan investasi sebesar 206% dari nilai investasi sebelumnya Rp. 140.700 juta menjadi Rp. 430.000 juta.
4. Kabupaten Sragen mengalami kenaikan investasi pada tahun 2003/2004 sebesar 81%, dari nilai investasi Rp 69.334 juta menjadi Rp. 125.551 juta. Pemasukan untuk PAD juga mengalami kenaikan pada tahun yang sama yaitu 152%, dari Rp. 478,76 juta menjadi Rp. 1.2341.,45 juta.
5. Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan investasi sebesar 57%, dari nilai investasi semula Rp. 1.974.825 juta menjadi Rp.

3.109.129 juta. Pemasukan PAD juga mengalami kenaikan sebesar 124% dari Rp. 571,83 menjadi Rp. 1.281,19 juta.

Berdasarkan data 5 kabupaten yang sudah melaksanakan pola perijinan satu atap atau *one stop service* dapat diketahui bahwasannya secara tajam mengalami kenaikan PAD yang bersumber dari kenaikan investasi. Pola perijinan OSS adalah merupakan implikasi yang dapat dilihat dari adanya penerapan paket undang-undang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

C. Keberadaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dalam Mewujudkan Iklim Investasi Jawa Tengah yang Kondusif dalam Rangka Pembangunan Daerah

Berdasarkan pembahasan mengenai implikasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap iklim investasi di Jawa Tengah diketahui bahwasannya keberadaan kedua undang-

undang tersebut membawa dampak, baik positif maupun negatif terhadap iklim investasi. Di satu pihak, dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah tersebut, kewenangan daerah menjadi luas dan dapat memaksimalkan potensi daerah untuk pembangunan di daerah. Akan tetapi, di lain pihak para investor merasa keberatan akan prosedur dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang seringkali mengalami *overlapping* dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam hal perijinan dan pungutan-pungutan.

Keberadaan investasi di Jawa Tengah khususnya, sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Pada prinsipnya keberadaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, telah mampu memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya iklim investasi, khususnya di daerah, karena undang-undang ini merupakan *starting point* bagi kelangsungan otonomi daerah dengan paradigma desentralistik. Namun dalam kelangsungan dan praktiknya di lapangan masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan atas undang-undang ini. Kekurangan dan kelemahannya adalah dalam hal PAD, di mana dalam undang-undang yang lama prosentase pembagian PAD antara pemerintah pusat dan daerah masih *overlapping*, demikian juga dalam hal pembuatan kebijakan perpajakan, masih terdapat banyak kebijakan pemungutan pajak yang tumpang tindih, antara kebijakan pemungutan pajak dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga terdapat beberapa pajak yang *double* pemungutan, bahkan terdapat pajak-pajak yang tidak jelas pengalokasiannya. Hal ini merugikan masyarakat dan dapat menghambat investasi. Dengan keluarnya paket undang-undang otonomi daerah yang baru, yang merevisi undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Keberadaan undang-undang yang baru ini membawa suatu nuansa baru yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya dan tentu saja apa yang diharapkan dengan ditetapkannya undang-undang yang baru ini dapat menjawab segala permasalahan tentang investasi di Jawa tengah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah provinsi menganut asas dekonsentrasi sekaligus desentralisasi. Berdasarkan asas dekonsentrasi, maka provinsi merupakan wilayah administratif (*local state government*). Keberadaan wilayah administratif merupakan implikasi logis dari penerapan asas dekonsentrasi. Asas Dekonsentrasi menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 1999 dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Menurut asas dekonsentrasi dalam UU yang baru, yang diserahkan adalah wewenang administrasi administrasi dan implementasi kebijakannya, sedangkan wewenang politiknya tetap berada pada pemerintah pusat. Dengan demikian, dalam hal ini kedudukan Gubernur adalah sebagai wakil dari pemerintah pusat dan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat hanyalah kewenangan administratif, sehingga dalam hal ini masih terjadi hubungan hierarkis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi) sebagai wilayah administratif. Jadi, wilayah administratif provinsi adalah bawahan/subordinat dari pemerintah pusat dan posisinya tergantung dari pemerintah pusat dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat adalah :

1. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sosialisasi kebijaksanaan nasional di daerah;

2. Koordinasi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, sektoral, kelembagaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
3. Fasilitas kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam wilayah kerjanya;
4. Pelantikan bupati/walikota;
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah dengan daerah otonom di wilayahnya dalam rangka memelihara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengkondisian terselenggaranya pemerintah daerah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab, baik yang dilakukan oleh Badan Eksekutif daerah maupun Badan Legislatif Daerah;
8. Penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
9. Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas instansi lain lain;
10. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
11. Pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Keputusan DPRD, serta Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
12. Pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
13. Pemberian pertimbangan terhadap pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.

Terlebih lagi dengan disahkan dan diberlakukannya Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, akan membawa permasalahan baru dalam hal investasi. Pada dasarnya di satu sisi Perpres yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut merupakan upaya untuk menciptakan kepastian dalam hal investasi yang bersifat infrastruktur, akan tetapi di sisi lain kepastian yang diberikan oleh pemerintah terhadap investor tersebut justru merupakan ketidakpastian bagi para pemilik tanah. Para investor dapat berlega hati dengan diberlakukannya Perpres tersebut, dan secara sepihak Perpres ini akan mendukung terciptanya iklim investasi. Akan tetapi dengan adanya jurang kepentingan dan perbedaan antara maksud baik pemerintah, masyarakat dan investor, dapat mengakibatkan inkonsistensi pemerintah dalam melaksanakan isi Perpres tersebut, apalagi apabila dilaksanakan tidak berdasarkan prosedur yang sesuai. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pelaksanaan kebijakan yang jelas dan sesuai antara berbagai kepentingan, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa :

“untuk proses pencabutan hak kepemilikan atas tanah seseorang, secara berjenjang harus melalui Bupati, Walikota, Gubernur sampai dengan Menteri Dalam Negeri, untuk bisa sampai kepada Presiden dan selanjutnya harga tanah ditentukan bersama-sama melalui komunikasi antara warga dengan Komite Independen”.⁴

Adanya Perpres tersebut harus disikapi secara positif, dalam arti dari berbagai sudut kepentingan yang dipertaruhkan, jangan sampai tanah yang dibebaskan dari warga hanya semata-mata untuk kepentingan bisnis dengan berkedok pembangunan.

⁴ Kompas, Rabu 13 Juli 2004, hal., 2.

Selain itu, provinsi juga menganut asas desentralisasi. Berdasarkan asas desentralisasi maka provinsi menjadi daerah otonom (*local self government*) dan bertanggung jawab kepada DPRD. Daerah otonom merupakan daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendirinya, sehingga pemerintah pusat menyerahkan kewenangan politik dan administrasinya secara penuh kepada daerah. Implikasi struktural dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan sekaligus asas desentralisasi adalah menjadikan provinsi sebagai daerah otonom sekaligus menjadi wilayah administratif.

Tugas dan kewenangan dari pemerintah provinsi sebagai daerah otonom terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, yaitu :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pengawasan dan pemanfaatan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7. Penanggulungan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10. Pengendalian lingkungan hidup;

11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintah;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh perundang-undangan.

Selanjutnya, menurut Pasal 176 UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwasannya pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom dan wilayah administratif, dapat diketahui bahwasannya dalam hal pelayanan administrasi penanaman modal, baik PMA maupun PMDN menjadi tugas dan kewenangan dari pemerintah provinsi sebagai daerah otonom. Jadi pemerintah provinsi tidak bertanggung jawab secara subordinat kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, gerak dan langkah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dapat lebih lebar dan luas dalam hal penanaman modal.

Ini berarti secara positif, keberadaan UU No. 32 Tahun 2004 semakin membuka kesempatan yang lebih luas kepada provinsi untuk secara *concern* menentukan kebijakan yang sesuai guna menciptakan iklim investasi yang

konduktif di Jawa Tengah. Akan tetapi menurut F.X. Soegiyanto terdapat kelemahan dengan adanya asas desentralisasi ini, yaitu adanya pemilihan kepala daerah secara langsung.⁵

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat di daerah, akan membawa dampak yang negatif, sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa gubernur sebagai kepala daerah otonom tidak bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan DPRD, akan tetapi bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat. Implikasi dari pengaturan ini adalah tidak adanya kewajiban dari gubernur sebagai kepala daerah otonom untuk membuat pertanggungjawaban sebagai kepala daerah otonom kepada DPRD. Ini berarti DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah tidak dapat mengambil tindakan atas kemungkinan penyelewengan dan kesalahan yang dapat dilakukan gubernur, sehingga berakibat DPRD pun tidak dapat mengundurkan dan mencabut mandat gubernur sebagai kepala daerah otonom. Kenyataan inilah yang mengkhawatirkan, khususnya dalam hal gubernur sebagai pembuat kebijakan dari lembaga eksekutif di daerah. Ini adalah kelemahan keberadaan UU No. 32 Tahun 2004.

Oleh karena itu, harus senantiasa dilakukan langkah alternatif untuk mengantisipasi keadaan ini, yaitu efektifitas pengawasan masyarakat atas segala bentuk kebijakan yang dilakukan oleh gubernur sebagai lembaga eksekutif di daerah. Ini disebabkan masyarakat adalah sebagai pihak pemilih yang bertanggung jawab atas kerja dan kinerja dari gubernur.

Selain keberadaan UU No. 32 Tahun 2004 dapat menunjang iklim investasi di Jawa Tengah, keberadaan UU No. 33 Tahun 2004 juga sangat

⁵ F.X. Soegiyanto, "Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 : Implikasinya terhadap PILKADA Langsung dan Peluang Investasi di Daerah", *Seminar Perspektif Ekonomi Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terhadap Peluang Investasi di Daerah*, (Semarang : 9 Maret 2005, Undip)

penting, khususnya dalam hal peranan investasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jadi terdapat hubungan yang timbal balik antara pemerintah daerah, penciptaan iklim investasi yang kondusif dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Hubungannya adalah bahwa di satu sisi keberadaan otonomi daerah dapat menguntungkan investor sekaligus daerah dalam hal penentuan kebijakan, khususnya perijinan dan pajak atau retribusi yang dikenakan kepada investor. Ini disebabkan kewenangan yang diberikan kepada daerah sebagai daerah otonom mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat dibuat lebih mudah dan cepat dengan prosedur yang ringan dan ini akan mengakibatkan para investor berlomba-lomba untuk meninvestasikan dananya. Selain itu, pemerintah dapat mengkondisikan dan mengkondusifkan daerah sebagai tempat yang nyaman, aman dan kondusif untuk melangsungkan kegiatan usaha.

Apabila telah tercipta iklim investasi yang kondusif, maka pemerintah akan diuntungkan dalam hal penerimaan daerah, karena keberadaan investasi sangat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi dengan catatan ditiadakannya pungutan-pungutan liar dan tumpang tindih pungutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan kenyataan ini, maka UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah mengatur model pembiayaan pemerintah daerah secara mendasar. Konsepsi dasar dalam model pembiayaan daerah, pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan

undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 25 Tahun 1999, yaitu penyerahan ¹¹keenangan pemerintah kepada daerah, baik menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan, yang harus diikuti dengan biaya, perangkat dan tenaga yang memadai agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut. Dengan model pembiayaan yang demikian, pemerintah pusat secara subyektif tidak dapat menentukan dana tersebut, akan tetapi dapat mengalokasikan dana secara proporsional dan rasional kepada daerah agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan otonominya secara kreatif dan bertanggung jawab.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana investasi masuk dalam sumber keuangan daerah ini, sehingga apabila iklim ^{investasi}di Jawa Tengah kondusif, maka dampak positif yang diterima oleh provinsi adalah meningkatnya PAD. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan PAD lain-lain yang sah.

1. Jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh provinsi adalah :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB-KAA) dengan tarif 5%
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB-KAA) dengan tarif 10%
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan tarif 5%
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT dan AP) dengan tarif 20%

Demi rasa keadilan dan asas pemerataan, maka diatur Bagi Hasil Pajak dan Realokasi Pajak Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota. Pajak provinsi dari PKB-KAA dan BBNKB-KAA, P3ABT dan AP sebagian diserahkan kepada kabupaten/kota dengan ketentuan :

- a. Minimum 30% dari penerimaan PKB-KAA dan BBN-KAA
 - b. Minimum 70% dari penerimaan PBB-KB
 - c. Minimum 70% dari penerimaan P3ABT dan AP
2. Retribusi yang ditetapkan sebagai retribusi daerah adalah :
- a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perijinan

Retribusi ditetapkan dengan Perda dan tarifnya ditinjau kembali secara berkala dengan mempertimbangkan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Jadi, kewenangan penetapan besarnya dan macam retribusi ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah provinsi.

3. Laba BUMD dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Lainnya

Lab a BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dimaksud adalah seperti perusahaan-perusahaan milik pemerintah, bank-bank pemerintah, Badan Kredit Kecamatan, BPR, Pasar, tempat hiburan dan rekreasi, villa, pesanggrahan, hotel dan lain sebagainya.

4. Lain-lain PAD yang sah, meliputi

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro

- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Berdasarkan jenis-jenis PAD di atas, maka keuntungan dengan adanya investasi adalah berada pada pajak daerah dan retribusi daerah. Akan tetapi tidak serta merta demikian, karena terdapat implikasi yang dapat berakibat positif sekaligus negatif dengan adanya investasi ini. Di satu sisi investasi berdampak positif dengan adanya keuntungan yang didapat daerah dengan adanya investasi, yaitu peningkatan PAD yang pada akhirnya dapat dipergunakan untuk pembangunan di daerah. Akan tetapi di sisi lain, keberadaan investasi dapat berdampak **negatif** dengan adanya kerugian yang diderita oleh daerah, karena antusiasme dan agresifitas daerah yang berlomba-lomba dalam meningkatkan PAD, dapat mengakibatkan keluarnya suatu kebijakan pemerintah yang tidak relevan dan merugikan para investor, yaitu dalam bentuk pungutan-pungutan yang memberatkan dan sering tumpang tindih dengan kebijakan pungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Keadaan ini harus senantiasa diantisipasi oleh daerah dan menjadi *warning* dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penciptaan iklim investasi. Hal ini disebabkan motif yang mendasari para investor menanamkan modalnya di suatu daerah adalah adanya harapan untuk mendapatkan keuntungan (*expected profit*). Oleh karena itulah, peluang untuk melakukan investasi di daerah sangat dipengaruhi oleh peluang mendapatkan

keuntungan tersebut. semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan sekarang dan akan datang, maka akan semakin besar pula kemungkinannya untuk melakukan investasi di suatu daerah, dengan demikian semakin besar peluang daerah untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya investasi tersebut.

Akan tetapi akan terjadi hal yang sebaliknya, apabila karena banyaknya pungutan dan pajak yang ditarik oleh daerah sehingga berakibat berkurangnya keuntungan investor, bahkan tidak untungya investor, terlebih lagi tidak ditunjang dengan faktor sosial, ekonomi, politik, kemudahan prosedur perijinan, kelembagaan, infrastruktur fisik, saran dan prasarana, tenaga kerja dan produktivitas usaha, maka akan kecil kemungkinan para investor menginvestasikan dananya di daerah tersebut. Hal ini berakibat kecil pula kemungkinan daerah menjadi tujuan investasi, demikian pula dalam hal peningkatan PAD dari adanya investasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab hasil penelitian dan pembahasan dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap iklim investasi di Jawa Tengah. Implikasi yang diberikan adalah dalam bentuk keleluasaan dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi yang dapat menunjang investasi. Daerah sebagai pemegang kewenangan daerah dapat meregulasikan dan merumuskan suatu kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan yang diambil pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah adalah penerapan *one stop service* (OSS) di setiap kota/kabupaten di Jawa Tengah, yang sudah diawali dengan diterapkannya OSS pada Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purbalinga, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Kudus.

Selain kebijakan penerapan OSS, Provinsi Jawa Tengah juga meregulasikan beberapa peraturan daerah yang dapat menunjang iklim investasi di Jawa Tengah, yaitu : Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan

Daerah No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah, Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah, Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Hasil Hutan, Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan.

Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, seperti Provinsi Jawa Timur nilai investasi PMDN tercatat Rp. 3,398 triliun, nilai investasi PMDN Jawa Barat sebesar 3,933 triliun dan nilai investasi PMDN DKI Jakarta sebesar 3,481 triliun. Data BKPM juga menunjukkan bahwa nilai investasi PMA Jawa Timur sebesar US\$ 325 juta, nilai investasi PMA Jawa Barat sebesar US\$ 2,08 miliar, nilai investasi PMA DKI Jakarta sebesar US\$ 1,72 miliar.

2. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa implikasi terhadap investasi, yaitu bahwasannya di satu sisi

keberadaan investasi dapat menjadi penunjang kenaikan PAD, di mana dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 mengalami kenaikan laju investasi secara signifikan, baik dari sisi PMDN maupun PMA, nilai investasi yang dapat diserap oleh Jawa Tengah menjadi yang tertinggi di tingkat nasional. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa nilai investasi PMDN Jawa Tengah pada tahun 2004 mencapai Rp. 6.01 trilyun, sedangkan untuk PMA mencapai US\$ 3,37 milyar. Kenaikan PAD yang dialami oleh Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan pola perijinan *one stop service*, yaitu :

- a. Kabupaten Banjarnegara, mengalami peningkatan pemasukan PAD tahun 2003/2004 dari Rp. 147 juta menjadi Rp. 579,27 juta atau naik 294%.
- b. Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan pemasukan PAD pada tahun 2003/2004 sebesar 70% dari Rp. 572,99 juta menjadi Rp. 978 juta.
- c. Kabupaten Kudus, di mana nilai investasi naik sebesar 206%, dari nilai investasi sebelumnya Rp. 140.700 juta menjadi Rp. 430.000 juta.
- d. Kabupaten Sragen, pemasukan untuk PAD pada tahun 2003/2004 mengalami kenaikan 152%, dari Rp. 478,76 juta menjadi Rp. 1.231,45 juta.
- e. Kabupaten Purbalingga terjadi kenaikan pemasukan PAD selama 2003/2004 sebesar 124%, dari Rp. 571,83 menjadi Rp. 1.281,19 juta.

Investasi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah, yang terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AP.
- b. Retribusi Daerah, yang terdiri dari : Retribusi Pelayanan Kesehatan (ASKES), Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan, Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Dispensasi Kelebihan Muatan, Retribusi Pengendalian Kayu Lintas Kabupaten/Kota, Retribusi Ijin Pengendalian dan Pemanfaatan Flora/Fauna, Retribusi Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan ABT, Retribusi Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan AP, Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang terdiri dari : Bagian Laba Lembaga Keuangan Non-Bank (BPR-BKK) dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal/Investasi
- d. Lain-Lain PAD yang sah

3. Keberadaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sangat menentukan penciptakan iklim investasi, karena undang-undang ini adalah sebagai revisi dari undang-undang yang sebelumnya. Kelemahan dari undang-undang yang lama, sehingga memerlukan pengaturan yang baru dalam undang-undang revisi dalam hal PAD, di mana dalam undang-undang yang lama prosentase pembagian PAD antara pemerintah pusat dan daerah masih *overlapping*, demikian juga dalam hal pembuatan kebijakan perpajakan, masih terdapat banyak kebijakan pemungutan pajak yang tumpang tindih, antara kebijakan pemungutan pajak dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga terdapat beberapa pajak yang *double* pemungutan, bahkan terdapat pajak-pajak yang tidak jelas pengalokasiannya. Hal ini merugikan masyarakat dan dapat menghambat investasi. Hal baru yang diatur undang-undang UU No. 32 tahun 2004 yang dapat mendukung terciptanya iklim investasi adalah penempatan provinsi sebagai daerah otonom dengan asas desentralisasi dan sekaligus sebagai wilayah administrasi yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Secara otonom, provinsi dapat mengadakan pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota. Dengan demikian Jawa Tengah dapat dengan mudah melaksanakan sistem perijinan satu pintu sebagai realisasi dari kebijakan pemerintah provinsi. Ini akan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Apabila telah tercipta iklim investasi yang kondusif, maka pemerintah akan diuntungkan dalam hal penerimaan daerah, karena keberadaan investasi sangat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi dengan catatan ditiadaknya pungutan-pungutan liar dan tumpang tindih pungutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, serta keimpulan, maka dapat penulis sarankan kepada :

1. Pemerintah, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa tengah untuk dengan segera mensosialisasikan dan menerapkan secara efektif kebijakan *one stop service* pada kabupaten/kota yang sudah menerapkannya akan tetapi belum efektif dan daerah kabupaten/kota lainnya yang sama sekali belum menerapkannya.
2. Pemerintah, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan promosi dengan sasaran para investor asing tentang keunggulan yang dimiliki oleh Jawa Tengah, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana, kemudahan prosedur perijinan dan budaya masyarakat serta pemerintah yang tertib dan baik.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk segera melakukan pembenahan di bidang bea cukai, imigrasi, ijin investasi dan pertanahan, khususnya setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005, sehingga

dapat diantisipasi kepentingan investor dan masyarakat sebagai pihak pemilik tanah.

4. Pemerintah, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk segera melakukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan administrasi perijinan investasi, agar tidak terjadi tumpang tindih pengurusan investasi yang dapat berakibat lamanya pengurusan ijin investasi.